



PEMERINTAH KABUPATEN  
BONE BOLANGO



# LKPJ TAHUN 2018





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat merampungkan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bone Bolango untuk Tahun 2018. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Kami menyadari bahwa pencapaian kinerja selama tahun 2018 belum dapat memenuhi harapan sebagaimana janji politik kami yang termuat dalam Visi Misi RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, Oleh karenanya kami memohonkan maaf jika dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang hal ini tentunya tidak lepas dari kodrat kita sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan, dengan harapan kiranya hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi kemajuan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango kedepan menuju Bone Bolango Cemerlang 2021. Semoga kita semua beroleh Berkah dan Ridha Allah SWT, Amin.....

Bone Bolango, Maret 2019



**BUPATI BONE BOLANGO**

**HAMIM POU**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
A. Dasar Hukum .....	I-1
1. Umum .....	I-1
2. Tujuan dan Sasaran .....	I-2
3. Landasan Penyusunan .....	I-2
B. Gambaran Umum Daerah .....	I-4
1. Kondisi Geografis .....	I-4
2. Gambaran Umum Demografis .....	I-14
3. Kondisi Sosial Ekonomi .....	I-16
a. Kondisi Sosial Masyarakat .....	I-16
b. Kondisi Perekonomian Daerah .....	I-16
<b>BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
A. Visi dan Misi.....	II-1
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Jangka Menengah.....	II-6
C. Prioritas Daerah Tahun 2016-2021 .....	II-23
D. Tema dan Sasaran prioritas Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018.....	II-27
<b>BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III-1</b>
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	III-2
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....	III-3
2. Target dan Realisasi Pendapatan .....	III-3
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	III-4
1) Pajak Daerah .....	III-5
2) Retribusi Daerah.....	III-6
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .....	III-8
4) Lain-lain PAD yang Sah.....	III-9
b. Dana Perimbangan .....	III-10
1) Dana Transfer Umum .....	III-11
2) Dana Transfer Khusus .....	III-11
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	III-11
1) Pendapatan Hibah.....	III-11
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.....	III-12
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.....	III-12
4) Pendapatan Lainnya.....	III-13

3. Permasalahan dan Solusi.....	III-13
B. Pengelolaan Belanja Daerah .....	III-14
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	III-14
2. Target dan Realisasi Belanja.....	III-15
a. Belanja Tidak Langsung.....	III-15
b. Belanja Langsung.....	III-16
c. Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	III-17

<b>BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV-20
1. Pendidikan .....	IV-20
2. Kesehatan .....	IV-29
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-40
4. Perumahan Rakyat dan Permukiman.....	IV-50
5. Sosial .....	IV-56
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	IV-61
1. Ketenagakerjaan.....	IV-61
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	IV-65
3. Pangan.....	IV-69
4. Pertanahan.....	IV-70
5. Lingkungan Hidup.....	IV-72
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	IV-75
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-77
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV-82
9. Perhubungan.....	IV-84
10. Komunikasi dan Informasi.....	IV-86
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	IV-89
12. Penanaman Modal.....	IV-94
13. Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-96
14. Perpustakaan.....	IV-100
15. Kearsipan.....	IV-102
16. Statistik .....	IV-103
17. Kebudayaan .....	IV-103
C. Urusan Wajib Pilihan .....	IV-104
1. Kelautan dan Perikanan .....	IV-104
2. Pariwisata .....	IV-107
3. Pertanian.....	IV-110
4. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	IV-118
5. Perdagangan.....	IV-120
6. Perindustrian .....	IV-123
D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	IV-125
1. Administrasi Pemerintahan.....	IV-125
2. Pengawasan.....	IV-134
3. Perencanaan .....	IV-137
4. Keuangan .....	IV-144
5. Kepegawaian.....	IV-149

<b>BAB V.</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>V-1</b>
	A. Tugas Pembantuan Yang Diterima .....	V-2
	1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan.....	V-2
	2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .....	V-2
	3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan .....	V-2
	4. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan.....	V-2
	5. Sumber dan Jumlah Anggaran .....	V-3
	6. Permasalahan dan Solusi.....	V-3
	B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan .....	V-4
	1. Dasar Hukum .....	V-4
	2. Urusan Pemerintah Yang Ditugas Perbantuankan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/Kota .....	V-5
	3. Alokasi Dana Desa (ADD).....	V-5
	4. Dana Desa (DD).....	V-10
<b>BAB VI.</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>VI-1</b>
	A. Kerjasama Antar Daerah .....	VI-1
	B. Pembinaan Batas Wilayah .....	VI-4
	C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	VI-5
	D. Pengelolaan Kawasan Khusus .....	VI-11
	E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .....	VI-12
<b>BAB VII.</b>	<b>P E N U T U P .....</b>	<b>VII-1</b>
	A. Kesimpulan .....	VII-1
	B. S a r a n .....	VII-2



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

#### 1. Umum

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269). Bertitik tolak Amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember yang mengatur Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang kala itu hanya memiliki tiga daerah, sementara idealnya minimal harus memiliki lima Kabupaten/Kota, maka atas semangat dan aspirasi seluruh kalangan masyarakat di empat Kecamatan di Kabupaten Gorontalo masing-masing Kecamatan Suwawa, Kabila, Tapa dan Bonepantai dibentuklah Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Baru (KSPKB) yang berusaha, berjuang menjadikan empat kecamatan ini untuk menjadi suatu daerah Kabupaten. Tepat tanggal 27 Januari 2003 diresmikanlah Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten yang keempat di Provinsi Gorontalo sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah, diamanatkan bagi setiap Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dihadapan paripurna DPRD. Berpedoman kepada pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)



Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021. Aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ Bupati Bone Bolango Tahun 2018 disusun secara komprehensif, integratif dan informatif yang bertujuan agar informasi yang disampaikan dalam LKPJ dapat menjadi instrument pertanggungjawaban Kepala Daerah serta bahan evaluasi kedepan dalam memenuhi target RPJMD 2016-2021.

Laporan ini juga merupakan *progress report* tahun 2018 pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati Bone Bolango kepada rakyat melalui DPRD. Dalam laporan ini dijabarkan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan urusan pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2018.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bone Bolango Tahun 2018 adalah Untuk memberikan penjelasan kepada semua pihak atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam bidang administrasi Pemerintahan, penyelenggara pembangunan di daerah, dan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LKPJ adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.
3. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi Sumber daya Alam (SDA) berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah ini,
4. Memberikan gambaran kemajuan perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat, stabilitas, ketertiban dan keamanan daerah.

## 3. Landasan Penyusunan

Di samping itu, penyusunan LKPJ ini juga berpedoman pada peraturan perundangan sebagaimana berikut ini:



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

## B. Gambaran Umum Daerah

### 1. Kondisi Geografis

#### ❖ Letak Geografis

Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1984,58 Km<sup>2</sup> berada pada ketinggian 0 – 1500 meter dari permukaan laut, terletak antara 0,27' – 1.01' Lintang Utara dan antara 121.23' – 122.44' Bujur Timur.

*Gambar: 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bone Bolango*



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011



❖ **Batas Wilayah**

Batas Wilayah Kabupaten Bone Bolango yakni pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Kecamatan Kota Utara serta Kota Timur Kota Gorontalo. Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebelah timur dan utara umumnya merupakan kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone sebagai kawasan penyangga (buffer area) ekosistem lingkungan. Berdasarkan kondisi ini, lahir sebuah konsep inovatif untuk merencanakan wilayah tersebut sebagai kawasan penyangga( buffer area) dan secara bertahap membuka akses lintas utara selatan melalui berbagai program strategis antara lain pembukaan jalan Tapa – Atinggola, membangun jalan lingkar dalam rangka pengembangan berbagai wilayah kawasan yang berpotensi untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam antara lain sektor pertanian dan peternakan serta perkebunan. Disamping itu, terdapat beberapa wilayah yang berpotensi pengembangan kawasan kepariwisataan daerah.

*Tabel 1.1  
Gambaran Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango*

<b>BATAS WILAYAH</b>	<b>BERBATASAN</b>
Sebelah Utara	Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara dan Kab. Bolaang Mongondow Utara Prov. Sulut
Sebelah Timur	Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulut
Sebelah Selatan	Kec. Kota Selatan dan Kota Timur Kota Gorontalo
Sebelah Barat	Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo Kecamatan Kota Utara, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

*Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango*



## ❖ Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah 1.984,58 Km<sup>2</sup> yang tersebar pada 18 kecamatan. Dengan luas wilayah tersebut maka Kabupaten Bone Bolango memiliki proporsi wilayah kurang lebih 16,24% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.2** berikut ini.

*Tabel 1.2*  
*Luas Wilayah Kabupaten Bone Bolango Menurut Kecamatan*

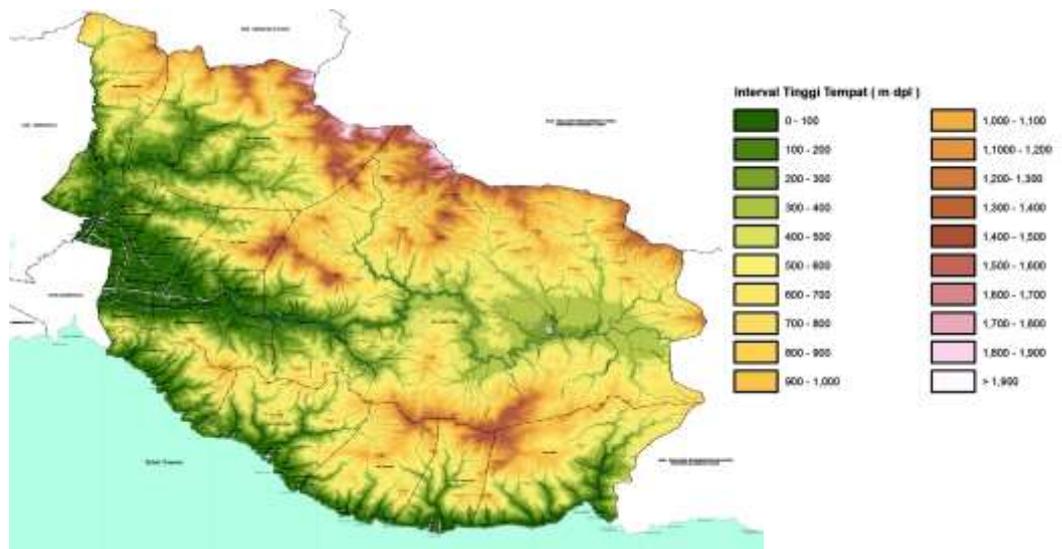
KECAMATAN	LUAS ( KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE
1. Tapa	64,41	3,25
2. Bulango Utara	176,09	8,87
3. Bulango Selatan	9,87	0,50
4. Bulango Timur	10,82	0,55
5. Bulango Ulu	78,41	3,95
6. Kabila	193,45	9,75
7. Botupingge	47,11	2,37
8. Tilongkabila	79,74	4,02
9. Suwawa	33,51	1,69
10. Suwawa Selatan	184,09	9,28
11. Suwawa Timur	127,80	6,44
12. Suwawa Tengah	64,70	3,26
13. Kabila Bone	143,51	7,23
14. Bonepantai	161,82	8,15
15. Bulawa	111,01	5,59
16. Bone Raya	64,12	3,23
17. Bone	72,71	3,66
18. Pinogu	361,40	18,21
<b>JUMLAH</b>	<b>1984,58</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango*

## ❖ Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan).

Gambar: 1.2 Peta Topografi Kabupaten Bone Bolango



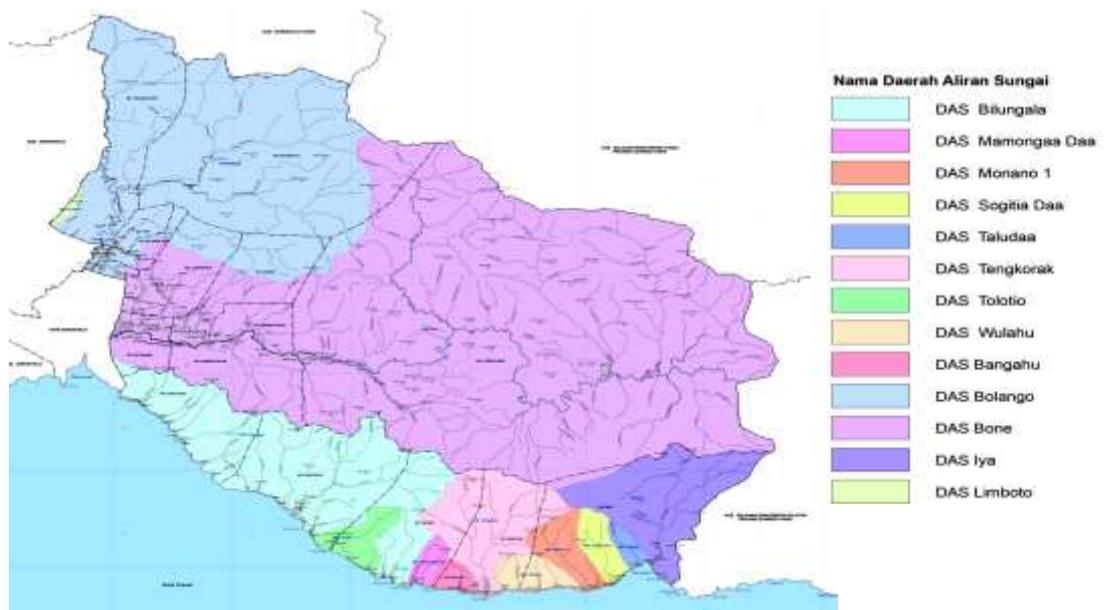
Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yakni :

- Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng di atas 40%. Persebaran lahan berada di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila dan Bulango Utara.
- Kondisi lahan dengan relief berbukit (bergelombang) dengan tekstur morfologi sedang. Persebaran lahan sebagian besar berada di setiap Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.
- Kondisi dengan relief permukaan rendah. Persebaran lahan berada di Kecamatan Tapa, Suwawa dan Kabila.

Dilihat dari ketinggian wilayah dari permukaan laut, umumnya Kabupaten Bone Bolango merupakan dataran tinggi dan pegunungan seperti pada Gambar3.Selain itu, wilayah Kabupaten Bone Bolango ini dilalui oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS).

Gambar : 1.3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bone Bolango



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

DAS terbesar yang melalui wilayah tersebut adalah DAS Bone dan Bulango, dimana Kecamatan yang dilalui adalah Kecamatan Suwawa, Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tapa. Luas DAS ini adalah  $\pm 265.000$  Ha dengan panjang sungai utama 100 Km yang bermuara ke Teluk Tomini. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih kebutuhan sehari – hari masyarakat, diperoleh melalui air tanah galian dengan kedalaman 5 – 10 meter.

#### ❖ **Pola Penggunaan Lahan**

Pola Penggunaan Tanah pada hakekatnya adalah merupakan gambaran didalam ruang yang merupakan gabungan hasil jenis usaha, tingkat teknologi, jumlah manusia dan keadaan fisik sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.3.

Gambar: 1.4 Peta Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Bone Bolango



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Tabel 1.3  
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018

No	Penggunaan Lahan	LUAS ( Ha )
		2018
1.	<b>Hutan</b>	
	1. Taman Nasional	134.156,83
	2. Hutan Lindung	15.718,25
	3. Hutan produksi tetap	836
	4. Hutan produksi terbatas	18.803,29
	5. Suaka Alam Pelestarian Alam	104.904,72
2.	<b>Hutan Basah</b>	
	1. Sawah yang diolah	2.189
	2. Sawah yang belum diolah	-
	3. Tambak	-
	4. Kolam dan Danau	72.00
	5. Rawa-rawa yang ditanami	4.00

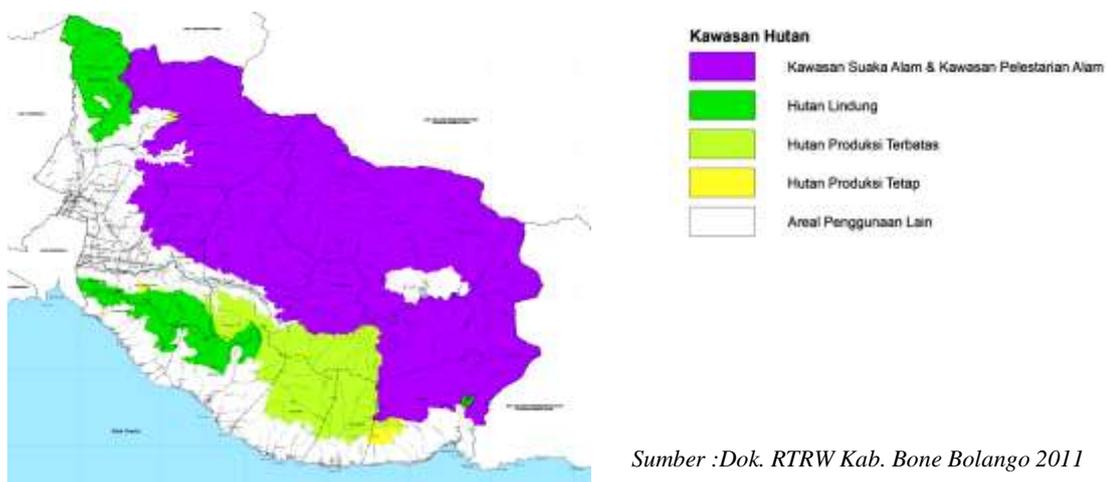
3.	<b>Lahan Kering</b>	
	1. Tegalan	7.169
	2. Ladang / huma	6.444
	3. Lahan kering sementara tidak diusahakan	6.444
	4. Perkebunan	15.758
	5. Penggembalaan/ padang rumput	2.936
4.	<b>Bangunan dan lain-lain</b>	
	1. Rumah Bangunan dan Halaman Sekitar	7.355
	2. Lain-lain	9.376
	<b>Total</b>	<b>332.653,54</b>

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Bone Bolango

#### ❖ Potensi Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem bumi.

Gambar: 1.5 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Bone Bolango



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011

Walaupun belum sampai ketinggian yang rusak parah, namun kerusakan hutan di daerah Bone Bolango cukup mengkhawatirkan dimana dapat membawa bencana alam bagi daerah lain.



Pada beberapa tahun terakhir ini, Kota Gorontalo mengalami banjir akibat kiriman air dari aliran sungai Bone maupun sungai Bolango, yang diakibatkan degradasi ekosistem hutan di daerah Bone Bolango. Salah satu dampak kerusakan hutan lainnya adalah jumlah satwa yang terancam punah. Kondisi hutan ini diperparah lagi dengan masih berlangsungnya pola perombakan/perambahan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan lain, batas-batas kawasan yang perlu direkonstruksi.

Luas kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango adalah seluas 140.535,27 Ha. Adapun potensi sumber daya hutan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

*Tabel 1.4  
Potensi Sumberdaya Hutan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018*

No	Jenis Hutan	Potensi (Ha)
		2018
1	Hutan Lindung	15.718,55
2	Hutan Produksi Terbatas	18.841,67
5	Hutan Taman Nasional	134.156,83

*Sumber Data : Bidang Tata Ruang Dinas PU*

#### ❖ *Potensi Pariwisata*

Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang telah diidentifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dilapangan, Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata umumnya wilayah pantai selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *outbond* (*Hiking, Tracking dan Climbing* serta *Arung Jeram / Susur Sungai*). Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang di sepanjang pesisir perairan pantai selatan (teluk tomini) memberikan



peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Pada umumnya obyek wisata Kabupaten Bone Bolango saat ini belum dikemas ke dalam paket wisata yang terkait dengan pariwisata nasional sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan PAD.

*Tabel 1.5  
Jumlah Sarana Wisata, Seni dan Budaya di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018*

TAHUN	Jumlah Obyek Wisata			
	Wisata Alam	Wisata Buatan	Wisata Bahari	Wisata Budaya Sejarah
2018	Pemandian Air Panas Lombongo	Bukit Cinta	Kawasan Pantai Botutonuo	Makam Nani Wartabone
	Air Terjun Taludaa	Danau Perintis	Taman Laut Olele	Makam Hubulo
	Air Terjun Molotabu	Wisata Meranti	Pantai Pinomontiga	Makam Raja Atinggola
	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Center Point		Desa Adat Pinogu
	River Tubir Longalo	Bukit Ulantha		

*\*Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bone Bolango*

### **Kawasan Strategis Wisata Alam**

Kawasan ini mempunyai pengaruh sangat penting dalam mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten yang aman dan nyaman dalam perspektif ekologis dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penentuan kawasan ini di Kabupaten Bone Bolango dikelompokkan dalam dua tipe yaitu :

- (1). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata bahari yaitu Pantai Olele
- (2). Kawasan strategis wisata alam yang berbasis wisata daratan yaitu :
  - Kawasan Air Panas Lombongo, di perbukitan Lombongo, Desa Lombongo, Kec. Suwawa Tengah
  - Kawasan Air Panas Libungo, Desa Libungo, Kec. Suwawa Selatan ;



- Air Terjun Ilohuuwa Desa Ilohuuwa, Kec. Bone ;
- Kawasan Danau Perintis, Kec. Suwawa ;
- Kawasan Taman Laut Olele ,Desa Olele,Kecamatan Kabila Bone) ;
- Kawasan Pantai Botutonuo, Desa Botutonuo, Kec. Kabila Bone) ;
- Kawasan Pantai Molotabu, Desa Molotabu, Kec. Kabila Bone) ;
- Kawasan Pantai Bulawa, Kec. Bulawa
- Kawasan Wisata Alam Meranti, Desa Langge, Kec. Tapa

Kawasan wisata telah banyak menjadi sumber pendapatan bagi suatu daerah misalnya Bali. Oleh karena kawasan wisata alam di Kabupaten Bone Bolango harus mendapat perhatian serius karena memiliki nilai potensi dikembangkan. Kawasan ini bisa menjadi sumber utama PDRB Hijau. Pengembangan wisata alam perlu dilakukan melalui suatu rencana dan strategi, sebagai berikut :

- Pengembangan kawasan disesuaikan dengan kapasitas ekologis;
- Pemberdayaan masyarakat lokal melalui *management of colaboration*;
- Pembangunan infrastruktur penunjang;
- Pengendalian dampak antropogenis;
- Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan usaha wisata;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk mengoptimalkan fungsi kawasan;
- Pembuatan payung hukum;

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dilapangan, Kabupaten Bone Bolango memiliki potensi pengembangan wisata umumnya wilayah Pantai Selatan berupa wisata pantai dan wisata bawah laut. Disamping itu juga sangat potensial untuk pengembangan wisata alam jenis *Out Bond (Hiking ,Tracking dan climbing* serta *arung jeram /susursungai*).Pengembangan obyek wisata seperti ini masih sangat kurang, sehingga peluang untuk pengembangannya masih cukup besar. Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai garis pantai yang panjang yang terpampang disepanjang pesisir perairan Pantai Selatan (TelukTomini) memberikan peluang tersendiri untuk pengembangan wisata pantai khususnya lagi untuk wisata bawah laut yang



terletak di Desa Olele, dengan panorama dan kekayaan hayati bawah laut yang sangat menjanjikan serta potensi pariwisata budaya sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun manca Negara.

## 2. Gambaran Umum Demografis

### ❖ Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 sebanyak 162.970 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang tersebar pada 18 Kecamatan.

### ❖ Persebaran Penduduk

Jumlah penduduk di setiap kecamatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 1.6*  
*Jumlah Penduduk Diperinci Menurut Kecamatan*  
*di Kab.Bone Bolango Tahun 2017*

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2017
1.	Tapa	7.511
2.	Bulango Utara	7.914
3.	Bulango Selatan	10.839
4.	Bulango Timur	5.736
5.	Bulango Ulu	4.077
6.	Kabila	23.045
7.	Botupingge	6.521
8.	Tilongkabila	18.515
9.	Suwawa	12.845
10.	Suwawa Selatan	5.393
11.	Suwawa Timur	5.470
12.	Suwawa Tengah	6.322
13.	Pinogu	2.097
14.	Kabila Bone	11.285
15.	Bonepantai	10.944
16.	Bulawa	5.377
17.	Bone Raya	6.935
18.	Bone	9.671
<b>Jumlah Total</b>		<b>160.497</b>

*Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Catatan SipilTahun 2017*

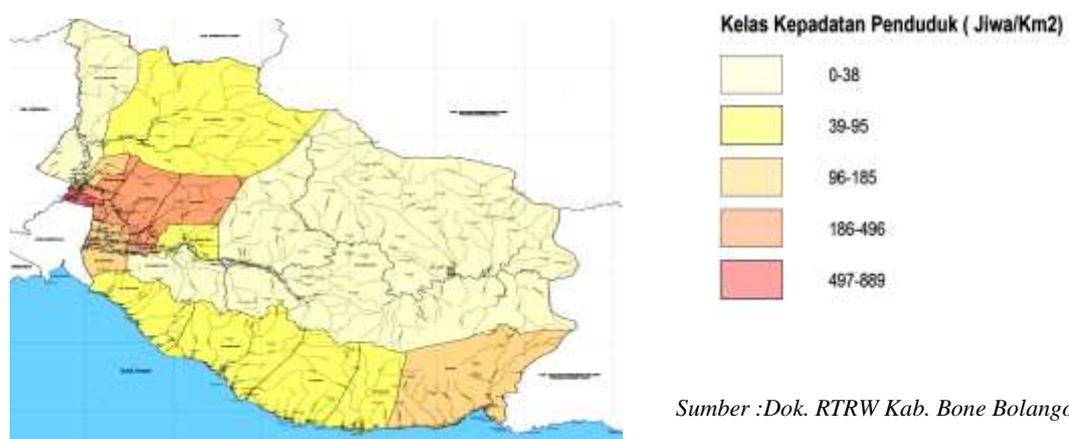
Sedangkan rata-rata Luas Wilayah dan penduduk perkecamatan dan per-Km<sup>2</sup> berdasarkan sebaran kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 1.7*  
*Rata-rata Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan*  
*di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017*

No.	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
		KM <sup>2</sup>	%	Jiwa	%	
1.	Tapa	64,41	3,25	7.511	4,68%	117
2.	Bulango Utara	176,09	8,87	7.914	4,93%	45
3.	Bulango Selatan	9,87	0,50	10.839	6,75%	1098
4.	Bulango Timur	10,82	0,55	5.736	3,57%	522
5.	Bulango Ulu	78,41	3,95	4.077	2,54%	51
6.	Kabila	193,45	9,75	23.045	14,36%	120
7.	Botupingge	47,11	2,37	6.521	4,06%	137
8.	Tilongkabila	79,74	4,02	18.515	11,54%	231
9.	Suwawa	33,51	1,69	12.845	8,00%	377
10.	Suwawa Selatan	184,09	9,28	5.393	3,36%	29
11.	Suwawa Timur	127,80	6,44	5.470	3,41%	42
12.	Suwawa Tengah	64,70	3,26	6.322	3,94%	98
13.	Pinogu	143,51	7,23	2.097	1,31%	6
14.	Kabila Bone	161,82	8,15	11.285	7,03%	67
15.	Bonepantai	111,01	5,59	10.944	6,82%	78
16.	Bulawa	64,12	3,23	5.377	3,35%	48
17.	Bone Raya	72,71	3,66	6.935	4,32%	107
18.	Bone	361,40	18,21	9.671	6,03%	133
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.984,58</b>	<b>100</b>	<b>160.497</b>	<b>100,00</b>	<b>81</b>

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017

*Gambar: 1.7 Peta Kepadatan Penduduk( jiwa/KM2 )*



Sumber :Dok. RTRW Kab. Bone Bolango 2011



### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

#### a. *Kondisi Sosial Masyarakat*

Kinerja makro ekonomi daerah Kabupaten Bone Bolango tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan regional. Berbagai langkah strategis yang dilakukan dalam rangka penyesuaian laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat difokuskan pada kebijakan alokasi dan distribusi fiskal daerah serta mendorong tumbuhnya investasi daerah disamping merekomendasikan strategi kebijakan ekonomi lainnya yang dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonomi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat, membangun basis-basis ekonomi daerah, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor sekunder dan tersier.

Secara agregat, perekonomian kabupaten Bone Bolango dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik walaupun diakui bahwa pertumbuhan tersebut dibawah tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo. Dibanding tahun 2017 yang memiliki pertumbuhan ekonomi diangka 7,1%, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango diprediksi berada pada angka 7,4 %. Untuk Angka pengangguran Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 adalah 4,17%.

#### b. **Kondisi Perekonomian Daerah**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.



Tabel 1.8  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014 – 2017 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015*	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	987 303,28	1 116 891,75	1 260 557,32	1 395 541,35
B Pertambangan dan Penggalian	55 814,34	58 998,63	59 292,19	60 215,97
C Industri Pengolahan	172 215,10	196 030,86	221 376,66	244 775,44
D Pengadaan Listrik dan Gas	756,47	649,21	815,43	984,78
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	757,38	871,30	1 054,58	1 226,99
F Konstruksi	311 144,98	368 301,21	413 702,78	472 940,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	331 632,74	386 874,82	447 029,73	514 601,58
H Transportasi dan Pergudangan	30 634,35	35 585,48	39 512,15	42 465,57
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27 912,45	32 869,06	37 962,31	43 051,50
J Informasi dan Komunikasi	50 539,30	56 345,64	64 333,62	71 558,91
K Jasa Keuangan dan Asuransi	54 569,97	64 034,94	78 705,50	90 680,59
L Real Estat	72 916,04	80 976,02	93 425,46	99 865,24
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	3 536,39	4 118,20	4 562,64	5 081,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	344 990,63	367 603,88	378 122,59	379 947,20
P Jasa Pendidikan	129 054,45	145 637,55	160 453,57	175 722,22
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135 632,86	156 981,44	178 040,91	195 135,30
R,S,T,U Jasa lainnya	58 924,33	65 141,81	70 480,55	74 104,87
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>2 768 335,08</b>	<b>3 137 838,68</b>	<b>3 509 327,97</b>	<b>3 867 899,50</b>

Sumber Data : BPS Kabupaten Bone Bolango

Struktur perekonomian Bone Bolango didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.



## BAB II

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

### A. Visi dan Misi

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta memperhatikan permasalahan, isu-isu strategis daerah dan tantangan yang dihadapi dimasa mendatang maka dirumuskan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango untuk periode 2016-2021 yang telah disampaikan oleh Hamim Pou dan Mohammad Kilat Wartabone sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Periode 2016-2021, yakni sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA BONE BOLANGO CEMERLANG”**

**CEMERLANG** dalam makna luas adalah suatu kondisi pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone Bolango yang *“Unggul dan Berdaya saing”* serta masyarakatnya berada pada tingkat peradaban tinggi. **CEMERLANG** dalam makna akronim diterjemahkan kedalam 3 (tiga) pilar utama, yakni:

#### **CE (Cerdas), MER (Modern), LANG (Gemilang)**

**Cerdas** : Adalah kondisi masyarakat yang menjalani kehidupan sebagai warga negara berlandaskan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani serta memiliki kecerdasan akal budi intelektual, akal budi emosional, dan akal budi spiritual. Kecerdasan tersebut merefleksikan sebuah kondisi masyarakat religius yang senantiasa memahami dan mengamalkan nilai-nilai moral, etika dan agama. Kecerdasan dimaksud juga menggambarkan suatu kondisi masyarakat yang sehat, masyarakat terdidik, serta masyarakat dinamis dengan kreatifitas, inovasi dan produktivitas tinggi.

**Modern** : Adalah kondisi entitas masyarakat Bone Bolango yang memiliki kemajuan peradaban manusia dengan bercirikan kemampuan adaptasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut terwujud juga dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik, pemerintahan yang responsive dan innovative (*Innovative Government*), serta

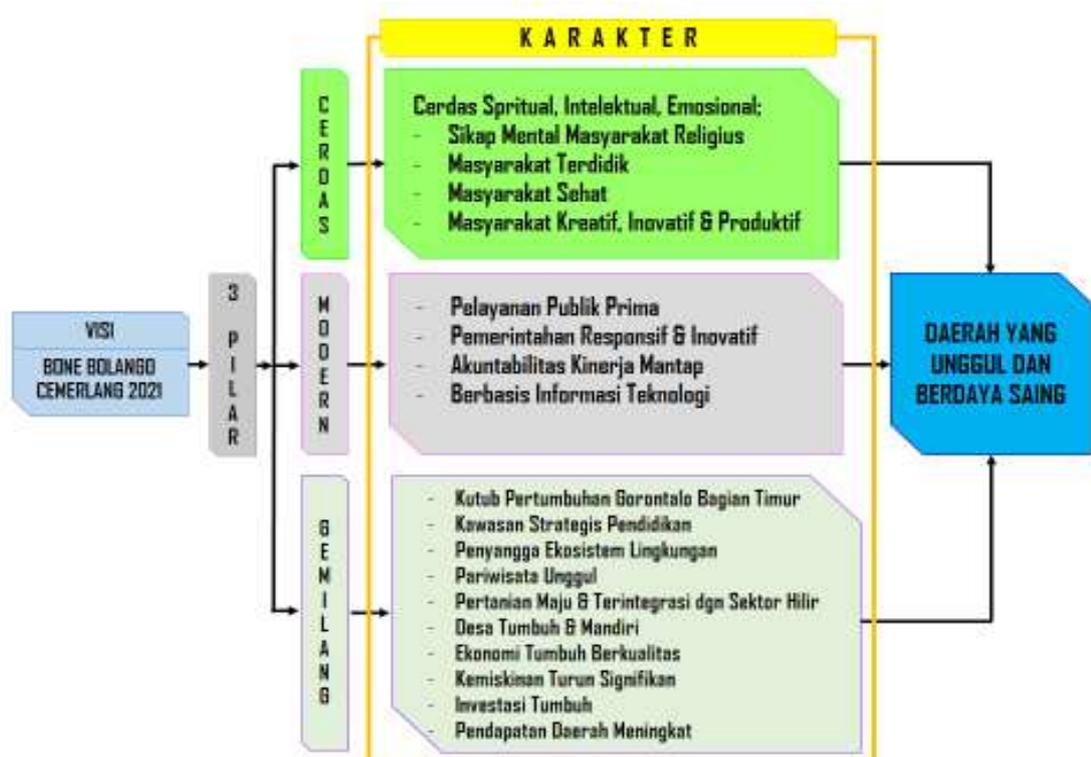




mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai akuntabilitas tinggi (*Accountability*) terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

**Gemilang** : Memiliki makna capaian kinerja pelayanan pemerintahan yang diindikasikan dengan suatu kondisi masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi dalam konteks kesejahteraan sosial, dan sejahtera dari sisi kebijakan sosial yang memberikan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan target besar yakni pengurangan rakyat miskin secara konsisten dan berkelanjutan. Dari dimensi wilayah mempunyai makna sebagai wilayah dengan keunggulan comparative dan keunggulan kompetitive. Kondisi Bone Bolango gemilang yang ingin diwujudkan dan menjadi komitmen besar seluruh stakeholders pembangunan antara lain cita-cita untuk mewujudkan Bone Bolango sebagai kutub pertumbuhan baru di bagian timur Gorontalo, kawasan strategis pendidikan, kawasan utama pariwisata, serta mempertahankan peran Bone Bolango sebagai kawasan penyangga ekosistem lingkungan (*Green City*). Cita-cita tersebut juga dalam konteks mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kemandirian desa, pertanian yang terintegrasi (*hulu hilir integrated*), peningkatan pertumbuhan investasi dan pendapatan daerah.

Gambar 2.1. Visi dan Karakter Utama Visi Daerah 2016-2021





## B. Misi

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai. Misi menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan. Perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango tersebut, akan dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021, yakni sebagai berikut:

### **Misi Kesatu: Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.**

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas melalui pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan pembangunan tersebut, diharapkan dapat tercipta sumberdaya manusia yang berkarakter dan mandiri serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, bangsa dan negara.

### **Misi Kedua: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah yang berbasis pelestarian lingkungan.**

Merupakan upaya keberlanjutan (percepatan) tahapan pembangunan daerah Bone Bolango dari periode sebelumnya (2010-2015) menuju periode akan datang (2016-2021) dengan memperkuat koneksitas dan sinergitas antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa sebagai pilar utama pertumbuhan wilayah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan branding utama sebagai kota hijau (*Green City*). Pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan utama bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan afirmatif melalui pembangunan desa khususnya desa-desa tertinggal diharapkan dapat semakin mempercepat pertumbuhan daerah dan kemajuan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

### **Misi Ketiga: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Merata dan Berkeadilan**

Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah harus terus tumbuh tetapi tetap berkualitas yang menjamin pemerataan dan



keadilan. Perekonomian daerah harus kompetitif yang tidak semata-mata dalam dimensi lokal tapi kompetitif dalam dimensi regional dan global. Perekonomian daerah harus semakin kreatif dan terintegrasi yang tidak semata-mata mengandalkan peran sektor primer khususnya pertanian tetapi semakin membuka peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

### **Misi Keempat: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Moderen dan Berbudaya**

Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good and Clean Governance* dengan menekankan pada kemampuan adaptif terhadap perubahan dengan tetap berpegang teguh pada modernitas yang bercirikan nilai-nilai budaya.

Keempat misi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam tiga dimensi pembangunan utama yakni:

#### **A. Dimensi Pembangunan Manusia**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.

#### **B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan**

Pengembangan sector unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi “*Prime Mover*” pembangunan dan menjadi penggerak utama



perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

### **C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah**

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi fokus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara bertahap untuk

mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.

Gambar 2.2.  
Dimensi Pembangunan dan Sasaran Utama Pembangunan  
Kabupaten Bone Bolango 2016-2021



## B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Jangka Menengah

### 1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab 1(satu) atau lebih sasaran pembangun.



Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka rumusan strategi berdasarkan misi yang telah diuraikan sebagai berikut:

*Tabel 2.1.  
Keterkaitan Misi, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021*

No.	Sasaran	Strategi	
<b>Misi 1: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera</b>			
<b>Tujuan 1.1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas</b>			
1.1.1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	1.1.1.1.	Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan berkarakter melalui Program Bone Bolango Cerdas
1.1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.1.2.1.	Peningkatan mutu layanan kesehatan secara terarah, merata dan dapat diakses masyarakat melalui Program Bone Bolango Sehat
		1.1.2.2.	Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi
<b>Tujuan 1.2. Meningkatkan peranan kepemudaan dan pengarusutamaan gender</b>			
1.2.1.	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga	1.2.1.1.	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
1.2.2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1.2.2.1.	Pengarusutamaan gender dan peningkatan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri
1.2.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1.	Mencegah dan menangani tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking)
<b>Tujuan 1.3 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin</b>			
1.3.1.	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin	1.3.1.1.	Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga
1.3.2	Meningkatnya kepemilikan aset masyarakat miskin	1.3.2.1.	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar rumah tangga miskin
1.3.3	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian masyarakat miskin	1.3.3.1.	Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada ekonomi produktif
<b>Misi 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup</b>			
<b>Tujuan 2.1.</b>			



No.	Sasaran	Strategi	
<b>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Dasar wilayah</b>			
2.1.1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah	2.1.1.1.	Percepatan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat
2.1.2.	Tersedianya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi serta pemukiman yang layak bagi masyarakat dan lingkungan pemukiman		
2.1.3.	Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan serta pengelolaan sumber daya air		
2.1.4.	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan	2.1.4.1.	Mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan serta kawasan strategis kabupaten serta pengendalian kawasan rawan bencana sesuai arahan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango
<b>Tujuan 2.2. Meningkatkan pembangunan Desa</b>			
2.2.1.	Terwujudnya kemandirian desa	2.2.1.1.	Percepatan pertumbuhan desa
<b>Misi 3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan</b>			
<b>Tujuan 3.1. Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan (leading Sectors)</b>			
3.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	3.1.1.1.	Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi 'Prime Mover' pembangunan daerah melalui pendekatan Pro-growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro-environment
3.1.2.	Terwujudnya perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan	3.1.2.1.	Pengembangan kawasan strategis ekonomi daerah yang menjadi simpul pertumbuhan wilayah, kawasan cepat tumbuh, serta percepatan penanganan wilayah tertinggal, terisolir dan terbelakang
<b>Tujuan 3.2. Menguatkan ketahanan pangan Daerah</b>			
3.2.1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian Terpadu	3.2.1.1.	Peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis kawasan,



No.	Sasaran	Strategi	
			pertanian terpadu, serta berbasis agribisnis
3.2.2.	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan	3.2.2.1.	Meningkatkan Ketersediaan, keanekaragaman dan berkembangnya konsumsi pangan lokal secara aman, layak dan terjangkau oleh masyarakat luas
<b>Tujuan 3.3.</b> <b>Meningkatkan peluang investasi</b>			
3.3.1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	3.3.1.1.	Peningkatan iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
<b>Misi 4. Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya</b>			
<b>Tujuan 4.1.</b> <b>Terwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik</b>			
4.1.1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	4.1.1.1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		4.1.1.2.	Meningkatkan kemampuan fiskal daerah dengan memperkuat upaya peningkatan PAD
		4.1.1.3.	Optimalkan upaya pemberantasan KKN dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		4.1.1.4.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan proses pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
		4.1.1.5.	Meningkatkan sistem pengendalian internal dan membangun kerjasama antar lembaga guna terciptanya sinergisitas dalam pemberantasan KKN
		4.1.1.6.	Meningkatkan koordinasi dengan DPRD Bone Bolango dalam penyusunan Prolegda secara terencana, terpadu, dan sistematis.
		4.1.1.7.	Meningkatkan pelaksanaan pelayanan



No.	Sasaran	Strategi	
			yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		4.1.1.8.	Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah secara bertahap
		4.1.1.9.	Implementasi penyediaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan publik dan penegakan regulasi
		4.1.1.10	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan responsif dan inovatif
		4.1.1.11.	Menciptakan keamanan dan ketertiban selama proses pelaksanaan Pilkada dan Pileg
4.1.2.	Meningkatnya Partisipasi dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik	4.1.2.1.	Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat
		4.1.2.2.	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah berkualitas dan akuntabel
		4.1.2.3.	Penetapan Standar Operating Prosedur pelayanan dan sistem manajemen mutu
		4.1.2.4.	Kepastian penerapan asas profesionalitas dan transparansi dalam pelaksanaan job bidding
4.1.3.	Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan	4.1.3.1.	Mewujudkan konsistensi perencanaan di dalam dokumen perencanaan, baik RKPD terhadap RPJMD maupun dokumen KUA/PPAS terhadap RKPD
		4.1.3.2.	Melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun antar daerah
<b>Tujuan 4.2.</b>			
<b><i>Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan</i></b>			
4.2.1.	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan	4.2.1.1.	Mengadakan berbagai riset yang mendalam terhadap berbagai permasalahan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan
4.2.2.	Terlaksananya pelayanan e government (Stepping Stone menuju Digital	4.2.2.1.	Perluasan informasi pelayanan publik untuk mengontrol performa pelayanan sesuai ISO: 9001



No.	Sasaran	Strategi	
	Government)	4.2.2.2.	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi dan informasi
		4.2.2.3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi inovasi pelayanan publik bagi SKPD pelaksana pelayanan

## 2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.2. dibawah ini

Tabel 2.2

*Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021*

No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
<b>Misi 1: Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera</b>				
<b>Tujuan 1.1.</b>				
<b>Meningkatkan pelayanan pendidikan dan Kesehatan berkualitas</b>				
1.1.1.	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	1.1.1.1	Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan berkarakter melalui Program Bone Bolango Cerdas	Penyediaan sarana prasarana pendidikan secara terarah, bertahap dan merata hingga wilayah terpencil Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				Pengembangan pendidikan non-formal bagi masyarakat Peningkatan kesejahteraan tenaga guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis IT Meningkatkan pelestarian seni budaya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pentas seni dan budaya
1.1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	1.1.2.1	Peningkatan mutu layanan kesehatan secara terarah, merata dan dapat diakses masyarakat melalui Program Bone Bolango Sehat	Pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar hingga keseluruhan wilayah terpencil Pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan rujukan dengan meningkatkan kualifikasi RSUD Toto menjadi tipe B dengan unggulan layanan spesialis tertentu serta kualifikasi RSUD Tombulilato menjadi Tipe C dengan unggulan layanan penyakit jiwa, paru dan narkoba (JPN) Peningkatan ketersediaan dan mutu tenaga kesehatan, termasuk tenaga spesialis secara merata dan memenuhi kebutuhan dan standar layanan minimum.
				Pemenuhan ketersediaan obat baik pada layanan dasar maupun rujukan Peningkatan jaminan sosial kesehatan masyarakat secara merata dan menyeluruh



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				(Universal Health Coverage) Peningkatan layanan kesehatan ibu, anak dan balita Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat Pengembangan kemitraan layanan kesehatan
		1.1.2.2	Meningkatkan kesehatan keluarga dan reproduksi	Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
<b>Tujuan 1.2.</b>				
<b><i>Meningkatkan peranan kepemudaan dan pengarusutamaan gender</i></b>				
1.2.1.	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga	1.2.1.1	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Pembinaan organisasi kepemudaan Pembinaan prestasi olahraga Pembinaan wirausaha pemuda
1.2.2.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	1.2.2.1	Pengarusutamaan gender dan peningkatan keluarga sehat, sejahtera dan mandiri	Peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan
1.2.3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1.2.3.1	Mencegah dan menangani tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking)	Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya Pengembangan kabupaten Bone Bolango sebagai kota layak anak
<b>Tujuan 1.3</b>				
<b><i>Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin</i></b>				
1.3.1.	Terbukanya akses layanan perlindungan sosial masyarakat miskin	1.3.1.1.	Pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga	Pemberian perlindungan sosial masyarakat melalui jaminan sosial kepada masyarakat miskin, anak yatim, janda, penyandang cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
1.3.2	Meningkatnya kepemilikan aset	1.3.2.1.	Meningkatkan ketersediaan sarana	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
	masyarakat miskin		prasarana dasar rumah tangga miskin	keluarga yang menjamin kelangsungan hidup keluarga
1.3.3	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian masyarakat miskin	1.3.3.1.	Peningkatan akses masyarakat kurang mampu kepada ekonomi produktif	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana usaha, bantuan/fasilitasi modal usaha, bantuan manajemen dan pemasaran, serta pendidikan dan pelatihan
<b>Misi 2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan desa sebagai penopang pertumbuhan wilayah berbasis lingkungan hidup</b>				
<b>Tujuan 2.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Dasar wilayah</b>				
2.1.1.	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang konektivitas dan aksesibilitas wilayah	2.1.1.1	Percepatan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat	<p>Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>Penyediaan sarana penunjang sistim transportasi darat khususnya prasarana terminal sesuai arahan RTRW</p>
2.1.2.	Tersedianya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi serta pemukiman yang layak bagi masyarakat dan lingkungan pemukiman			<p>Pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi secara terarah, terpadu dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak serta sarana prasarana lingkungan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan melalui antara lain; (1) pengembangan kawasan perumahan terpadu bagi masyarakat dengan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, Private Sector dan</p>



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				Masyarakat; (2) peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah; serta (3) skema pengembangan kawasan perumahan lainnya.
2.1.3.	Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan serta pengelolaan sumber daya air			Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi
2.1.4.	Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan	2.1.4.1	Mengembangkan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan serta kawasan strategis kabupaten berwawasan lingkungan serta pengendalian kawasan rawan bencana sesuai arahan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango	<p>Penataan pusat ibu kota pemerintahan, pusat kegiatan lokal dan kawasan perkotaan lainnya</p> <p>Peningkatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air</p> <p>Penyediaan arahan rencana ruang dan pengendalian ruang penguatan kelembagaan BKPRD</p> <p>Penyediaan ruang terbuka hijau buatan dan pengendalian kelestarian ruang terbuka hijau alami</p> <p>Penanganan kawasan rawan bencana melalui upaya mitigasi bencana</p> <p>Penguatan kelembagaan Pokja Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>Penataan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup</p> <p>Pengelolaan, pemanfaatan hutan secara ekonomi, lestari dan berbasis masyarakat serta peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan dari penjarahan, penebangan liar, kebakaran dan peredaran kayu illegal</p>
<b>Tujuan 2.2.</b>				



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Meningkatkan pembangunan Desa</b>			
2.2.1.	Terwujudnya kemandirian desa	2.2.1.1 .	Percepatan pertumbuhan desa
			Percepatan pembangunan infrastruktur desa
			Pengembangan usaha ekonomi desa dan pengembangan produk unggulan desa
			Pembinaan masyarakat desa dan peningkatan peran aktif masyarakat
			Peningkatan kapasitas dan peran aparatur pemerintahan desa
<b>Misi 3. Mewujudkan perekonomian Daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan</b>			
<b>Tujuan 3.1. Meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan (leading Sectors)</b>			
3.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	3.1.1.1 .	Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi 'Prime Mover' pembangunan daerah melalui pendekatan Pro-growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro-environment
			Pengembangan jasa pariwisata utamanya wisata alam dan wisata budaya sebagai keunggulan lokal melalui pengembangan objek wisata Taman laut Olele, Kawasan Wisata Pantai Botutonuo, Wisata alam Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Objek Wisata Lombongo, Air Terjun Taludaa, Riverside Bone, Obyek Wisata Meranti, Wisata Budaya dan Sejarah serta Pengembangan Desa Wisata
			Peningkatan produksi dan produktifitas usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan kelautan berbasis kawasan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pembinaan dan penyuluhan, penguatan manajemen usaha



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				<p>dan pemasaran produksi, serta penguatan kelembagaan usaha</p> <p>Pengembangan komoditas potensial unggulan yaitu budidaya perikanan antara lain budidaya udang vaname dan budidaya perikanan lainnya; pengembangan peternakan antara lain sapi limousine dan komoditas peternakan lainnya serta pengembangan komoditas pertanian, antara lain pertanian organic dan komoditas pertanian dan perkebunan lainnya.</p> <p>Penataan dan pengembangan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan khususnya PETI, serta pengembangan iklim kondusif bagi tumbuhnya partisipasi dunia usaha pada usaha pertambangan</p>
				<p>Pengembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya lokal utamanya industri kopi pinogu, aren, pertanian organik, kerajinan kerawang dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, melalui pengembangan sentra dan cluster industri dengan memperkuat pembinaan usaha dan manajemen, pengembangan pemasaran dan kualitas produksi, bantuan permodalan dan sarana prasarana usaha, serta penciptaan iklim yang</p>



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				<p>kondusif bagi berkembangnya partisipasi dunia usaha</p> <p>Pengembangan sarana prasarana perdagangan yang mendukung pertumbuhan wilayah dengan mengembangkan pasar harian pada kawasan perdagangan</p> <p>Pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pembinaan usaha dan manajemen serta bantuan permodalan.</p> <p>Mengembangkan kemitraan serta menciptakan iklim kondusif yang dapat mendorong tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha atau melalui pendekatan Public Private Partnership dalam pengembangan usaha unggulan daerah</p>
3.1.2.	Terwujudnya perekonomian daerah yang merata dan berkeadilan	3.1.2.1	Pengembangan kawasan strategis ekonomi daerah yang menjadi simpul pertumbuhan wilayah, kawasan cepat tumbuh, serta percepatan penanganan wilayah tertinggal, terisolir dan terbelakang	<p>Pengembangan kawasan ekonomi khusus dan cepat tumbuh yang berbasis keunggulan sumber daya lokal dan daya saing pemasaran.</p> <p>Pengembangan sentra-sentra atau cluster usaha ekonomi yang menjadi unggulan daerah utamanya Kopi Pinogu, Pertanian Organik, Aren dan Usaha Pertanian Terpadu (Hulu Hilir Integrated)</p> <p>Pengembangan kawasan ekonomi pedesaan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperkuat produk unggulan masing-masing</p>



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				desa andalan
				Pengembangan kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah
<b>Tujuan 3.2.</b>				
<b><i>Menguatkan ketahanan pangan Daerah</i></b>				
3.2.1.	Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian Terpadu	3.2.1.1	Peningkatan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis kawasan, pertanian terpadu, serta berbasis agribisnis	Peningkatan produksi pangan strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta divesifikasi pangan Pendayagunaan lahan tidak produktif serta lahan kritis Pengembangan desa mandiri pangan secara terarah dan berkelanjutan
3.2.2.	Meningkatnya ketersediaan produksi, distribusi dan konsumsi pangan	3.2.2.1	Meningkatkan Ketersediaan, keanekaragaman dan berkembangnya konsumsi pangan lokal secara aman, layak dan terjangkau oleh masyarakat luas	Peningkatan cadangan pangan daerah dan jaminan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
<b>Tujuan 3.3.</b>				
<b><i>Meningkatkan peluang investasi</i></b>				
3.3.1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	3.3.1.1	Meningkatkan iklim Investasi yang kondusif yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Pengembangan kemudahan dan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur perizinan, serta pengembangan sistem insentif dan disinsentif Pengembangan kawasan khusus yang diarahkan sebagai wilayah prioritas investasi Pengembangan promosi potensi unggulan daerah melalui berbagai forum promosi investasi serta media informasi publik Pengembangan kerjasama pembangunan baik kerjasama antar daerah, antar



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
				level pemerintahan, kerjasama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan penelitian serta stakeholder lainnya
<b>Misi 4. Mewujudkan tata pemerintahan moderen yang berbudaya</b>				
<b>Tujuan 4.1.</b>				
<b>Terwujudnya Kualitas Layanan dan Partisipasi Publik</b>				
4.1.1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	4.1.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang didukung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku menuju opini WTP
		4.1.1.2	Menngkatkan kemampuan fiskal daerah dengan mempekuat upaya peningkatan PAD	Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi potensi pendapatan daerah
		4.1.1.3	Optimalkan upaya pemberantasan KKN dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan tuntutan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas dan ketepatan penyampaian LKIP guna meraih predikat B (Baik, perlu sedikit perbaikan)
		4.1.1.4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui percepatan proses pelayanan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas materi dan ketepatan penyampaian LPPD



No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.1.5 Meningkatkan sistem pengendalian internal dan membangun kerjasama antar lembaga guna terciptanya sinergisitas dalam pemberantasan KKN	Implementasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Penegakan sistem reward dan punishment sesuai aturan yang berlaku
		4.1.1.6 Meningkatkan koordinasi dengan DPRD Bone Bolango dalam penyusunan Prolegda secara terencana, terpadu, dan sistematis.	Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala untuk jangka panjang, menengah atau pendek
		4.1.1.7 Meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang dapat mempermudah urusan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Melaksanakan adminitrasi kependudukan yang berkualitas
		4.1.1.8 Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana pemerintah secara bertahap	Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran berdasarkan kriteria prioritas
		4.1.1.9 Implementasi penyediaan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengawasan publik dan penegakan regulasi	Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik melalui peningkatan kapasitas bandwith terpasang yang didukung perluasan jaringannya
		4.1.1.10 Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan responsif dan inovatif	Penetapan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan
		4.1.1.11 Menciptakan keamanan dan ketertiban selama	Meningkatnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada dan Pileg



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
			proses pelaksanaan Pilkada dan Pileg	
4.1.2.	Meningkatnya Partisipasi dan Tranparansi dalam Pelayanan Publik	4.1.2.1	Meningkatkan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat	Meningkatkan percepatan proses melalui pelayanan berbasis IT
		4.1.2.2	Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah berkualitas dan akuntabel	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, akomodatif, berkelanjutan dan berkualitas
		4.1.2.3	Penetapan Standar Operating Prosedur pelayanan dan sistem manajemen mutu	Penyusunan regulasi untuk penerapan manajemen kendali mutu SOP dan SPM di bidang pelayanan
		4.1.2.4	Kepastian penerapan asas profesionalitas dan transparansi dalam pelaksanaan job bidding	Penerapan sistem merit (kinerja profesional) termasuk sistem reward dan punishment dalam pengisian jabatan serta Penetapan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan ASN
4.1.3.	Terkoordinasinya tata kerja kelembagaan antar instansi pemerintahan dan atau pemangku Kepentingan	4.1.3.1	Mewujudkan konsistensi perencanaan di dalam dokumen perencanaan, baik RKPD terhadap RPJMD maupun dokumen KUA/PPAS terhadap RKPD	Membangun sistem penetapan kinerja pelayanan SKPD sebagai perwujudan komitmen peningkatan pelayanan publik
		4.1.3.2	Melakukan kemitraan pembangunan dengan dunia usaha, perguruan tinggi maupun antar daerah	Peningkatan intensitas dan efektifitas kerjasama lintas wilayah, dunia usaha dan perguruan tinggi
<b>Tujuan 4.2.</b>				
<b><i>Terciptanya pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan</i></b>				
4.2.1.	Terselenggaranya manajemen perubahan dalam pemerintahan	4.2.1.1	Mengadakan berbagai riset yang mendalam terhadap berbagai permasalahan daerah sebagai dasar pengambilan	Pelaksanaan riset secara komprehensif dan sistematis yang mengacu pada akar permasalahan daerah, sehingga diperlukan sebuah koordinasi yang nyata dan sistematis dari berbagai



No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
			kebijakan	pihak untuk menjalankannya
4.2.2.	Terlaksananya pelayanan government (Stepping Stone menuju Digital Government)	4.2.2.1	Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam penguasaan teknologi dan informasi	Membuat regulasi untuk meningkatkan upaya mengenalkan teknologi informasi dalam aktivitas pelaksanaan tugas keseharian ASN terutama surat menyurat sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas
		4.2.2.2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui implementasi inovasi pelayanan publik bagi SKPD pelaksana pelayanan	Menerapkan kebijakan “One Agency, One Innovation”, yaitu setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan “Quick Wins” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah

### C. Prioritas Daerah Tahun 2016 - 2021

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran

RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 6.1. dibawah ini Berdasarkan hasil analisa terhadap isu – isu strategis dan janji Bupati dan Wakil



Bupati Bone Bolango selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah maka ditetapkan 6 (Enam) prioritas pembangunan Kabupaten Bone Bolango 2016-2021, yakni :

### **1. Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Pengentasan Desa Tertinggal**

Prioritas pengurangan rakyat miskin difokuskan pada 5 (lima) bentuk intervensi. Intervensi *Pertama* diarahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan social dengan sasaran pemenuhan hak dasar utama seperti pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Intervensi *kedua*, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis perdesaan, perkotaan, serta wilayah tertinggal. Disamping itu pemberdayaan masyarakat berdasarkan sector, dengan cara mengembangkan skema program sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil masyarakat. Intervensi *ketiga*, diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil seperti pembiayaan dalam bentuk bantuan permodalan, akses modal serta akses pasar produk; dan pendampingan serta peningkatan keterampilan manajemen usaha. Intervensi *keempat* yakni penyediaan sarana prasarana dasar rumah tangga berupa peningkatan akses pada rumah layak, penyediaan akses sanitasi dan air bersih, akses listrik dan prasarana dasar lainnya. Intervensi *kelima* yakni melalui kebijakan affirmative dengan mengembangkan program khusus pada wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan dan ketertinggalan. Sedangkan pengentasan desa tertinggal diarahkan melalui 4 (empat) fokus kebijakan; *pertama* yakni penguatan kelembagaan dan kapasitas pembangunan desa, *kedua* yakni percepatan pembangunan infrastruktur desa, *ketiga*; pengembangan ekonomi desa dengan memperkuat unggulan desa, *keempat* yakni pengembangan partisipasi dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha.

### **2. Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa depan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab



dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan etika.

### **3. Prioritas Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bone Bolango secara adil dan merata melalui penyediaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (*Universal Health Coverage*), serta peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh masyarakat, peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan kualitas layanan KB, pemberantasan penyakit menular dan penanganan penyakit tertentu dengan prevalensi tinggi, penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan dilakukan juga melalui pemenuhan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya tenaga kesehatan yang didukung dengan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan termasuk regulasinya.

### **4. Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah**

Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan pada tingkat aman serta tersedianya jaminan pangan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dengan memperhatikan stabilitas, keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango yang diarahkan melalui (1) peningkatan produksi dalam daerah khususnya beras secara berkelanjutan, peningkatan keanekaragaman dan ketersediaan produksi pangan ternak, ikan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta olahannya, (2) pengembangan kelembagaan pangan yang menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan distribusi serta konsumsi pangan yang lebih beragam (3) pengembangan usaha bisnis pangan yang kompetitif yang menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat (4) Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan melalui peningkatan daya beli khususnya bagi masyarakat tertentu yang rawan pangan (5) Peningkatan infrastruktur dan kelembagaan ekonomi perdesaan (6) mendorong, dan



mengembangkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan keanekaragaman pangan (7) Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan; meningkatkan kesadaran produsen terhadap keamanan pangan; meningkatkan kesadaran konsumen terhadap keamanan pangan.

#### **5. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan**

Tersedianya sarana prasarana wilayah yang terintegrasi dan didukung oleh penataan ruang daerah yang terarah dan konsisten. Pengembangan sarana prasarana wilayah khususnya infrastruktur transportasi, energi listrik, telekomunikasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, sumber daya air, perumahan pemukiman, serta sarana-prasarana ekonomi diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan percepatan pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan mobilitas manusia, barang maupun jasa secara lokal maupun regional, peningkatan daya saing dan ketahanan ekonomi yang penyelenggaraannya dilakukan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumber daya secara berkelanjutan. Pembangunan transportasi diprioritaskan pada pengembangan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukungnya, dan pengembangan sarana prasarana perhubungan baik pembangunan terminal, moda transportasi maupun rekayasa jalan dan pengaturan perilaku lalu lintas melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah serta terbentuknya struktur dan pola ruang yang terarah, efektif, efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur jalan diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan infrastruktur jalan yang eksisting, pengembangan aksesibilitas pada wilayah terpencil dan terisolasi khususnya wilayah Pinogu dan Bulango Ulu dan beberapa titik diwilayah Bone Pesisir. Pembangunan infrastruktur jalan diprioritaskan pula pada pembukaan akses lintas selatan Suwawa – Kabila Bone serta pembukaan akses Suwawa Selatan – Tulabolo BaratSuwawa Timur. Disamping itu, dukungan infrastruktur jalan pada kawasan pariwisata dan kawasan perdagangan serta kawasan strategis lainnya akan terus diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.

#### **6. Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN**

Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan secara terarah dan komprehensif sejak tahapan perencanaan dan rekrutmen aparatur, pengembangan karir, peningkatan kompetensi, profesionalisme, disiplin, serta integritas etika dan moral penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas layanan



publik. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dilakukan melalui pembinaan aparatur yang terarah dan berkesinambungan serta pendidikan dan pelatihan aparatur baik diklat fungsional, diklat teknis, diklat kepemimpinan maupun pendidikan akademik pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Pengembangan aparatur diarahkan pula melalui upaya peningkatan kesejahteraan aparatur, pemberian penghargaan, penguatan kinerja KORPRI, serta perlindungan hukum dan hak azasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Peningkatan pelayanan publik yang prima diarahkan untuk meningkatkan kepuasan layanan dan jaminan akses layanan masyarakat yang cepat, mudah dengan biaya yang terjangkau. Peningkatan layanan publik diarahkan pula untuk peningkatan daya tarik investasi khususnya bagi dunia usaha dan masyarakat, serta mendorong motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan pelayanan publik prima dikembangkan melalui penyediaan system layanan yang handal, termasuk kerangka regulasi terstandarisasi yang menjamin kemudahan dan kepastian layanan serta efektifitas dan efisiensi setiap jenis layanan, peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknis, peningkatan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur, serta penyediaan sarana prasarana pelayanan publik handal dan berkualitas. Keenam prioritas pembangunan tersebut diimplementasikan melalui tiga dimensi pembangunan utama yakni:

#### **A. Dimensi Pembangunan Manusia**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pembentukan karakter masyarakat cerdas yang religious, bermoral, berbudaya, unggul, produktif, innovative dan berdaya saing menjadi bagian penting yang harus di capai oleh setiap upaya pembangunan daerah. Oleh karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi prioritas, tidak hanya dilingkungan birokrasi pemerintahan tetapi juga dilingkungan masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dikembangkan seiring dengan peningkatan kinerja dan sikap mental aparatur. Membangun aparatur yang bersih, berwibawa, disiplin, berdedikasi, loyal, professional, kreatif, proaktif, responsive, innovative dan memiliki pengetahuan dan semangat juang yang tinggi masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam 2016-2021. Mewujudkan pemerintahan yang amanah dan masyarakat madani akan tetap menjadi penyemangat utama dalam pencapaian Bone Bolango Cemerlang 2021.



## B. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan

Pengembangan sektor unggulan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pembangunan 2016-2021. Pembangunan daerah keseluruhan membutuhkan lokomotif utama yang dapat menjadi *“Prime Mover”* pembangunan dan menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Sumberdaya daerah yang tersedia dan berpotensi besar sebagai basis ekonomi harus memberikan daya dorong dan daya ungkit bagi akselerasi pembangunan daerah. Pembangunan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam dikembangkan dengan focus utama pada pengembangan sector unggulan yang berbasis sumber daya alam, keunggulan lokasi, keunggulan sumber daya manusia serta arahan kebijakan spasial pada tingkat regional. Beberapa focus utama yang menjadi unggulan daerah kedepan yakni sector pariwisata, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasapemerintahan, jasa pergudangan, sector pertanian tanaman pangan khususnya pertanian organik, usaha perkebunan, pengembangan peternakan dan usaha perikanan, sector sumberdaya air, serta industry pengolahan berbasis sumberdaya local antara lain Kopi Organik Pinogu dan Industri Aren, industry pengolahan hasil peternakan dan hasil perikanan. Sektor pertambangan dan energy menjadi sector penting yang diharapkan dapat menjadi penggerak dan basis pembangunan jangka panjang yang pengelolaannya akan dilakukan secara lebih hati-hati dengan mempertimbangkan terjaganya ekosistem lingkungan.

## C. Dimensi Pemerataan dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan tersebar merata keseluruh wilayah. Pengurangan disparitas pembangunan antar wilayah menjadi focus prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode 2016-2021 secara terarah, bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur dasar wilayah menjadi penopang utama percepatan pembangunan daerah. Untuk mempercepat pemerataan dan memperkuat pembangunan hingga pada unit wilayah terkecil maka pembangunan desa menjadi agenda utama pembangunan dalam jangka menengah 2016-2021. Pembangunan wilayah-wilayah terisolir, terpencil, terkebelakang khususnya di wilayah Pinogu, sebagian Suwawa Timur dan Suwawa Selatan, Bulango Ulu, Bulango Utara dan sebagian wilayah di Bone Pesisir, serta penanganan daerah rawan bencana akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pembukaan akses lintas selatan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Pemerintahan Suwawa dengan Wilayah Bone Pesisir akan menjadi program prioritas penguatan konektivitas wilayah disamping mendorong pembukaan akses lintas utara Tapa – Atinggola. Pengembangan kawasan-kawasan strategis serta simpul-simpul ekonomi akan didisain dan diimplementasikan secara



bertahap untuk mendorong percepatan pertumbuhan wilayah dan mendayagunakan sumberdaya alam lokal.

#### **D. Tema dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018**

##### **a. Tema Pembangunan**

Memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 sebagaimana digambarkan diatas, serta mencermati kebijakan strategis nasional dan regional serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, maka Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :

**“Memantapkan Pembangunan Desa dan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pengurangan Rakyat Miskin”.**

Tema pembangunan tahun 2018 merupakan kesinambungan rencana pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Seluruh stakeholders pembangunan dalam proses dan mekanisme perencanaan pembangunan tahun 2017 menyepakati bersama untuk perlu terus memantapkan upaya pengurangan rakyat miskin secara berkesinambungan. Pencapaian upaya tersebut dilaksanakan dengan menempatkan pembangunan desa sebagai basis pembangunan yang didukung oleh ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur secara terus menerus dan terarah mendukung percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka menengah 2016-2021

##### **b. Sasaran Prioritas Utama Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018**

Rumusan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2018, yang didasarkan pada kendala dan permasalahan daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diuraikan dibawah ini:

<b>Prioritas Penurunan Angka Kemiskinan</b>	Sasaran	: Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pengurangan angka kemiskinan.
	Indikator	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Penurunan angka kemiskinan dari 18% menjadi &lt;15%.</li><li>- Indeks gini ratio (ketimpangan) ditekan 0,38</li><li>- Peningkatan nilai tukar petani 101 menjadi &gt; 104,6</li></ul>



<b>Prioritas Pengentasan Desa Tertinggal</b>	Sasaran	: Pengurangan desa tertinggal-sangat tertinggal, meningkatnya desa maju (mandiri) dan bertambahnya jumlah Bumdes yang terbentuk
	Indikator	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengurangan desa tertinggal dan sangat tertinggal dari 105 desa menjadi 65 desa.</li><li>- Peningkatan desa maju menjadi 13 desa</li><li>- Implementasi APBD Desa untuk semua desa</li><li>- Peningkatan infrastruktur dasar desa</li><li>- Terbentuknya jumlah Bumdes sebanyak 128 Bumdes.</li><li>- Prasarana Pemerintahan Desa berkualitas baik</li><li>- Bertambahnya lembaga ekonomi desa dan komoditas unggulan desa</li></ul>
<b>Prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan (Kedaulatan) Pangan Daerah</b>	Sasaran	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Peningkatan produksi pangan strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta diversifikasi pangan</li></ul>
	Indikator	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Pertumbuhan Ekonomi menjadi &gt;7,1%</li><li>- Tingkat Pengangguran Terbuka &lt;5,12%</li><li>- Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 110.000 kunjungan</li><li>- Meningkatnya Jumlah Populasi Ternak 42.075 ekor</li><li>- Peningkatan Produksi Perikanan 5% dari 14.485 Ton</li><li>- Meningkatnya koperasi Sehat 42,86%</li><li>- Pertumbuhan UMKM 1% dari 19.210 UKM</li><li>- Peningkatan Produksi Padi &gt;28.000 Ton</li><li>- Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN &gt; 50%</li></ul>



**Prioritas Peningkatan  
Kualitas Pelayanan dan  
Aksesibilitas Pendidikan**

Sasaran : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat melalui Peningkatkan kualitas layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

- Indikator
- Menurunnya Angka Putus Sekolah jenjang SD/MI menjadi <0,10% sedangkan untuk jenjang SMP/MTS sebesar <0,14%
  - Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di targetkan sebesar >88,57% sedangkan untuk tingkat SMP/MTs sebesar >59,20%
  - Angka Rata-Rata Lama Sekolah 7,56%
  - Peningkatan Angka Melek Huruf 99,01%
  - Peningkatan pertumbuhan pengunjung perpustakaan naik sebesar >100%

**Prioritas Peningkatan  
Cakupan dan Kualitas  
Layanan Kesehatan**

Sasaran : Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan

- Indikator: :
- Angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar 71,05
  - Angka Kematian Bayi dengan target 12,8% Per 1000 kelahiran 12,8%
  - Angka Prevalenci Gizi Buruk sebesar 0,37%
  - Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 kelahiran dengan target 278,6
  - Peningkatan Cakupan Masyarakat Miskin Terlayani JKN 98,8%
  - Peningkatan cakupan BOR, LOS, TOI, BTO, NDR dan GDR melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan tingkat rujukan dengan prioritas utama pada Rumah Sakit Toto Kabila.dan Rumah Sakit Tombulilato sebanyak 6500 pasien
  - Peningkatan cakupan pasien yang tertangani oleh dokter spesialis 16.000 Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato sebanyak 16.000 pasien.



<b>Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan</b>	Sasaran :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 100%</li> </ul> <p>Meningkatnya aksesibilitas wilayah dan meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian, serta pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis daerah.</p>
	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pertumbuhan kualitas jalan mantap/baik &gt;70% atau naik 15 km dan pertumbuhan jalan baru sebesar 11 KM</li> <li>- Peningkatan akses layanan air bersih sebesar &gt; 70% bagi 3500 RT</li> <li>- Peningkatan akses sanitasi sebesar &gt; 60% bagi 3000 RT</li> <li>- Peningkatan ratio elektrifikasi sebesar &gt; &gt;98% bagi 2500 RT</li> </ul>
<b>Prioritas Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan ASN</b>	Sasaran	<p>Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) serta penataan aparatur daerah.</p>
	Indikator:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Opini BPK terhadap LKPD dengan predikat WTP</li> <li>- Tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan Laporan LHE AKIP: mencapai predikat B.</li> <li>- Nilai LPPD Tinggi (Peringkat &gt;50 Besar)</li> <li>- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat &lt;72%</li> </ul>
	Indikator :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan predikat WTP</li> <li>2. Persentase penurunan jumlah kasus temuan yakni 40% dari tahun sebelumnya</li> <li>3. Tingkat kualitas penyelenggaraan pemerintahan (AKIP) mencapai predikat B.</li> <li>4. Penataan pengembangan E-Government di lingkungan pemerintahan daerah</li> </ol>



5. Persentase peningkatan ASN yang memenuhi syarat kompetensi jabatan baik diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional mencapai >70%.
6. Peningkatan disiplin, pembinaan karir dan mutasi aparatur sipil negara.
7. Persentase SKPD yang memenuhi kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pengelolaan keuangan mencapai 100 %.
8. Peningkatan kapasitas perencanaan, koordinasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
9. Peningkatan ketertiban, keamanan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. 100% SKPD Kabupaten telah memiliki bangunan kantor.
11. 100% Pemerintahan Kecamatan telah memiliki Rumah Dinas Camat.
12. 75% infrastruktur pemerintahan desa (kantor desa) ditingkatkan ketersediaan dan kualitasnya, utamanya bagi kantor desa pemekaran serta rehabilitasi bagi kantor desa yang rusak berat.
13. Peningkatan ketersediaan fasilitas penunjang operasional pemerintahan (kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi pemerintahan pada semua unit kerja SKPD..
14. Perbaikan manajemen dan infrastruktur penanggulangan bencana.
15. Peningkatan upaya perlindungan masyarakat, pengamanan aset pemerintahan dan penegakan peraturan daerah.
16. Peningkatan kesejahteraan aparatur bagi pemerintahan desa, serta perbaikan kesejahteraan tenaga honor/kontrak daerah.





## BAB III

### KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, dan tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Untuk pelaksanaan anggaran dan program pembangunan Tahun 2018 telah





ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2018.

### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan.

#### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dan sesuai dengan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan, maka dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, membangun database dan pemetaan data tentang potensi



- pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD, dan menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan yang riil.
- b. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan serta membuat regulasi baru yang berpotensi sebagai sumber pendapatan asli daerah.
  - c. Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah mulai dari unit-unit pengelola penerimaan pendapatan hingga pengelola pendapatan daerah ditingkat kabupaten. Penguatan kelembagaan tersebut termasuk juga upaya peningkatan kapasitas SDM serta pengawasan terhadap kebocoran potensi pendapatan asli daerah.
  - d. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;
  - e. Meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional seperti pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, hibah, bagian pendapatan penyertaan modal, penerimaan dari TGR dan pendapatan sejenis lainnya.
  - f. Pemberian insentif dan disinsentif sebagai reward bagi pengelola penerimaan PAD yang berkinerja dan punishment bagi yang tidak berkinerja baik.
  - g. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil;
  - h. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
  - i. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
  - j. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah khususnya asset yang berpotensi memberikan stimulus bagi peningkatan PAD.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp.1.010.552735,037 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 975.655.686.452,13 atau mencapai sebesar 96,55%, dengan perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.1  
Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan		
		Anggaran	Realisasi Pendapatan	%
1	PAD	80.724.733.925	65.110.910.717.33	80,66%
2	Dana Perimbangan	713.145.323.691	699.012.975.688	98,02%
3	Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah	165.571.692.712	161.125.744.034,8	97,31%
<b>Jumlah</b>		<b>1.010.552.735.037</b>	<b>975.655.686.452,13</b>	<b>96,55%</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD hanya memenuhi 80,66% dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 65.110.910.717,33. Untuk pendapatan Transfer Dana Perimbangan mengalami hal yang sama yaitu hanya berada pada angka 98,02%. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah juga hanya mendapatkan 97,31 % dari target yang ditetapkan.

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-Lain PAD yang Sah.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp. 80.724.733.925 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 65.110.910.717,33 atau penerimaannya mencapai 80,66%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Bone Bolango adalah berasal Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebesar 51.511.414.649,83 dari target Rp. 63.149.733.925,-. Adapun perincian PAD Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2  
Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah Perubahan		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pajak Daerah	10.675.000.000	10.916.679.121	102,26%
2	Retribusi Daerah	6.150.000.000	1.438.637.979,5	23,29%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	750.000.000	1,244,178,967	165,89%
4	Lain - Lain PAD yang Sah	63.149.733.925	51.511.414.649,83	81,57%
<b>Jumlah</b>		<b>80.724.733.925</b>	<b>65.110.910.717,33</b>	<b>80,66%</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Pada tabel di atas terlihat bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 165,89%. Hal ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Untuk pajak daerah yang tidak mencapai 100% karena dari seluruh target pajak yang ditetapkan tidak ada yang mencapai 100%. Untuk retribusi daerah yang hanya mencapai 23,29 % terjadi penyerapan yang rendah di retribusi jasa usaha yang hanya mampu memenuhi 16,98% dari total yang ditetapkan

### 1). Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango meliputi: (1) Pajak Reklame; (2) Pajak Penerangan Jalan; (3) Pajak Galian C; (4) Pajak Restoran; (5) Pajak Hiburan; (6) Hotel/Kosan; (7) PBB-P2; (8) Bea Per Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan Rp. 10.675.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.916.679.121 atau penerimaannya mencapai 102,26%. Dengan rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.3  
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pajak Hotel / Kosan	25,000,000.00	23,030,000.00	92.12
2	Pajak Restoran	1,000,000,000.00	1,362,315,652.00	136.23
3	Pajak Hiburan	50,000,000.00	13,262,500.00	26.53
4	Pajak Reklame	100,000,000.00	42,315,625.00	42.32
5	Pajak Penerangan Jalan	3,550,000,000.00	3,940,006,400.00	110.99
6	Pajak Mineral Bukan Logam	2,250,000,000.00	2,255,884,587.00	100.26
7	PBB-P2	2,850,000,000.00	2,501,671,889.00	87.78
8	BPHTB	850,000,000.00	778,192,468.00	91.55
<b>Jumlah</b>		<b>10.675.000.000,00</b>	<b>10.916.679.121,00</b>	102,26%

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Pada tabel diatas yang melampaui target anggaran ada 3 objek pajak yakni pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam. Untuk pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan hanya menyentuh angka 87,78%. Yang paling rendah resapannya adalah pajak hiburan yaitu 26,53%.

## 2). Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango meliputi:

- a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan - PUSKESMAS (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan – Rumah Sakit Umum Daerah, (3) Retribusi Pelayanan Persampahan, (4) Retribusi Pasar - Pelataran, (5) Retribusi PKB – Mobil Barang.
- b) Retribusi jasa usaha yang terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah penyewaan Tanah dan Bangunan (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah –





kendaraan bermotor, (3) Retribusi TPI, (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (6). Retribusi Tempat Rekreasi (7) Retribusi Tempat Olahraga, (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (9) Retribusi Rumah Potong Hewan.

- c) Retribusi perijinan tertentu yang terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan (3) Izin Gangguan (HO).

*Tabel 3.4*  
*Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018*

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2018 Rp</b>	<b>Realisasi 2018 Rp</b>	<b>Persentase %</b>
Retribusi Jasa Umum	1,875,000,000.00	413,603,285.00	22.06
Retribusi Jasa Usaha	3,275,000,000.00	611,850,900.00	18.68
Retribusi Perizinan Tertentu	1,000,000,000.00	413,183,794.50	41.32
<b>Jumlah</b>	<b>6,150,000,000.00</b>	<b>1,438,637,979.50</b>	<b>23.39</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

*Tabel 3.5*  
*Rician Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018*

<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>Anggaran 2018 Rp</b>	<b>Realisasi 2018 Rp</b>	<b>Persentase %</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan	375,000,000.00	133,521,285.00	35.61
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100,000,000.00	0.00	0.00
Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan	650,000,000.00	109,705,000.00	16.88
Retribusi Pelayanan Pasar	750,000,000.00	170,377,000.00	22.72
<b>Jumlah</b>	<b>1,875,000,000.00</b>	<b>413,603,285.00</b>	<b>22.06</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK



Tabel 3.6  
Rician Retribusi Jasa Usaha Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Persentase %
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,635,000,000.00	153,745,000.00	9.40
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	625,000,000.00	64,859,900.00	10.38
Retribusi Tempat Khusus Parkir	200,000,000.00	64,131,000.00	32.07
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	700,000,000.00	329,115,000.00	47.02
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100,000,000.00	0.00	0.00
Retribusi Rumah Potong Hewan	15,000,000.00	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>3,275,000,000.00</b>	<b>611,850,900.00</b>	<b>18.68</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Tabel 3.7  
Rician Retribusi Perizinan Tertentu Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Persentase %
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900,000,000.00	407,596,817.00	45.29
Retribusi Izin Gangguan	100,000,000.00	5,586,977.50	5.59
<b>Jumlah</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>413,183,794.50</b>	<b>41.32</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Pencapaian target Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2018 mencapai 23,29 % dari anggaran yang ditetapkan. Jika melihat tabel diatas maka nampak beberapa potensi Retribusi yang tidak dianggarkan akan tetapi memiliki penerimaan sehingga untuk kedepannya dapat digunakan sebagai sumber retribusi tetap.

### 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada: (1) Bagian Laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik daerah(2) Bagian Laba atas Penyertaan modal pada



perusahaan milik swasta; sebagaimana tabel berikut:

*Tabel 3.8*  
*Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018*

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2018 Rp</b>	<b>Realisasi 2018 Rp</b>	<b>Persentase %</b>
Pendapatan Deviden Bank SulutGo	750,000,000.00	1,244,178,967.00	165.89
<b>Jumlah</b>	<b>750,000,000.00</b>	<b>1,244,178,967.00</b>	<b>165.89</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK (unaudited)

Berdasarkan tabel diatas maka secara total, terlihat bahwa ada kelebihan Rp. 293.174.405. dari target pendapatan yang dianggarkan. Hal ini karena bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta yang tidak ditargetkan sebagai sumber pendapatan justru menghasilkan Rp. 793.174.405,-

#### 4). Lain-lain PAD yang Sah

Pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

- a) Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Pendapatan Penerimaan Jasa Giro
- c) Pendapatan Bunga Deposito
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- e) Pendapatan dari Pengembalian
- f) Pendapatan BLUD RS. Toto Kabila
- g) Pendapatan Lain- Lain
- h) Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Perincian Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. **63,149,733,925.00** terealisasi Rp. **51,511,414,649.83** atau mencapai sebesar 81,57%. Adapun perincian dari pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.9  
Perincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Persentase %
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	550,000,000.00	291,675,000.00	53.03
Penerimaan Jasa Giro	1,500,000,000.00	710,638,848.00	47.38
Pendapatan Bunga Deposito	5,500,000,000.00	5,777,928,416.60	105.05
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5,500,000,000.00	1,964,226,456.00	35.71
Pendapatan dari Pengembalian	250,000,000.00	101,524,577.00	40.61
Pendapatan BLUD	40,000,000,000.00	34,419,220,835.73	86.05
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	827,232,925.00	410,626,700.50	49.64
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9,022,501,000.00	7,835,573,816.00	86.84
Dana BOS	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>63,149,733,925.00</b>	<b>51,511,414,649.83</b>	<b>81.57</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

#### b. Dana Perimbangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan/pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan ini terdiri dari atas: (1) Dana Transfer Umum dan (3) Dana Transfer Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 638.403.943.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 618.206.529.662 atau mencapai target 98,47%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.10  
Perincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Dana Transfer Umum	487.244.817.000	487.244.817.000	100
2	Dana Transfer Khusus	140.573.000.000	130.963.712.662	93,16
<b>Total</b>		<b>627.817.817.000</b>	618.206.529.662	<b>98,47</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

### 1. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum (atau sebelumnya di sebut dana alokasi umum) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.487.244.817.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 487.244.817.000 atau mencapai 100%;

### 2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus untuk Kabupaten Bone Bolango dianggarkan sebesar Rp. 140.573.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 130.963.712.662 atau sebesar 93,16%. Dana Transfer khusus ini sendiri terbagi atas dua yaitu dana alokasi khusus Fisik, dengan realisasi Rp. 130.963.712.662 dan dana alokasi khusus non fisik dengan realisasi sebesar Rp. 71.134.766.531.

### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

#### 1. Pendapatan Hibah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun



2012 Tentang Hibah Daerah, Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Untuk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 direncanakan mendapatkan Pendapatan Hibah Dari Pemerintah sebesar Rp 11.250.000.000 dengan realisasi 100 %. Sedangkan dari lembaga swasta yaitu PT Bank Sulutgo sebesar Rp. 258.000.000 dengan realisasinya 100%.

## 2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Rp. 16.860.984.709 merupakan target dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dimana dari angka tersebut yang terealisasi adalah sebesar Rp. 16.156.056.012 atau sebesar 95,82%. Tidak mencapai target ini terjadi karena pada Pajak Kendaraan Bermotor capaian realisasinya hanya 44,28% dan capaian pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 93,95%.

*Tabel 3.11  
Perincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2018*

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Rasio %
Pajak Kendaraan Bermotor	4,977,958,090.00	2,204,448,374.00	44.28
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4,121,047,337.00	3,871,768,776.00	93.95
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3,589,162,585.00	4,905,215,699.00	136.67
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	80,000,000.00	120,627,521.00	150.78
Pajak Rokok	4,092,816,697.00	5,053,995,642.00	123.48
<b>Jumlah</b>	<b>16,860,984,709.00</b>	<b>16,156,056,012.00</b>	<b>95.82</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

## 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian berupa Dana Intensif Daerah sebesar Rp.



34.250.000.000 terealisasi secara keseluruhan dan menjadi sumber pendapatan potensial untuk tahun-tahun kedepannya.

#### **4. Pendapatan Lainnya**

Pendapatan lainnya memiliki anggaran Rp. 129.706.505.317 dengan realisasi yang terinci dalam Dana Desa sebesar Rp. 124.875.215.400 dan Dana Non Kapitasi dari BPJS sebesar Rp. 4.831.289.917.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- 1).Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- 2).Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
- 3).Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
- 4). Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD;
- 5).Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan;
- 6).Terlalu tingginya target pendapatan yang ditetapkan tanpa memperhatikan jumlah konsumen atau ketersediaan sumber PAD

#### **b. Dana Perimbangan**

Perhitungan Dana Perimbangan, baik dalam Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu perlu



ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan masih sangat rendah bahkan limit 0% sehingga untuknya perlu perhatian khusus dengan cara penjemputan dan atau penagihan pajak pada sumber-sumber pemanfaatan air permukaan.

## B. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan berbagai program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor yang ada di masyarakat.

### 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Kebijakan Belanja Daerah secara deskriptif dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;



- b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## 2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. **1.032.497.030.165,44** dan dapat direalisasikan Rp. 958.488.733.966,8 atau mencapai 92,83% yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.12*  
*Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018*

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah perubahan		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Tidak	506.161.120.171,18	470.321.067.603,80	92,91
2	Belanja Langsung	526.335.909.994,26	488.167.666.363	92,90
<b>Jumlah</b>		<b>1.032.497.030.165,</b>	<b>958.488.733.966,8</b>	<b>92,83</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi terhadap belanja daerah sebesar 49,02% dan belanja langsung 50,98%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. **506.161.120.171,18** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 470.321.067.603,80 atau 92,91%, dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 3.13  
Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah perubahan	
		Anggaran Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Tidak Langsung
1	Belanja Pegawai	38.5019.659.233,18	371.353.705.760
2	Belanja Hibah	38.037.350.202	35.929.973.602
3	Belanja Bantuan Sosial	3.853.200.000	2.698.000.000
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	176.238.800.136	176.236.948.386
5	Belanja Tidak Terduga	269.535.200	251.751.814
<b>TOTAL</b>		<b>603.418.544.771,18</b>	<b>586.470.379.562</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

Realisasi belanja Pegawai tahun 2018 mencapai 371.353.705.760 dari target anggaran yang ditetapkan (Perda Perubahan APBD). Realisasi Belanja Pegawai dalam tahun 2018 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik terdapat Rp. 176.238.800.136,- yang digunakan untuk belanja bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Dana desa dalam bentuk alokasi dana desa yang merupakan belanja Publik di tingkatan Desa.

#### b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.615,388,529,009.22 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 585,981,453,831.80 Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.14  
Perincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran 2018 Rp	Realisasi 2018 Rp	Rasio %
Belanja Pegawai	385,019,659,233.18	371,353,705,760.00	96.45
Belanja Barang dan Jasa	188,478,319,574.04	175,999,774,469.80	93.38
Belanja Hibah	38,037,350,202.00	35,929,973,602.00	94.46
Belanja Bantuan Sosial	3,853,200,000.00	2,698,000,000.00	70.02
<b>Jumlah</b>	<b>615,388,529,009.22</b>	<b>585,981,453,831.80</b>	<b>95.22</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

### c. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Tabel 3.15  
Komposisi Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah perubahan		
		Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	35.944.295.128,44	36.709.690.438,91	102,13
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.000.000.000	14.000.000.000	100
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>21.944.295.128,44</b>	<b>22.709.690.438,91</b>	

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK



Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 35.944.295.128,44 merupakan Penerimaan Pembiayaan dari Akumulasi SiLPA Tahun 2018. Adapun perincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.16*  
*Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018*

Uraian	Tahun Anggaran 2018 Setelah perubahan	
	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan	0	39.876.642.924,24
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>39.876.642.924,24</b>

\*) Sumber Data BKPAD

\*\*)Data sebelum dilakukan pemeriksaan BPK

## BAB IV

# PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2018 harus dievaluasi pelaksanaannya untuk menjamin kesinambungan program tahunan dalam periode jangka menengah RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021. Evaluasi kinerja kebijakan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018 serta untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan rencana pembangunan daerah periode tahun berikutnya.

Secara umum kinerja makro pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan lebih baik dibandingkan kinerja makro tahun 2017, walaupun disisi lain masih terdapat beberapa hal fundamental yang memerlukan perbaikan dan pembenahan secara berkelanjutan. Beberapa indikator kinerja makro pembangunan daerah yang menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi daerah, indeks kepuasan masyarakat, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik terkait pengelolaan keuangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya.

### 1. Angka Kemiskinan

Dalam dua tahun terakhir 2017-2018 angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan pergerakan kearah positif dimana pada tahun 2018 mencapai 17,81% sedangkan pada tahun 2017 mencapai 17,40%. Kinerja positif tersebut belum terlalu signifikan karena masih jauh diatas angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,82% serta masih di atas angka rata-rata kemiskinan Provinsi Gorontalo sebesar 16,81%. Oleh karenanya, pemerintah daerah terus melakukan



berbagai upaya perbaikan melalui penajaman program maupun peningkatan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup masyarakat miskin serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

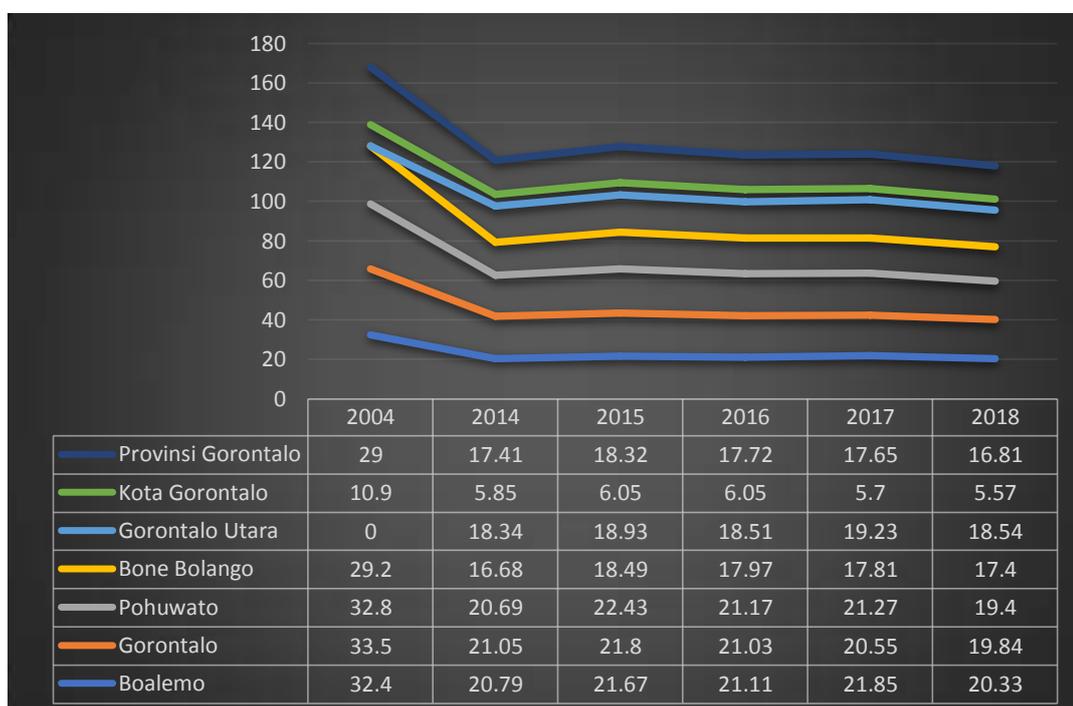
Gambaran kinerja pengurangan rakyat miskin di Kabupaten Bone Bolango dan grafik perbandingan angka kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 4.1**  
*Angka Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo*



Sumber Data : BPS Kab. Bone Bolango 2018

**Grafik 4.2**  
*Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo*

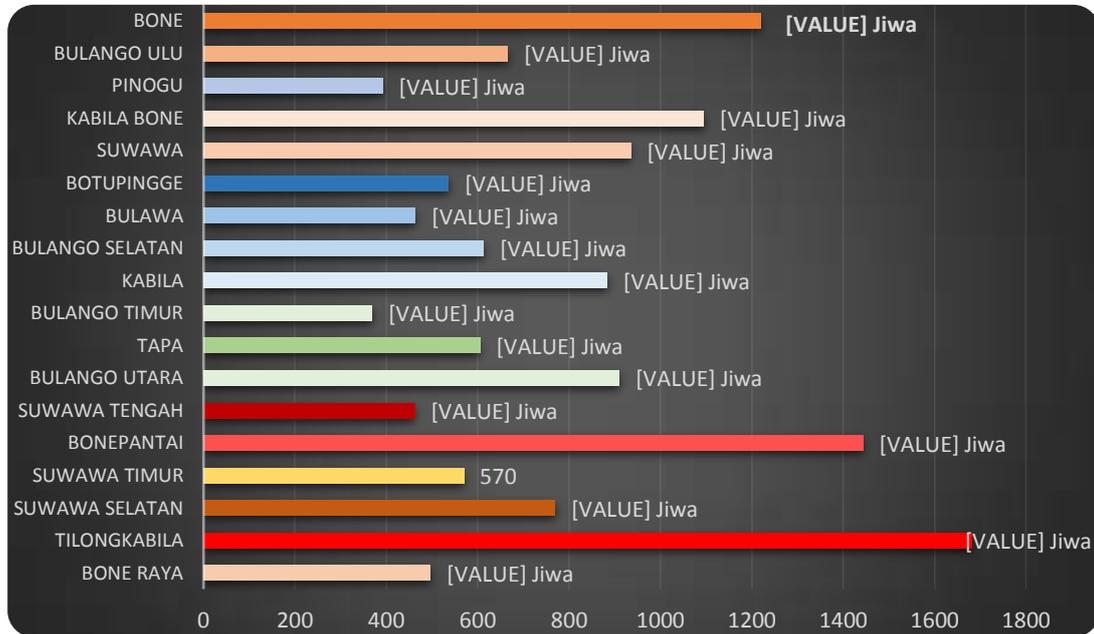


Sumber Data : BPS Kab. Bone Bolango 2018



Sebaran rumah tangga miskin terbesar terdapat pada Kecamatan Tilongkabila, beberapa kecamatan wilayah pesisir, Suwawa Timur, dan Suwawa Selatan yang sebaran rumah tangga miskin per kecamatan tersebut sebagaimana terlihat pada diagram berikut:

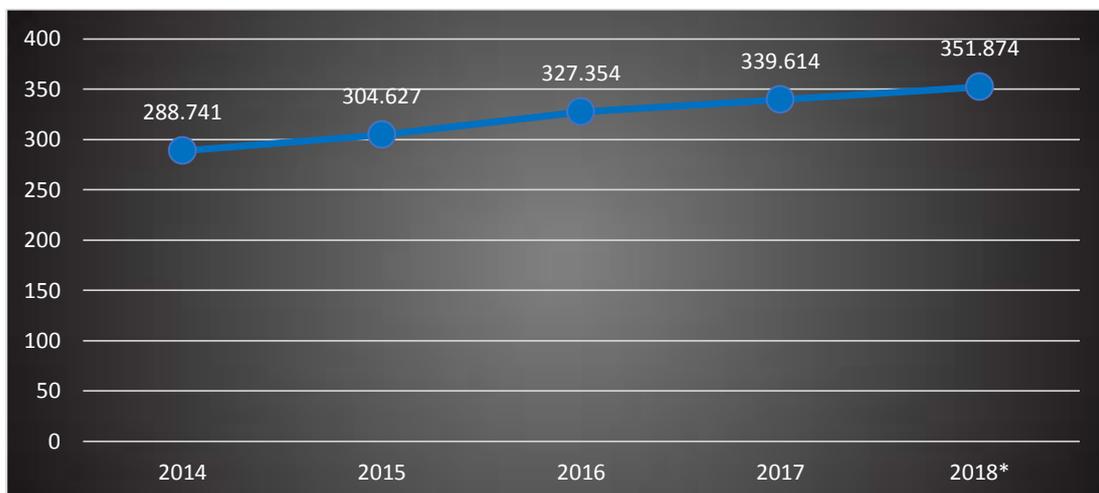
Grafik 4.3 Sebaran Angka Kemiskinan Kabupaten Bone



Sumber Data : RTS Provinsi Gorontalo 2018

Garis kemiskinan (Poverty Line) sangat menentukan besar kecilnya jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2017 garis kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 339.614, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 327.354

Grafik 4.3 Garis Kemiskinan Kabupaten Bone 2014-2017



Sumber Data : BPS Bone Bolango 2018

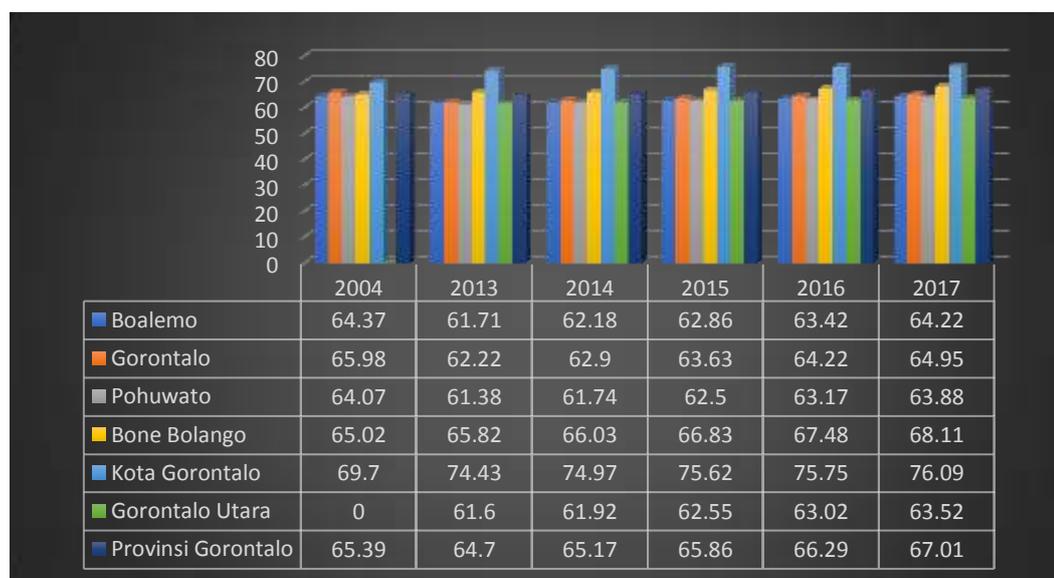


## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Hingga tahun 2017, indeks pembangunan manusia Kabupaten Bone Bolango terus meningkat dari 67,48 pada tahun 2016 menjadi 68,11 pada tahun 2017 yang berada diatas rata-rata IPM Provinsi Gorontalo sebesar 67,01 serta peringkat kedua IPM di Provinsi Gorontalo setelah Kota Gorontalo sebesar 76,09. Peningkatan indeks pembangunan manusia tersebut sebagai implikasi dari perbaikan derajat kesehatan penduduk, kualitas pendidikan dan perbaikan ekonomi masyarakat yang terus mengalami perbaikan.

Melihat rata-rata peningkatan dari tahun 2014-2017, maka di estimasikan bahwa capaian indeks pembangunann manusia pada tahun 2018 mencapai, 69,27\*.

Grafik 4.4 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota



Sumber Data : BPS Kab. Bone Bolango 2018

Grafik 4.5 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone Bolango





Derajat kesehatan masyarakat dengan indikator angka harapan hidup masih stagnan di 67,7 tahun, angka kematian ibu melahirkan dari 226 turun menjadi 118,6 per 100.000 angka kelahiran hidup. Akan tetapi pada tahun 2018 angka kematian bayi naik menjadi 18 dari 11 per 1000 kelahiran hidup, dalam hal ini pemerintah daerah masih berupaya dengan berbagai inovasi, perbaikan sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan terus ditingkatkan baik pelayanan dasar puskesmas maupun Rumah Sakit Toto dan Rumah Sakit Tombulilato. Atas pencapaian dibidang kesehatan, Kabupaten Bone Bolango di anugerahi “BUPATI AWARD” dari INA APKASI pada tahun 2018 atas inovasi program Mutiara Berlian dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak.

Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh faktor Pendidikan. Perbaikan kinerja pembangunan pendidikan tersebut tercermin pada penduduk yang bisa membaca usia 15 tahun keatas sebanyak 85.034 dari 86.158 penduduk usia 15 tahun keatas, peningkatan partisipasi sekolah serta angka rata-rata lama sekolah yang terus meningkat pada tahun 2018 yakni dari 8,71 menjadi 8,87 (*Sumber Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango*). Selain itu, pertumbuhan minat baca dari masyarakat meningkat drastis dari 100 % yang di targetkan pada tahun 2018 menjadi 182,5% (*Sumber Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah*).

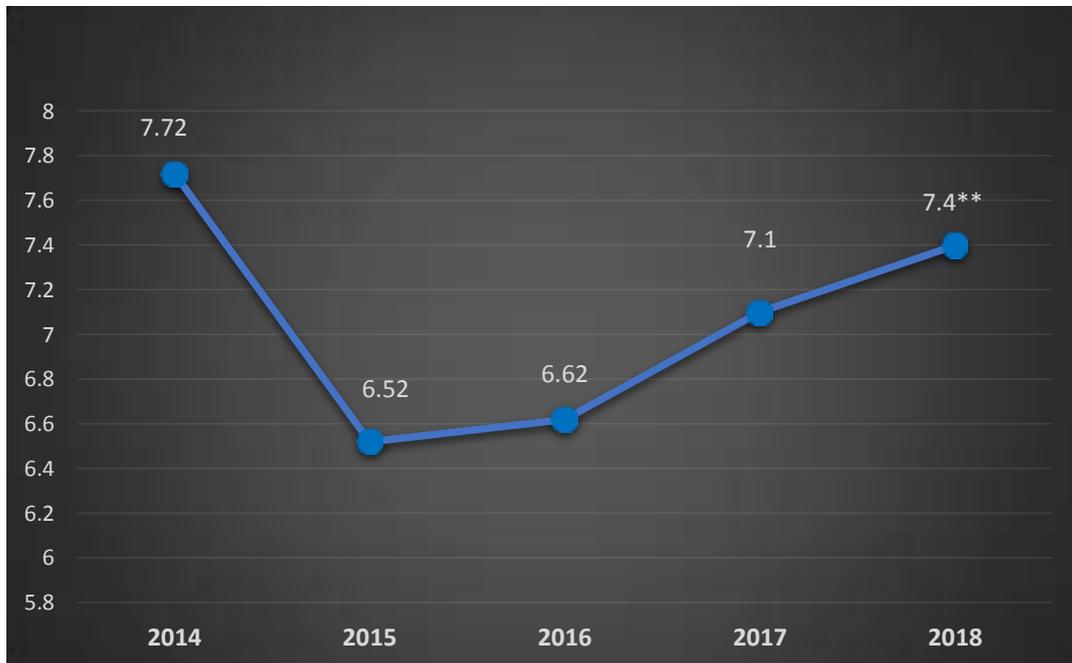
### **3. Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran**

Disektor ekonomi, walaupun pergerakan ekonomi kita terkoreksi negatif pada tahun 2015 yang turun dari 7,72% menjadi 6,52%, namun pada tahun 2016 bergerak naik sebesar 6,61%, serta 7,10% pada tahun 2017 dan di prediksi naik 7,4% pada tahun 2018. Dari presentase harga berlaku, pertumbuhan ekonomi tersebut sebagian besar ditopang oleh pertumbuhan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memiliki nilai kontribusi sebesar 36,08%. Sektor lain yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 13,30%. Sementara itu, kinerja penurunan angka pengangguran terbuka pada periode 2016 menurun dari 6,76% menjadi 4,28% akan tetapi pada tahun 2017 naik menjadi 4,70% melebihi tingkat pengangguran Provinsi Gorontalo sebesar 4,28 %. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena pertumbuhan ekonomi daerah meningkat beriringan dengan



tingkat pengangguran. Data riil untuk pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran tahun 2018 masih menunggu hasil pengolahan data yang akan dipublish BPS Kabupaten Bone Bolango pada bulan Agustus 2019.

Grafik 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bone Bolango



\*\*.)Angka Proyeksi

Sumber Data : BPS Kab. Bone Bolango 2018

Grafik 4.6 Tingkat Pengangguran Kab. Bone Bolango 2011-2017



Sumber Data : BPS Kab. Bone Bolango 2018

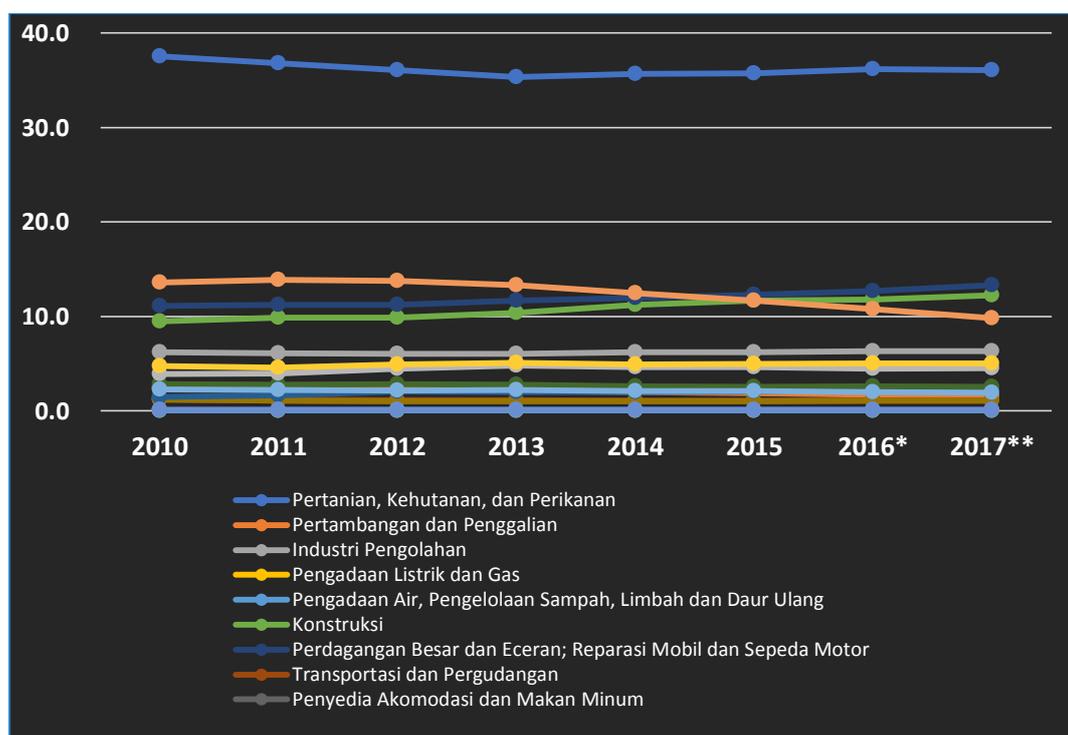


Pada tahun 2017 nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango atas dasar harga berlaku sebesar 3,686 milyar rupiah mengalami kenaikan dari 3,509 milyar rupiah pada tahun 2016, selain itu pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan sebesar 2,786 milyar rupiah dari 2,601 milyar rupiah pada tahun 2016 (*Sumber BPS Kab. Bone Bolango*).

Dilihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi dalam delapan tahun terakhir, terjadi kecenderungan perubahan positif struktur ekonomi daerah kearah yang positif dimana sektor-sektor non primer utamanya industri pengolahan dan jasa makin memberikan kontribusi yang positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan secara relatif, sektor primer yakni sektor pertanian juga menunjukkan geliat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kecenderungan pertumbuhan struktur ekonomi tersebut mulai memberi ruang positif pada pergerakan sektor industri dan jasa utamanya pertumbuhan UMKM termasuk industri kopi pinogu, jasa kepariwisataan, jasa kesehatan, pendidikan dan jasa keuangan lainnya.

Adapun pergeseran struktur ekonomi daerah dalam delapan tahun tersebut sebagaimana tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 4.7 Struktur Ekonomi Daerah 2010-2017



Sumber Data : BPS Kab. Bone Bolango 2018



#### 4. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Daerah

Di bidang pengelolaan keuangan, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penghargaan WTP pada tahun 2018 merupakan opini yang telah diraih selama 5 tahun berturut-turut.

Dalam kinerja pengelolaan sistem akuntabilitas pemerintahan daerah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 berhasil meraih nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Predikat BB, dengan peningkatan nilai sebesar 0,57 dari 7,01 pada tahun 2017 menjadi 7,58 pada tahun 2018. Predikat ini memposisikan Kabupaten Bone Bolango dalam 20 besar pemerintahan kabupaten kota terbaik seluruh Indonesia, 5 besar di regional Sulawesi dan satu-satunya kabupaten/kota di provinsi Gorontalo dalam pengelolaan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kinerja ini merefleksikan gambaran pengelolaan pemerintahan yang semakin berorientasi outcome dan bukan output semata, semakin terukur, efisien, efektif dan pro publik.

Dalam aspek Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi salah satu bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah, kinerja penilaian LPPD pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 menurun dari peringkat 84 pada tahun 2017 menjadi peringkat 108, hal ini menjadi evaluasi dan solusi perbaikan pelaporan pada tahun yang akan datang.

Tabel 4.1 Kinerja Pengelolaan Pemerintahan

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)
			Target	Realisasi	
Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	100.0	WTP	WTP	100.0
Predikat LKIP	predikat	100.0	B	BB	100
Peringkat LPPD	Nilai	148,8	Tinggi (Peringkat 100)	Tinggi (Peringkat 108)	92



#### a. Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan data capaian kinerja di atas, dari target WTP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka realisasinya WTP atau capaian kinerja mencapai **100%** dengan kategori *sangat tinggi*.

Sudah 5 tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan.



Secara keseluruhan laporan keuangan Kabupaten Bone Bolango telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

**b. Predikat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (LHE AKIP)**



SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja dapat digambarkan bahwa dari target untuk mempertahankan Nilai BB yang sudah ditetapkan, maka realisasi pencapaian indikator sasaran predikat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah adalah BB dengan kinerja pencapaian sebesar **100%** dengan kategori *sangat tinggi*

Grafik 4.8 Trend Capaian Kinerja LHE LAKIP 2010-2018





Dalam pencapaian target SAKIP, pemerintah daerah telah melakukan refocusing program dan kegiatan untuk meminimalisir pelaksanaan program yang tidak strategis serta dan penajaman kegiatan agar tepat sasaran.

Grafik 4.9 Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2013-2018



#### c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan Informasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Bagi Pemerintah, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. LPPD dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri setiap tahun anggaran.

Seperti yang telah digambarkan pada tabel 4.1, pencapaian peringkat LPPD Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 menurun dari peringkat ke-84 menjadi peringkat ke-108.

#### d. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dengan perbaikan kinerja pembangunan yang positif pada tahun 2018 memberikan implikasi positif juga pada peningkatan kepuasan masyarakat dalam

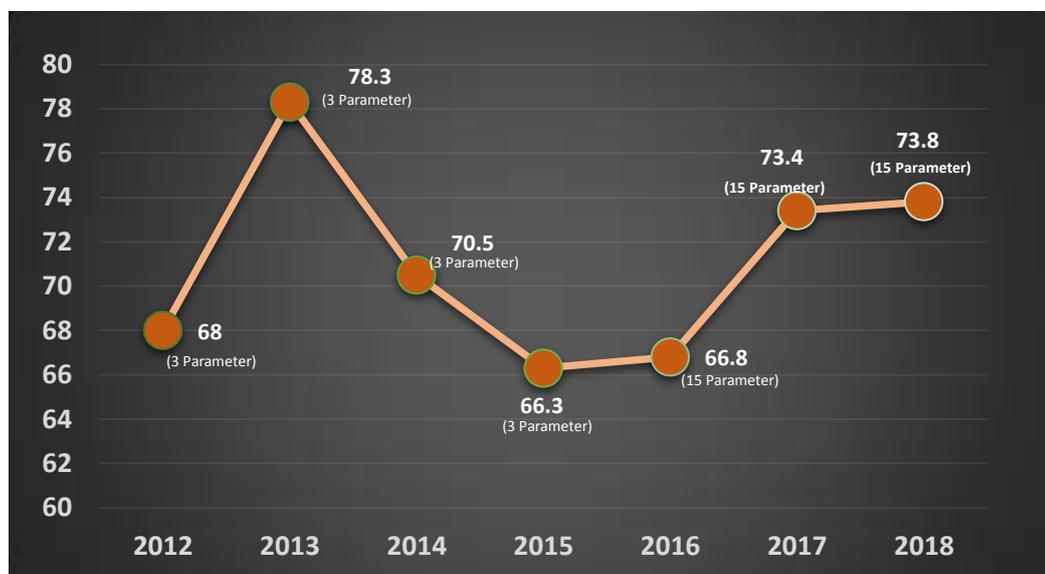


menerima layanan publik. Secara umum dengan menggunakan 15 parameter pengamatan, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik meningkat dari angka 73,4 naik menjadi 73,8. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat tersebut utamanya dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan serta layanan administrasi kependudukan yang semakin baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bone Bolango terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan Bone Bolango merupakan akumulasi keseluruhan jenis layanan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Trend indeks kepuasan masyarakat dalam tujuh tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

*Grafik 4.10 Indeks Trend Kepuasan Masyarakat Tahun 2012-2018*



*Sumber Data: Bappeda Litbang Bone Bolango*

Dibanding dengan IKM Layanan publik Bone Bolango Tahun 2017, IKM Bone Bolango 2018 mengalami kenaikan. IKM Bone Bolango Tahun 2017 adalah 73,4% dan IKM Bone Bolango tahun 2018 adalah 73,8% atau mengalami kenaikan sebesar 0,4%.

Dalam hal survey kepuasan masyarakat, sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten menggunakan 15 parameter penilaian yang sebelumnya hanya menggunakan 3 parameter survey. Parameter ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat hingga hasil survey yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan.



Tabel 4.2 Parameter Bidang Survey Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

No	Bidang Tahun 2015	Bidang Tahun 2016 dan 2017
1.	Pendidikan	Pendidikan
2.	Kesehatan	Kesehatan
3.	Infrastruktur jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum
4.	Penanganan Bencana Alam	Penanggulangan Bencana Alam
5.	Bantuan Bagi Petani/Nelayan	Program Bantuan Lainnya
6.		Kependudukan
7.		Tata Ruang
8.		Sosial
9.		Kelautan dan Perikanan
10.		Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
11.		Pemberdayaan Ekonomi
12.		Pariwisata
13.		Keluarga Berencana
14.		Perpustakaan
15.		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 4.3 Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan OPD Tahun 2018

NO	OPD	IKM 2018	KATEGORI	KUALITAS
1	Dinas Kesehatan	79,0	B	Memuaskan
2	Rumah Sakit Umum Daerah	78,2	B	Memuaskan
3	Dinas Kependudukan dan Capil	77,7	B	Memuaskan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77,2	B	Memuaskan
5	Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur	75,0	B	Memuaskan
6	Pemerintah Kecamatan Tilongkabila	74,5	B	Memuaskan
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	73,7	B	Memuaskan
8	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PA	73,0	B	Memuaskan
9	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	72,5	B	Memuaskan
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72,0	B	Memuaskan
11	Dinas Lingkungan Hidup	71,5	B	Memuaskan
12	Dinas Pariwisata	71,3	B	Memuaskan
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	70,4	B	Memuaskan
14	Dinas Pangan	70,2	B	Memuaskan
15	Inspektorat	69,8	B	Memuaskan
16	BAPPEDA dan Litbang	69,7	B	Memuaskan
17	Dinas Sosial	68,5	B	Memuaskan
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,2	B	Memuaskan



19	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	68,0	B	Memuaskan
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67,7	B	Memuaskan
21	Sekretariat Dewan	67,2	B	Memuaskan
22	Sekretariat Daerah	67,1	B	Memuaskan
23	Dinas Pertanian dan Peternakan	67,0	B	Memuaskan
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	66,6	B	Memuaskan
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	65,7	B	Memuaskan
26	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	63,6	B	Memuaskan
27	Dinas Perhubungan	62,1	C	Kurang Memuaskan
28	Dinas Perikanan dan Kelautan	61,3	C	Kurang Memuaskan
29	Dinas SatPol PP dan Damkar	61,1	C	Kurang Memuaskan
30	Dinas Komunikasi dan Informatika	60,5	C	Kurang Memuaskan
31	Pemerintah Kecamatan Bulawa	87,5	A	Sangat Memuaskan
32	Pemerintah Kecamatan Suwawa	85,4	A	Sangat Memuaskan
33	Pemerintah Kecamatan Kabila Bone	84,9	A	Sangat Memuaskan
34	Pemerintah Kecamatan Bulango Timur	83,1	A	Sangat Memuaskan
35	Pemerintah Kecamatan Bonepantai	82,8	A	Sangat Memuaskan
36	Pemerintah Kecamatan Pinogu	81,6	B	Memuaskan
37	Pemerintah Kecamatan Botupingge	81,0	B	Memuaskan
38	Pemerintah Kecamatan Suwawa Selatan	81,0	B	Memuaskan
39	Pemerintah Kecamatan Suwawa Tengah	81,0	B	Memuaskan
40	Pemerintah Kecamatan Bulango Utara	80,8	B	Memuaskan
41	Pemerintah Kecamatan Boneraya	80,4	B	Memuaskan
42	Pemerintah Kecamatan Kabila	79,9	B	Memuaskan
43	Pemerintah Kecamatan Bone	79,0	B	Memuaskan
14	Pemerintah Kecamatan Tapa	78,8	B	Memuaskan
15	Pemerintah Kecamatan Bulango Ulu	78,5	B	Memuaskan
16	Pemerintah Kecamatan Bulango Selatan	78,1	B	Memuaskan
17	Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur	75,0	B	Memuaskan
18	Pemerintah Kecamatan Tilongkabila	74,5	B	Memuaskan



Alokasi dan realisasi APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 berdasarkan urusan pemerintahan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun 2018

URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi	% Rasio
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>Pendidikan</b>	<b>201.637.265.812,20</b>	<b>190.711.743.572,80</b>	94,58	19,90
Belanja Langsung	44.666.021.266,20	40.586.537.383,80		
Belanja Tidak Langsung	156.971.244.546,00	150.125.206.189,00		
<b>Kesehatan</b>	<b>153.446.201.882,44</b>	<b>139.748.916.394,00</b>	91,07	14,58
Belanja Langsung	115.323.707.882,44	101.673.638.258,00		
Belanja Tidak Langsung	38.122.494.000,00	38.075.278.136,00		
<b>Pekerjaan Umum</b>	<b>168.211.477.244,56</b>	<b>130.342.741.848,00</b>	77,49	13,60
Belanja Langsung	164.302.327.244,56	126.438.927.528,00		
Belanja Tidak Langsung	3.909.150.000,00	3.903.814.320,00		
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>6.580.758.652,32</b>	<b>6.423.064.568,00</b>	97,60	0,67
Belanja Langsung	4.487.058.652,32	4.339.685.541,00		
Belanja Tidak Langsung	2.093.700.000,00	2.083.379.027,00		
<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum</b>	<b>9.550.553.900,00</b>	<b>9.435.197.459,00</b>	98,79	0,98
Belanja Langsung	4.827.345.900,00	4.760.647.572,00		
Belanja Tidak Langsung	4.723.208.000,00	4.674.549.887,00		
<b>Sosial</b>	<b>9.502.760.000,00</b>	<b>9.178.183.526,00</b>	96,58	0,96
Belanja Langsung	4.626.135.000,00	4.319.055.583,00		
Belanja Tidak Langsung	4.876.625.000,00	4.859.127.943,00		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>Ketenagakerjaan</b>	1.542.666.800,00	1.530.885.165,00	99,24	0,16
Belanja Langsung	1.542.666.800,00	1.530.885.165,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00		
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	307.482.750,00	273.239.318,00	88,86	0,03
Belanja Langsung	307.482.750,00	273.239.318,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00		



<b>Pangan</b>	<b>3.113.428.550,00</b>	<b>3.072.139.483,00</b>	<b>98,67</b>	<b>0,32</b>
Belanja Langsung	726.188.550,00	706.029.938,00		
Belanja Tidak Langsung	2.387.240.000,00	2.366.109.545,00		
<b>Pertanahan</b>	<b>14.708.062.950,00</b>	<b>14.701.648.686,00</b>	<b>99,96</b>	<b>1,53</b>
Belanja Langsung	14.708.062.950,00	14.701.648.686,00		
Belanja Tidak Langsung				
<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>13.387.388.177,44</b>	<b>13.101.166.665,00</b>	<b>97,86</b>	<b>1,37</b>
Belanja Langsung	11.168.323.177,44	10.890.431.464,00		
Belanja Tidak Langsung	2.219.065.000,00	2.210.735.201,00		
<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>4.870.694.000,00</b>	<b>4.854.273.519,00</b>	<b>99,66</b>	<b>0,51</b>
Belanja Langsung	2.124.848.000,00	2.115.648.030,00		
Belanja Tidak Langsung	2.745.846.000,00	2.738.625.489,00		
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>5.499.770.000,00</b>	<b>5.425.685.488,00</b>	<b>98,65</b>	<b>0,57</b>
Belanja Langsung	3.247.460.000,00	3.177.012.086,00		
Belanja Tidak Langsung	2.252.310.000,00	2.248.673.402,00		
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>8.721.467.250,00</b>	<b>7.048.308.183,00</b>	<b>80,82</b>	<b>0,74</b>
Belanja Langsung	6.499.412.250,00	4.828.521.237,00		
Belanja Tidak Langsung	2.222.055.000,00	2.219.786.946,00		
<b>Perhubungan</b>	<b>6.140.240.400,00</b>	<b>6.116.821.181,00</b>	<b>99,62</b>	<b>0,64</b>
Belanja Langsung	3.776.675.400,00	3.767.696.106,00		
Belanja Tidak Langsung	2.363.565.000,00	2.349.125.075,00		
<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.388.615.000,00</b>	<b>4.241.269.557,00</b>	<b>96,64</b>	<b>0,44</b>
Belanja Langsung	2.970.600.000,00	2.824.519.638,00		
Belanja Tidak Langsung	1.418.015.000,00	1.416.749.919,00		
<b>Koperasi dan UMKM</b>	<b>735.312.550,00</b>	<b>648.306.800,00</b>	<b>88,17</b>	<b>0,07</b>
Belanja Langsung	735.312.550,00	648.306.800,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00		
<b>Penanaman Modal</b>	<b>4.221.868.000,00</b>	<b>4.170.037.850,00</b>	<b>98,77</b>	<b>0,44</b>
Belanja Langsung	1.361.051.000,00	1.313.723.636,00		
Belanja Tidak Langsung	2.860.817.000,00	2.856.314.214,00		
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.488.146.941,00</b>	<b>7.107.163.701,00</b>	<b>94,91</b>	<b>0,74</b>
Belanja Langsung	5.960.180.941,00	5.581.325.189,00		
Belanja Tidak Langsung	1.527.966.000,00	1.525.838.512,00		



<b>Perpustakaan</b>	<b>2.444.574.150,00</b>	<b>2.437.059.866,00</b>	<b>99,69</b>	<b>0,25</b>
Belanja Langsung	717.516.150,00	713.116.772,00		
Belanja Tidak Langsung	1.727.058.000,00	1.723.943.094,00		
<b>Kearsipan</b>	<b>197.565.000,00</b>	<b>195.309.000,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,02</b>
Belanja Langsung	197.565.000,00	195.309.000,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00		
Statistik	0,00	0,00		
Belanja Langsung	0,00	0,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00		
<b>Kebudayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Belanja Langsung	0,00	0,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00		
<b>URUSAN WAJIB PILIHAN</b>				
<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>5.606.883.333,30</b>	<b>4.759.417.955,00</b>	<b>84,89</b>	<b>0,50</b>
Belanja Langsung	3.848.688.333,30	3.007.929.595,00		
Belanja Tidak Langsung	1.758.195.000,00	1.751.488.360,00		
<b>Pariwisata</b>	<b>6.340.057.000,00</b>	<b>6.279.393.241,00</b>	<b>99,04</b>	<b>0,66</b>
Belanja Langsung	4.500.570.000,00	4.440.496.623,00		
Belanja Tidak Langsung	1.839.487.000,00	1.838.896.618,00		
<b>Pertanian</b>	<b>41.068.712.529,00</b>	<b>39.314.198.253,00</b>	<b>95,73</b>	<b>4,10</b>
Belanja Langsung	30.310.153.450,00	28.570.254.941,00		
Belanja Tidak Langsung	10.758.559.079,00	10.743.943.312,00		
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>6.376.784.750,00</b>	<b>6.195.777.302,00</b>	<b>97,16</b>	<b>0,65</b>
Belanja Langsung	6.376.784.750,00	6.195.777.302,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00			
<b>Perdagangan</b>	<b>4.315.458.100,00</b>	<b>4.153.406.751,00</b>	<b>96,24</b>	<b>0,43</b>
Belanja Langsung	4.315.458.100,00	4.153.406.751,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00			
<b>Perindustrian</b>	<b>5.948.452.150,00</b>	<b>5.260.270.199,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,55</b>
Belanja Langsung	3.627.337.150,00	2.941.109.384,00		
Belanja Tidak Langsung	2.321.115.000,00	2.319.160.815,00		
<b>Transmigrasi</b>	<b>11.434.050,00</b>	<b>11.434.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Langsung	11.434.050,00	11.434.050,00		
Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00		



URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				
<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>111.022.422.447,00</b>	<b>109.401.873.003,00</b>	<b>98,54</b>	<b>11,41</b>
Belanja Langsung	58.789.725.697,00	57.861.181.797,00		
Belanja Tidak Langsung	52.232.696.750,00	51.540.691.206,00		
<b>Pengawasan</b>	<b>8.028.235.000,00</b>	<b>7.904.966.410,00</b>	<b>98,46</b>	<b>0,82</b>
Belanja Langsung	3.320.000.000,00	3.237.254.839,00		
Belanja Tidak Langsung	4.708.235.000,00	4.667.711.571,00		
<b>Perencanaan</b>	<b>8.546.294.500,00</b>	<b>8.084.558.867,00</b>	<b>94,60</b>	<b>0,84</b>
Belanja Langsung	5.610.318.500,00	5.172.891.698,00		
Belanja Tidak Langsung	2.935.976.000,00	2.911.667.169,00		
<b>Keuangan</b>	<b>201.546.038.296,18</b>	<b>199.441.578.881,00</b>	<b>98,96</b>	<b>20,81</b>
Belanja Langsung	7.059.498.500,00	6.927.885.452,00		
Belanja Tidak Langsung	194.486.539.796,18	192.513.693.429,00		
<b>Kepegawaian</b>	<b>6.989.958.000,00</b>	<b>6.918.697.225,00</b>	<b>98,98</b>	<b>0,72</b>
Belanja Langsung	4.290.000.000,00	4.222.545.796,00		
Belanja Tidak Langsung	2.699.958.000,00	2.696.151.429,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.032.497.030.165,44</b>	<b>958.488.733.966,80</b>		
Belanja Langsung	526.335.909.994,26	462.128.073.158,80	87,80	100,00
Belanja Tidak Langsung	506.161.120.171,18	496.360.660.808,00		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dua urusan yang tidak mempunyai anggaran yakni urusan statistik dan urusan kebudayaan. Walaupun dari segi anggaran per urusan tidak tercantum namun kedua urusan tersebut tetap dilaksanakan melalui kegiatan yang melekat pada program lain. Hal tersebut merupakan kebijakan “Refocusing Program dan Kegiatan” pada tahun 2018, dimana penajaman-penajaman kegiatan dilakukan untuk mencapai target dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

## A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

### 1. PENDIDIKAN

Misi Kabupaten Bone Bolango yang pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang salah satu diantaranya melalui bidang pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango selain difokuskan pada peningkatan aksesibilitas juga



dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan yang merupakan sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

#### A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran APBD 2018 sebesar Rp. **201.637.265.812,20** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **190.711.743.572,80** atau 98,67%. Alokasi tersebut terbagi atas belanja tidak langsung berupa gaji guru dan ASN lainnya sebesar Rp. 156.971.244.546,00 dan belanja langsung berupa belanja program kegiatan sebesar Rp. 44.666.021.266,20.

Pembangunan untuk urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dialokasikan pada program dan kegiatan strategis seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.5 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun 2018*

1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pagar TK Nusa Indah</li> <li>• Pembangunan pagar TK Mawar</li> <li>• Pembangunan pagar TK Pembina Bonepantai</li> </ul>
2.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan pagar SDN 3 Suwawa</li> <li>• Pembangunan pagar SDN 2 Tilongkabila</li> <li>• Pembangunan ruang kelas jauh SDN 12 Bonepantai</li> <li>• Pembangunan ruang kelas baru SDN 2 Bonepantai dan SDN 2 Bone Raya</li> <li>• Pembangunan ruang kelas baru SMP 3 Satap Bone</li> <li>• Pembangunan jamban siswa SDN 5 Bulango Selatan, SDN 10 Kabila, SDN 8 Suwawa, SDN 1 Tapa dan SDN 2 Bulawa</li> <li>• Pembangunan jamban siswa SMPN 3 Bone, SMPN 3 Suwawa, SMPN 1 Bulango utara</li> <li>• Pengadaan bangunan Gedung laboratorium SMPN 3 Kabila Bone</li> <li>• Pembangunan sanitasi SDN 1 Bone</li> <li>• Pembangunan jamban siswa SDN 3 Tapa dan SDN 3 Bulango Utara</li> <li>• Pengadaan marching band SMPN 1 Bulango Selatan</li> <li>• Pengadaan alat praktik dan peraga siswa di 3 sekolah</li> <li>• Pengadaan mubelair di 7 sekolah</li> <li>• Rehabilitasi ruang kelas sekolah sebanyak 58 ruang</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs di 169 sekolah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pembelajaran dengan teknologi informasi di 169 sekolah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI, SMP/MTs</li> </ul>
3.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan seminar revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sosialisasi cagar budaya dan benda purbakala</li> </ul>
4.	Program Pendidikan Non Formal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Pendidikan keaksaraan sebanyak 10 kelompok</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup sebanyak 50 orang</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan paket A setara SD sebanyak 3 kelompok</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan paket B setara SMP sebanyak 5 Kelompok</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan paket C setara SMA sebanyak 7 kelompok</li> </ul>
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sertifikasi pendidik sebanyak 300 orang</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan bagi pendidik sebanyak 450 orang</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghargaan dan perlindungan profesi pendidik sebanyak 150 orang</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian profesi pendidik sebanyak 551 berkas</li> </ul>
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang Pendidikan dengan 2 MOU</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistim informasi manajemen Pendidikan sebanyak 3 sistim</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan seminar, lokakarya Kependidikan</li> </ul>
7.	Program Pengembangan Nilai Budaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kesenian kebudayaan daerah</li> </ul>
8.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan minat dan budaya baca</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA

Sebagai refleksi pencapaian sasaran pembangunan bidang Pendidikan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada tahun 2018, gambaran umum capaian kinerja bidang pendidikan untuk Tahun 2018, yakni sebagai berikut :

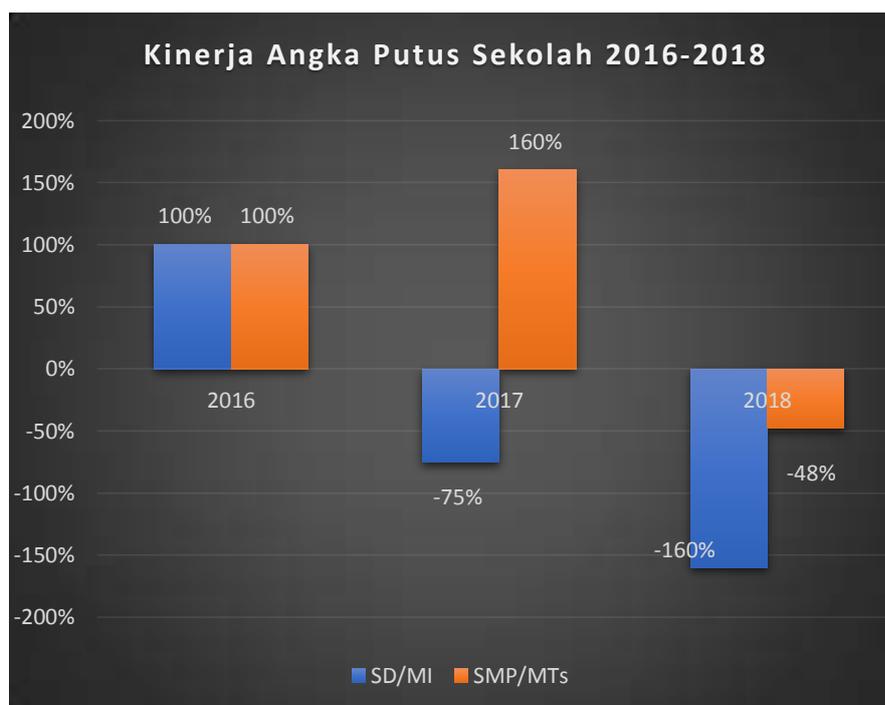
### a. Angka Putus Sekolah



Pada tahun 2018, Kabupaten Bone Bolango belum berhasil menekan angka putus sekolah bahkan cenderung menurun. Untuk tingkatan SD/MI dari angka 0,33 pada realisasi Tahun 2017 menjadi 0,36 dengan target 0,10 pada Tahun 2018, sedangkan tingkatan SMP/MTs dari 0,06 pada realisasi Tahun 2017 menjadi 0,36 dengan target 0,145 pada Tahun 2018.

Capaian kinerja dengan indikator Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs selang Tahun 2016 -2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

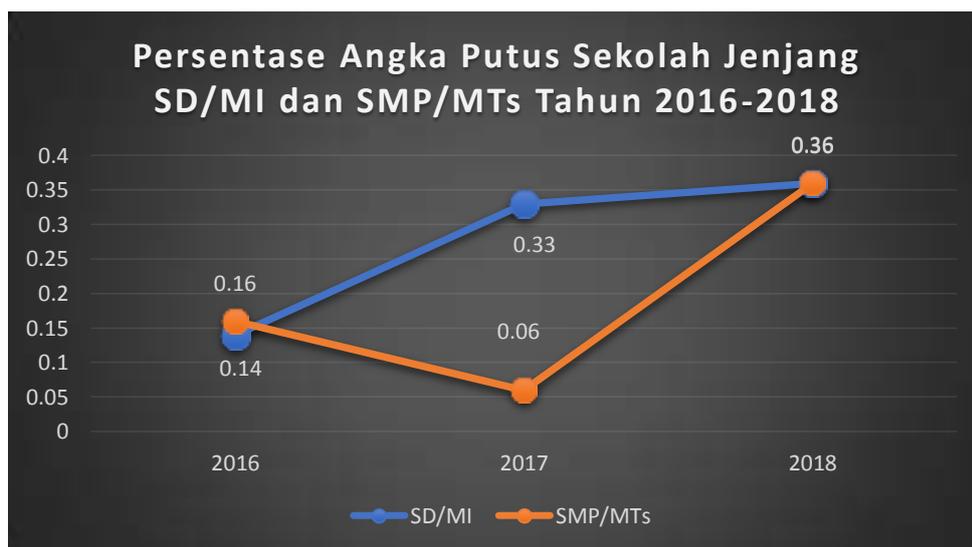
*Grafik 4.11 Capaian Kinerja Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2018*



*Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018*

Perkembangan Angka Putus Sekolah selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.12 Trend Persentase Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018

Dari jumlah total siswa SD/MI sebesar 18.470 siswa pada tahun 2018, yang putus sekolah sebanyak 61 siswa sedangkan dari jumlah total siswa SMP/MTs sebesar 18.470 siswa pada tahun 2018, yang putus sekolah sebanyak 61 siswa. Siswa putus sekolah umumnya masuk kategori miskin atau tidak mampu secara ekonomi.

#### b. Angka Partisipasi Kasar



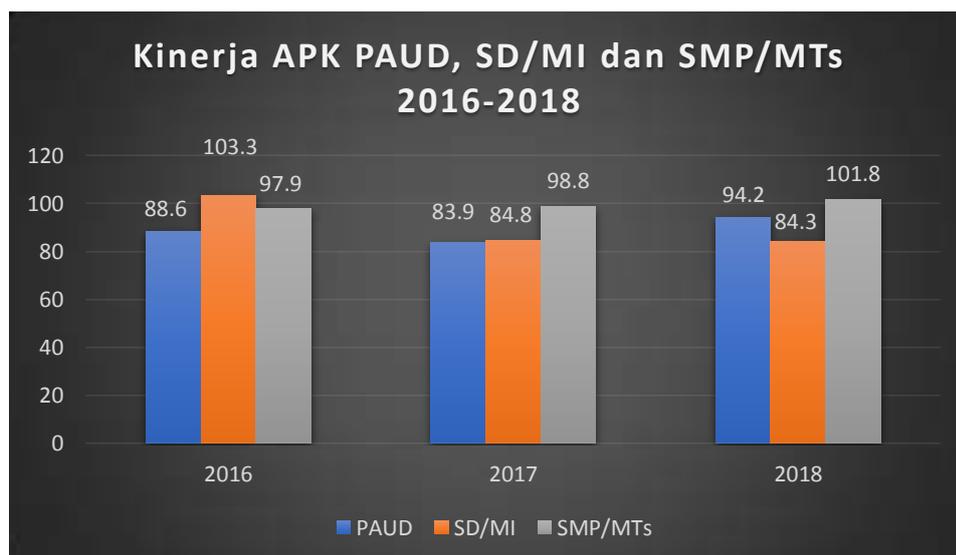
Pada tahun 2018, kinerja Angka Partisipasi Kasar PAUD mencapai 94,2% atau realisasi 54,61% dari 57,96% yang ditargetkan. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana capaian Angka Partisipasi Kasar

PAUD hanya sebesar 44,54 dengan kinerja 83,9%. Hal ini disebabkan oleh beberapa lembaga PAUD yang sudah mendapatkan bantuan dana operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kinerja Angka Partisipasi Kasar SD/MI pada Tahun 2018 mencapai 84,3 % turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 84,8% sedangkan realisasi pada Tahun 2018 mencapai 93,02 dari 110,38 yang di targetkan. Sedangkan kinerja Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs pada tahun 2018 mencapai 101,8% dengan realisasi sebesar 87,89 dari 86,34 yang di targetkan.



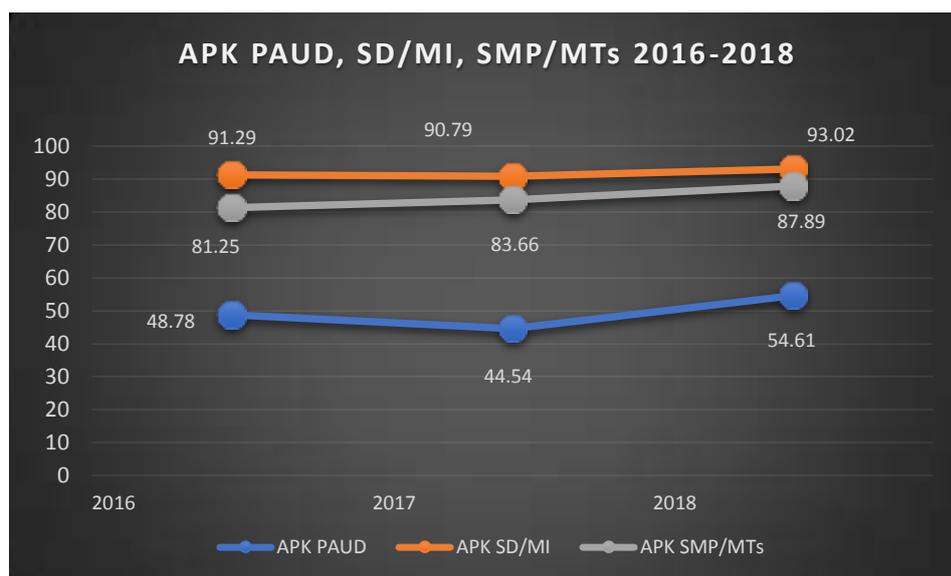
Grafik 4.12 Kinerja APK PAUD,SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018

Trend persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bone Bolango dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 4.13 APK PAUD,SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018

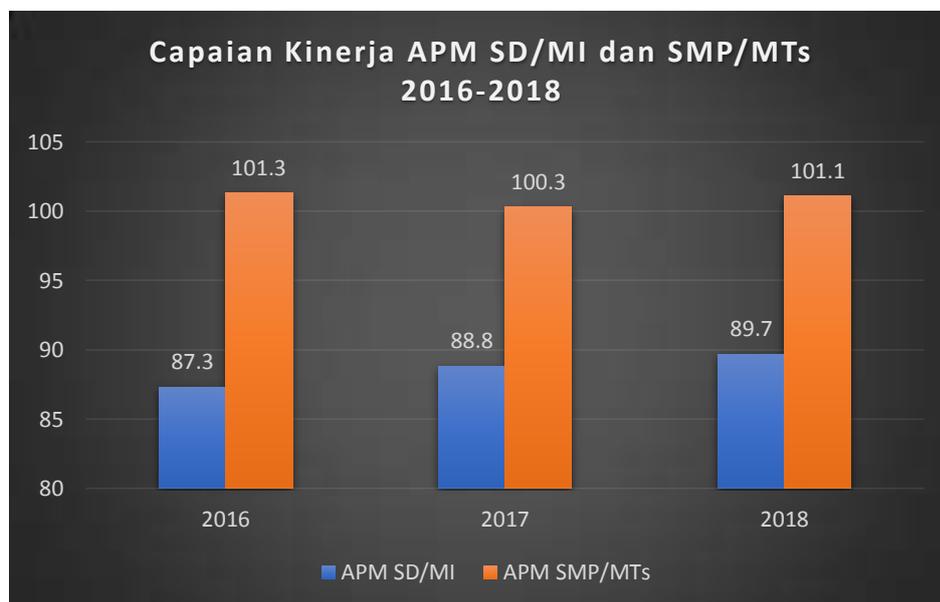
Persentase angka partisipasi kasar untuk PAUD pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 44,54% menjadi 54,61. Walaupun peningkatan ini tidak terlalu signifikan namun dapat memberikan gambaran bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan



anaknya di tingkat PAUD sangat besar. Angka partisipasi SD/MI pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 hanya sebesar 90,79 namun pada 2018 meningkat menjadi 93,02. Demikian pula dengan angka partisipasi kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari 83,66 pada tahun 2017 menjadi 87,89 pada tahun 2018

**c. Angka Partisipasi Murni**

*Grafik 4.14 Capaian Kinerja APM ,SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2018*



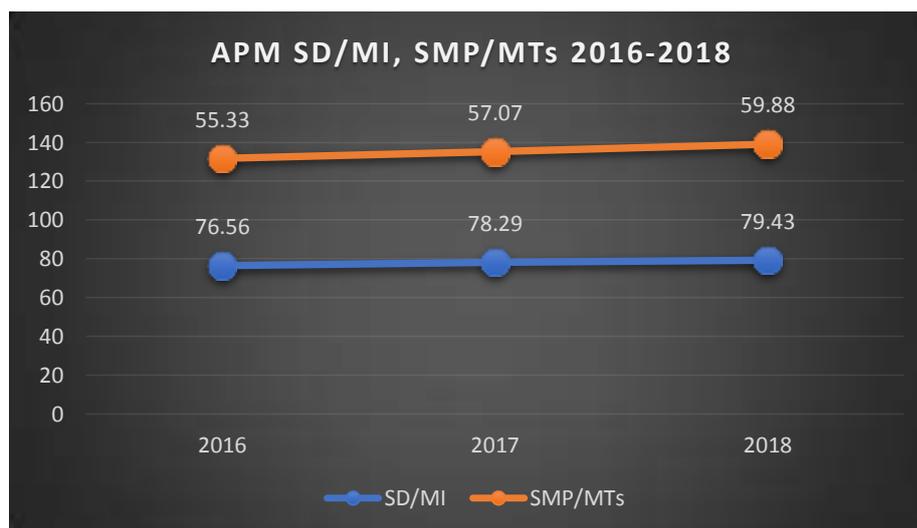
*Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk APM SD/MI meningkat dari 88,8% pada tahun 2017 menjadi 89,7% pada tahun 2018. Ini berarti bahwa program dan kegiatan berhasil dilaksanakan dengan baik. Untuk capaian kinerja APM SMP/MTs juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan yakni dari 100,3% pada tahun 2017 menjadi 101,1% pada tahun 2018.

Dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memberikan dampak pada persentase APM SD/MI dan SMP/MTs secara keseluruhan dimana persentase APM pada SD/MI sebesar 78,29 pada tahun 2017 meningkat menjadi 79,43% pada tahun 2018. Sedangkan untuk persentase APM SMP/MTs dari 57,07% pada tahun 2017 menjadi 59,88% pada tahun 2018. Trend Persentase APM SD/MI dan SMP/MTs selang tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 4.15 Persentase APM ,SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2016-2018



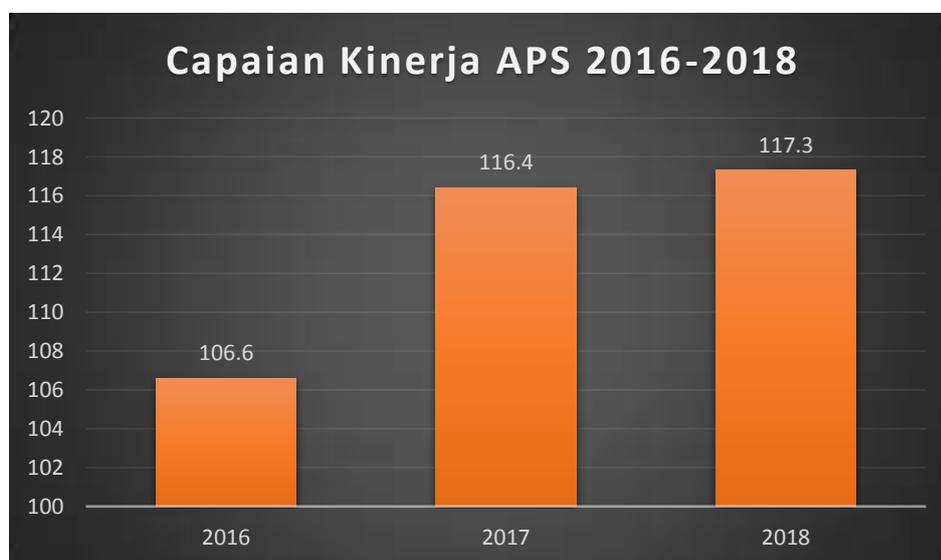
Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018

**d. Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Dari hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan pada tahun 2018 meningkat dibanding tahun 2017, dimana pada tahun 2017 hanya sebesar 116,4% meningkat menjadi 117,2%.

Hal ini dapat dilihat pada grafik capaian kinerja angka rata-rata lama sekolah selang tahun 2016-2018 dibawah ini

Grafik 4.16 Capaian Kinerja APS Tahun 2016-2018

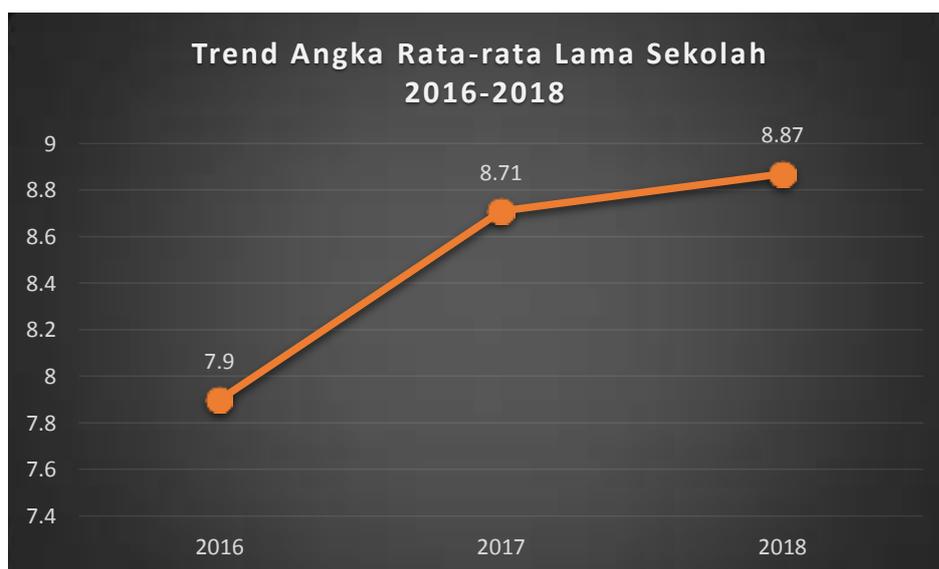


Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018



Impact yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 belum terlalu signifikan untuk menaikkan trend angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango, namun jika dilihat pada grafik trend dibawah ini, menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone Bolango selalu mengalami pertumbuhan.

Grafik 4.17 Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018

#### e. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya terhadap jumlah total penduduk 15 tahun keatas.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pendidikan pada tahun 2018, diperoleh capaian kinerja yang menurun 0,2 point menjadi 99,98% pada tahun 2017 dibanding pada tahun sebelumnya sebesar 100%. Hal ini dapat dilihat pada table capaian sejak tiga tahun terakhir dibawah ini.

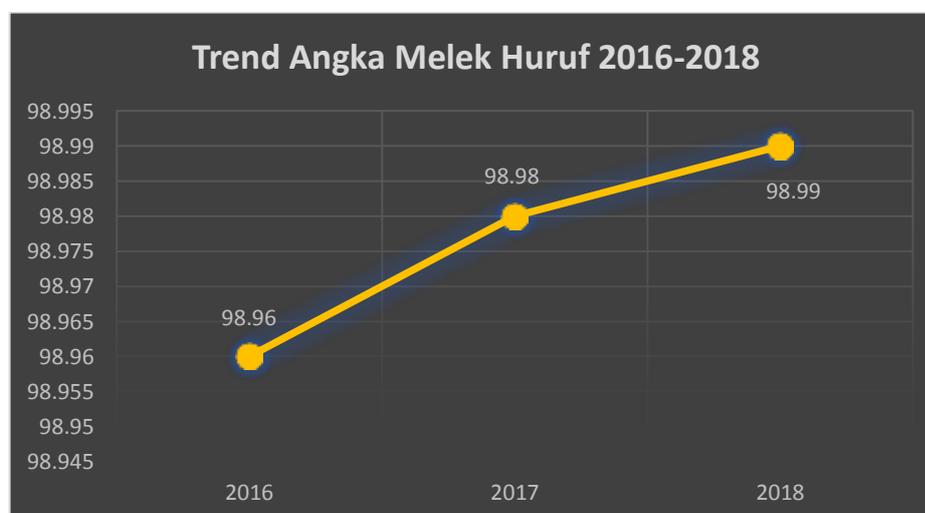


Grafik 4.18 Capaian Kinerja Angka Melek Huruf Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018

Grafik 4.19 Trend Angka Melek Huruf Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango 2018

Walaupun capaian kinerja untuk intervensi angka melek huruf melalui program dan kegiatan menurun, namun kontribusi program dan kegiatan tersebut secara keseluruhan meningkatkan trend angka melek huruf sebesar 0,1% dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2017 angka melek huruf Kabupaten Bone Bolango sebesar 98,98% namun pada tahun 2018 mencapai 98,99%.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan



- Adanya perubahan regulasi proses penagihan keuangan dari system tunai ke non tunai sangat mempengaruhi bidang-bidang dalam proses keuangan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran di bidang-bidang itu sendiri.
- Penempatan guru yang sering berubah tidak sesuai dengan SK awal penempatan
- Banyaknya regulasi baru menyangkut Pendidikan

**b. Solusi**

- Pentingnya sosialisasi dan pendampingan dari bagian keuangan
- Perlu adanya regulasi yang kuat yang mengikat tentang penempatan guru disetiap sekolah
- Pentingnya melaksanakan Forum Discussion Group (FHD) pada saat regulasi baru terbit.

**2. KESEHATAN**

Kebijakan pembangunan kesehatan pada tahun 2018 difokuskan pada peningkatan infrastruktur kesehatan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan sasaran dan strategi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021.

**A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan wajib Kesehatan dilakukan oleh tiga OPD yaitu Dinas Kesehatan, rumah Sakit Toto kabila dan Rumah Sakit Tombulilato yaitu mendapat alokasi anggaran dari APBD 2018 sebesar Rp. 153.446.201.882,44 yang terdiri dari Rp. 115.323.707.882,44 Belanja Langsung dan Rp. 38.122.494.000,00 Belanja Tidak Langsung dengan realisasi keuangan sebesar Rp.139.748.916.394,00,- atau 91,07% yang dialokasikan untuk program kegiatan sebagai berikut:

*Tabel 4.6 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan  
Tahun 2018*

1.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi data e-logistik kefarmasian</li> <li>• Pengadaan Obat sebanyak 508 Jenis</li> </ul>
2.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendistribusian alat kesehatan di 20 Puskesmas</li> <li>• Layanan non kapitasi JKN (layanan pemeriksaan kehamilan sebanyak</li> </ul>



	3 layanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kefarmasian sesuai standar di 20 Puskesmas</li> <li>• Pembentukan pokja desa/kelurahan sehat di 100 desa</li> </ul>
3.	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pengawasan apotik dan toko obat di 20 apotik/toko obat</li> </ul>
4.	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi obat bahan alam Indonesia</li> </ul>
5.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi dan informasi sadar hidup sehat di 3 media</li> <li>• Sosialisasi kawasan tanpa rokok di 3 sekolah</li> <li>• Peningkatan PHBS sekolah dalam mendukung GERMAS di 4 sekolah</li> </ul>
6.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil KEK selama 30 hari</li> <li>• Perawatan pasien di TFC sebanyak 20 pasien</li> <li>• Pengkaderan keluarga sadar gizi sebanyak 55 orang</li> </ul>
7.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian terhadap 60 depo air minum</li> <li>• Sosialisasi sanitasi total berbasis masyarakat di wilayah desa PAMSIMAS sebanyak 70 orang</li> </ul>
8.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervensi pemberantasan sarang nyamuk dan fogging focus di 100 desa</li> <li>• Pencegahan dan penanggulangan 6 jenis penyakit menular</li> <li>• Imunisasi Rubella di 43 sekolah</li> </ul>
9.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan</li> <li>• Evaluasi pengembangan standar pelayanan kesehatan</li> </ul>
10.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas sebanyak 7 jenis</li> <li>• Pengadaan alat kedokteran sebanyak 2 paket</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan 1 unit transfuse darah (UTD) Kabupaten</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas sebanyak 4 paket</li> </ul>
11.	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi kesehatan masyarakat sebanyak 159.134 peserta BPJS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dokter dan paramedic sebanyak 40 orang</li> </ul>
12.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan bagi petugas puskesmas untuk program layanan lanjut usia sebanyak 20 orang</li> </ul>
13.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertolongan persalinan ibu hamil dan keluarga tidak mampu sebanyak 45 orang</li> </ul>
14.	Program Bantuan Operasional Kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditasi puskesmas sebanyak 6 puskesmas</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan penanganan kasus kehamilan dan kelahiran resiko tinggi sebanyak 500 kasus</li> </ul>
15.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan ambulance/mobil jenazah sebanyak 1 unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan instalasi pengolahan limbah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan kamar jenazah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit</li> </ul>
16.	Program Peningkatan Kualitas Layanan BLUD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan BLUD</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA

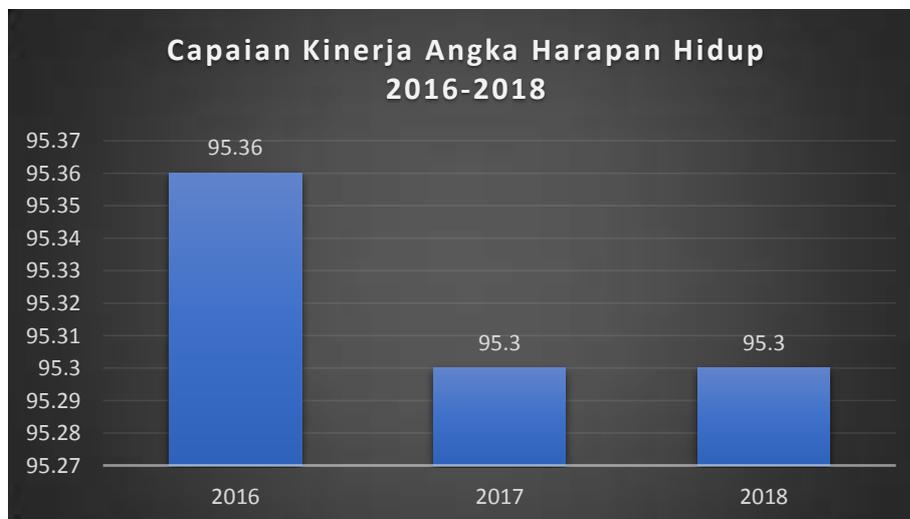
### a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Misalnya, angka harapan hidup umur sepuluh tahun, berarti rata-rata tahun kehidupan yang akan datang dijalani oleh mereka yang telah mencapai usia sepuluh tahun. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah atau negara.



Pada tahun 2018, capaian kinerja untuk angka harapan hidup mencapai 95,3% tidak berbeda dengan tahun sebelumnya dengan nilai persentase yang sama, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.20 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bone Bolango tercatat sebesar 67,71 sama dengan angka harapan hidup pada tahun 2017. Angka harapan hidup ini juga merupakan salah satu indicator dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.21 Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

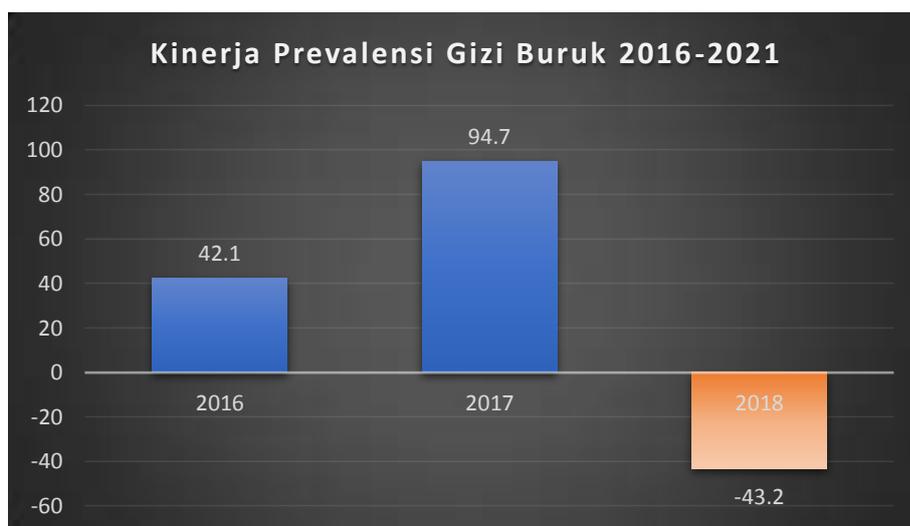


### b. Prevalensi Gizi Buruk

Capaian kinerja untuk penurunan prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 hanya mencapai - 43,2% atau menurun drastis dibandingkan pada tahun 2017 dan tahun 2016. Akan tetapi kinerja ini tidak mempengaruhi hasil prevalensi gizi buruk pada tahun 2018, dimana pada tahun ini nilai prevalensi gizi buruk di Kabupaten Bone Bolango turun menjadi 0,39 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 0,4%.

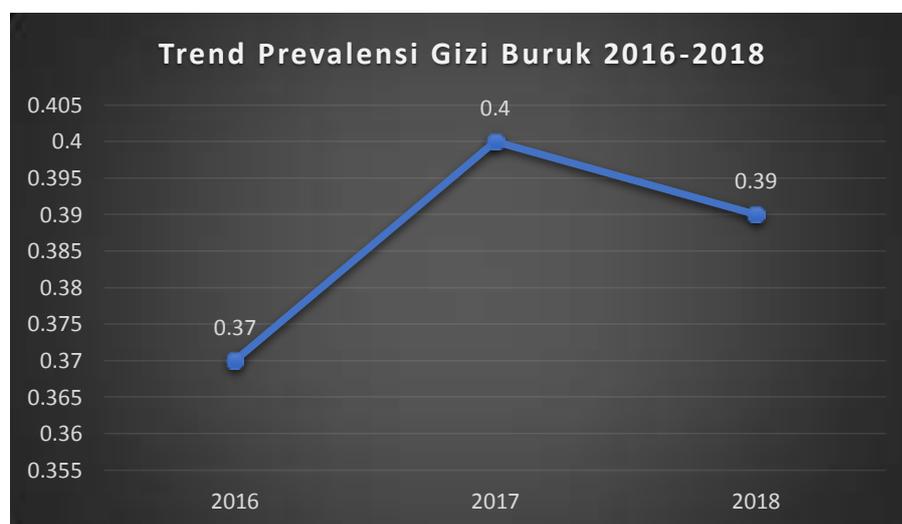
Kinerja dan trend prevalensi gizi buruk tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.22 Kinerja Pravelensi Gizi Buruk Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Grafik 4.23 Trend Pravelensi Gizi Buruk Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango



**c. Angka Kematian Bayi (per 1000 KLH)**

Angka kematian bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018, tercatat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan hanya sebesar 59,4%, dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2016 dan 2017 maka pada tahun 2018 terjadi penurunan kinerja. Hal ini harus menjadi perhatian bersama untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

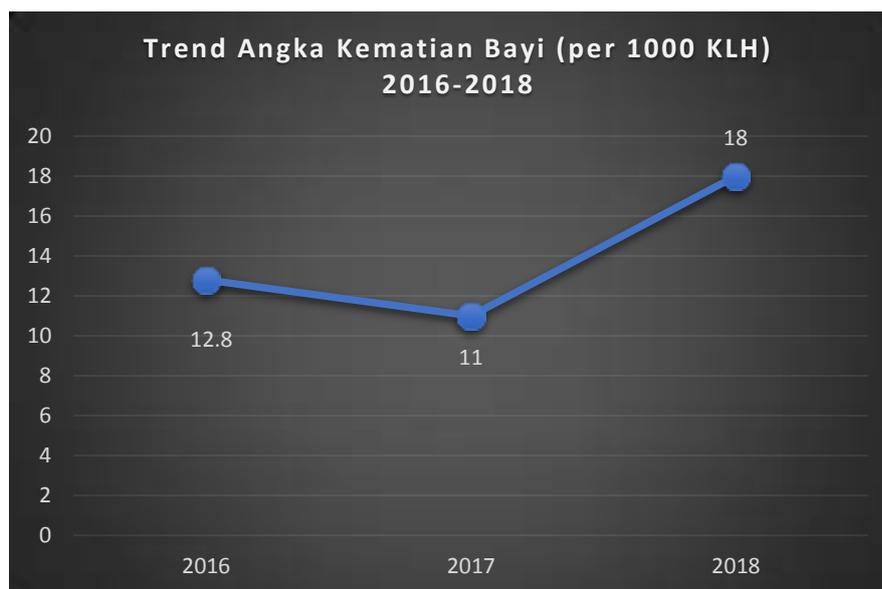
*Grafik 4.24 Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2018*



*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango*

Sedangkan untuk angka kematian bayi pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 18 kematian per 1000 kelahiran hidup. Kenaikan ini cukup signifikan dimana pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 12,8 per 1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2017 sebesar 11 kematian per 1000 kelahiran hidup. Trend angka kematian bayi tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.25 Trend Kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

**d. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH)**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain, per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu masih menjadi permasalahan yang berpengaruh pada kondisi derajat kesehatan di Kabupaten Bone Bolango. Penyebab kematian ibu antara lain akibat penyakit penyerta yaitu Pre Eklamsi Berat (PEB) Hipertiroid, plasenta previa, sepsis disertai hipoglikemi, jantung, serta eklamsi pasca melahirkan (nifas).

Wilayah kerja puskesmas yang terdapat kematian ibu yaitu di Puskesmas Kabila, Tapa, Bulango Selatan, dan Bone Pantai. Dengan jumlah kematian ibu terbanyak yakni di wilayah Puskesmas Kabila yaitu 3 kasus. Adapun kematian ini terjadi setelah ibu tersebut dirujuk ke rumah sakit.

Kinerja program untuk pencapaian sasaran Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 mencapai 157%, meningkat dibandingkan pada tahun 2016 dan tahun 2017.



Grafik 4.26 Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu ( Per100.000 KLH)  
Tahun 2016-2018

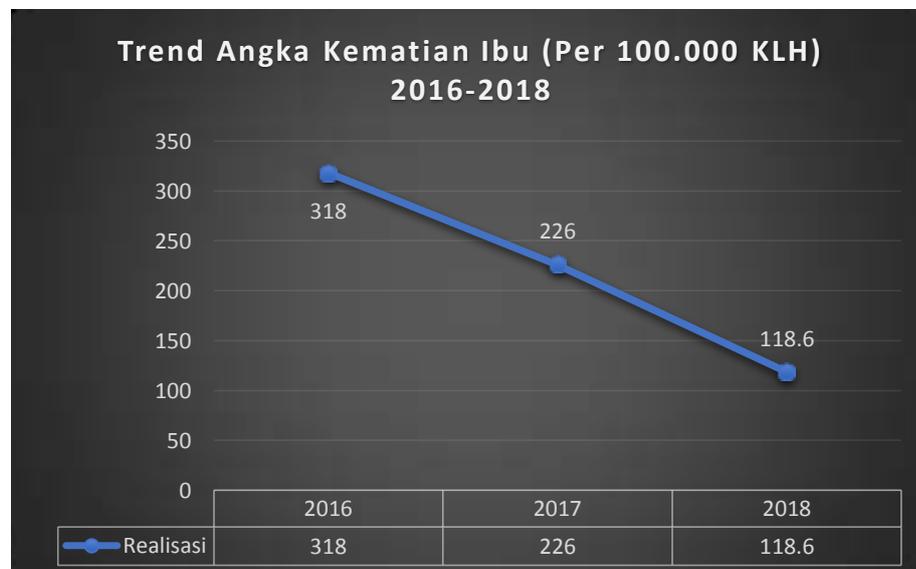


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Tahun 2018, AKI yang dicapai yakni 118,6 per 100.000 KLH atau 3 kasus kematian, dimana angka ini dibawah target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Angka ini juga mengalami penurunan dari tahun 2017, 226 per 100.000 KLH dimana terjadi 6 kasus kematian ibu.

Trend Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KLH) tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 4.27 Trend Angka Kematian Ibu ( Per100.000 KLH)  
Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango



**e. Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani dalam JKN**

Indikator kinerja cakupan masyarakat miskin yang terlayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang dibiayarkan oleh pemerintah.

Strategi meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018, kinerja untuk cakupan masyarakat yang terlayani JKN mencapai 99,4% lebih rendah dari kinerja pada tahun 2016 sebesar 101,8% pada tahun 2016 dan 100% pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini

*Grafik 4.28 Capaian Kinerja Cakupan Masyarakat yang terlayani JKN Tahun 2016-2018*



*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango*

Program JKN selain membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal juga membantu kegiatan operasional Puskesmas dalam menunjang kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.



Cakupan masyarakat miskin yang terlayani dalam JKN pada tahun 2018 sebesar 98,4% dari 66.615 total keseluruhan peserta JKN, dimana sebanyak 41,324 atau 62% dari total peserta merupakan peserta Jamkesta Provinsi dan 25.291 atau 38% dari total peserta merupakan peserta Jamkseda APBD Kabupaten Bone Bolango.

Adapun cakupan masyarakat yang terlayani JKN tahun 2016-2017 dapat dilihat pada grafik trend dibawah ini.

Grafik 4.29 Trend Cakupan Masyarakat yang terlayani JKN Tahun 2016-2018



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

Tabel 4.9 Jumlah Pasien yang Terlayani di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2018

TAHUN	Rawat Inap			Rawat Jalan		
	Pasien ASKESKIN	Pasien Umum	Jumlah	Pasien ASKESKIN	Pasien Umum	Jumlah
2016	7.456	729	8.185	4.603	5.843	10.446
2017	6370	644	7014	15563	5298	20.861
2018	71527	47429	118686	441	2030	2471

Sumber Data : RSUD Kabupaten Bone Bolango



*Tabel 4.10 Cakupan Layanan Kesehatan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci 2016-2018*

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2016	Capaian Kinerja 2017	Capaian Kinerja 2018
1.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	91.2	86.7	100
2.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	75.72	79.6	100
3.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	84.24	88.48	92
4.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100
5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	98.37	100	100
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	78.6	100	100
7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	2	3	100
8.	Cakupan kunjungan bayi (%)	80.8	79	75.2
9	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	13	12	18
10	Angka Kematian Ibu 100.000 kelahiran hidup	318	226	119
11	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	4	5	1
12	Penderita Gizi Buruk	57	56	114
13	Penderita Gangguan Jiwa	145	167	277

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango*



**Tabel 4.11**  
*Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Bone Bolango*  
*Tahun 2016 – 2018*

SARANA KESEHATAN	Tahun (unit)		
	2016	2017	2018
1. RS. UMUM	2	2	2
2. PUSKESMAS	20	20	20
3. PUSKESMAS KELILING	19	19	19
4. PUSKESMAS PEMBANTU	17	17	17
5. Pos Pelayanan Terpadu	206	204	215
6. Apotik	8	8	8
7. Toko Obat	1	3	4
8. Klinik / Praktek Dokter	13	14	17

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango*

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 terdiri dari 2 unit Rumah Sakit Umum, 20 Puskesmas serta 17 unit puskesmas pembantu dan terjadi penambahan Pos Pelayanan Terpadu menjadi 215 unit.

**Tabel 4.12 Daftar Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kesehatan**  
*di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2018*

No	Sarana Kesehatan	Tahun (unit)								
		2016			2017			2018		
		P	RR	RB	P	RR	RB	P	RR	RB
1.	RS. Umum									
2.	Puskesmas	0	0	8	1	0	1	1	0	0
3.	Puskesmas Keliling	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Puskesmas Pembantu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pos Pelayanan Terpadu									
6.	Apotik/ Toko Obat									

*Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango*



**Keterangan :**

P = Pembangunan/Pengadaan (satuan unit)

RR = Rehabilitasi Ringan (satuan unit)

RB = Rehabilitasi Berat (satuan unit)

*Tabel 4.13. Kondisi Sarana Kesehatan  
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2018*

No	Sarana Kesehatan	Tahun (unit)								
		2016			2017			2018		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	RS. Umum	2			2			2		
2.	Puskesmas	13	5	2	13	6	1	15	5	0
3.	Puskesmas Keliling	19			19			19		
4.	Puskesmas Pembantu	13	4		13	4		2		
5.	Pos Pelayanan Terpadu	206			204			215		
6.	Apotik/ Toko Obat									

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

*Tabel 4.14 Daftar Potensi Tenaga Kesehatan  
di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2018*

Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Per -Tahun (orang)		
	2016	2017	2018
1. Dokter Spesialis	25	7	7
2. Dokter Umum	20	25	14
3. Dokter Gigi	4	5	8
4. Perawat	226	101	117
5. Bidan	183	198	200
6. Dukun Anak	115	115	72
7. Ahli Kesehatan	64	59	52



Masyarakat			
8. Apoteker	8	6	4
9. Ahli Gizi	32	33	63
10. Analis Laboratorium	7	3	3
11. Ahli Rontgen	4	2	4
12. Mantri Kesehatan	0	0	0
13. Ahli Penyehatan Lingkungan	20	21	25
14. Bidan Desa	138	154	73

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Masih adanya petugas kesehatan yang belum memahami definisi operasional yang ada
- Petugas yang ada di beberapa puskesmas masih memiliki rangkap tugas sehingga keberhasilan program yang dipegang kurang maksimal
- Belum maksimalnya intervensi pengelola program dinas kesehatan pada kegiatan yang ada di setiap puskesmas
- Lemahnya sistem pengendalian intern, sehingga cenderung memperbesar terjadinya berbagai penyimpangan

### b. Solusi

- Memberikan Bimbingan Teknis kepada seluruh pengelola program tentang Definisi operasional dan arti pentingnya pencapaian SPM bidang kesehatan
- Memaksimalkan fungsi manajemen dalam peningkatan kinerja program baik di dinas kesehatan maupun di puskesmas
- Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan



### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi Kabupaten Bone Bolango yang kedua yaitu Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Desa sebagai Penopang Pertumbuhan Wilayah yang Berbasis Pelestarian Lingkungan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur perdesaan yang memberikan dukungan terhadap pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

#### A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah guna mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka menempatkan sektor pekerjaan umum sebagai sektor yang strategis. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah Tahun 2018, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan alokasi anggaran pada APBD sebesar Rp.168.2111.477.244,56 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.342.741.848,00 atau 77,49%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.15 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018*

1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas SP.Bongoime - Poowo,Cs 2.221 Meter</li> <li>• Peningkatan Jalan Ruas SP.Bonedaa - Tulabolo,Cs 3.793 Meter</li> <li>• Peningkatan Jalan Ruas SP.Bandungun - Longglo,Cs 1.307 Meter</li> <li>• Peningkatan Jalan Ruas SP.Tulabolo – Pinogu 1 paket</li> <li>• Peningkatan Jalan Desa gintapi (lanjutan) 1.100 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemindahan jaringan Utilitas (tiang Telp,Tiang Listrik,PDAM) 1 paket</li> <li>• Pembangunan Jalan Desa Waolo (Lanjutan) 2.100 Meter</li> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Tingkohubu 316 Meter</li> <li>• Peningkatan Ruas Jalan Desa Bubeya 314 Meter</li> <li>• Peningkatan Ruas jalan Dusun II Desa Boludawa 315 Meter</li> <li>• Peningkatan Ruas Jalan Desa Bube Baru 314 Meter</li> <li>• Peningkatan Jalan Desa Ulantha (kompleks Perkantoran) 115 Meter</li> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Sp.1 Langge 125 Meter</li> <li>• Pemindahan Tiang Telkom 1 paket</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Sp.4 Jalan Desa Duano 325 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas SP. Bube - Bulotalangi,Cs 2.293 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas SP. Danau Perintis - Lombongao,Cs 977 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas SP. Monano,Cs 6.468,5 meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Lomaya - Kopi - Bulango Ulu,Cs 2.037 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Sp. Helumo Perintis 524 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Dunggala – Lomaya 274 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Sp. Talumopatu - Bulotalangi Barat 308 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Desa Butu 340 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Sp. Duano – Alale 524 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Sp.Kramat – Lomaya 256 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Sp. Huluduotamo - Ulantha (Depan Pu) 320 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Desa Lingkar Desa Bunuo 345 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Sp.3 Desa Boludawa 234 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jalan Ruas Bongopini – Tunggulo 405 Meter</li> </ul>
2.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Drainase Desa Dunggala 1 Paket</li> </ul>
3.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab Tanggul belakang kantor camat bulango utara 85 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkuatan tebing sungai butaiyo desa suka Makmur 54,49 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab saluran pembuang desa berlian 173 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkuatan tebing sungai Polanggua 88 Meter</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkuatan tebing desa ilohuuwa 133 Meter</li> </ul>
4.	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan jalan dan jembatan 1 paket</li> </ul>
5.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Saluran Pembuang dan Pembawa Desa Lomaya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Irigasi Tapila Toluwaya-Huntu Barat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jaringan Irigasi Pinogu 600 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jaringan Irigasi Tunggulo 65 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jaringan Irigasi Perintis 170 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jaringan Irigasi DI Butaiyo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jaringan Irigasi DI sambapuga</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Irigasi Longalo 110 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Irigasi Langge 110 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Irigasi Ilomata 100 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemabangunan Irigasi Gintapi 150 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab Jaringan Irigasi Posolo 55 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Jaringan Irigasi Bongopini 120 Ha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Irigasi Dumaya 200 Ha</li> </ul>
6.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Pipa SR Kelurahan Pauwo Kec. Kabila 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi SPLAD-T Skala Permukiman Desa Oluhuta Kec. Kabila Bone 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi SPLAD-T Skala Permukiman Desa Ilohuwa Kec. Bone 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Pipa SR Desa Dutohe Kec. Kabila 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan Pipa SR Desa Tanggilingo Kec. Kabila 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SPALD Terpusat Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SPALD Terpusat Desa Bulotalangi Barat Kec. Bulango Timur 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SPALD Terpusat Skala Pemukiman Kel. Pauwo Kec. Kabila 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SPALD Terpusat Desa Bulotalangi Timur Kec. Bulango Timur 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan MCK++ Pesantren Hubulo Kec. Tapa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan MCK++ Pesantren Wirabakti Kec. Suwawa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SPALD Terpusat Skala Pemukiman Desa Bongohulawa Kec. Tilongkabila 50 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SPALD Terpusat Desa Moutong Kec. Tilongkabila</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan SPALD Terpusat Skala Pemukiman Desa Lonuo Kec. Tilongkabila</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sanitasi Komunal Kec. Suwawa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sanitasi Komunal Kec. Suwawa Selatan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Sanitasi Komunal Kec. Suwawa tengah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi SPAM IKK Longalo Untuk Desa Permata 8 SR</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi SPAM IKK Longalo Untuk Desa Bongoime 8 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi SPAM IKK Longalo Untuk Desa Berlian 6 SR</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi SPAM IKK Longalo Untuk Kelurahan Tumbihe 20 SR</li> </ul>
7.	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masterplan Riverside</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi RTRW</li> </ul>
8.	<b>Program Pengembangan Gedung Pemerintahan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan BPU Tapa – Bulango 1 Unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Rehab Kantor Bupati 1 Unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Halaman Auditorium 1 unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Ruang Arsip BKPD 1 Unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Ruang UGD Rumah Sakit Toto 1 Unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dan Pengembangan Yiladia 1 Paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Gedung PPMIB 1 Unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan BPU Tilogkabila 1 Unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Garasi Pemadam Kebakaran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Pemasangan Interior Gedung Auditorium 1 paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Bandayo 1 Paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pagar Kantor Camat Tapa 1 paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Parkir Sepeda 1 paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pagar Kantor Camat Kabila 1 paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan VIP Rumah Sakit Toto 1 Paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Auditorium 1 paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Islamic Center</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan BPU Taludaa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Halaman Bantayo 1</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehab Kantor Daerah 1 Paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Pemasangan Interior Gedung Auditorium</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
9.	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Drainase Desa Dunggala 1 paket 1 Paket</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Saluran Drainase Desa Suka Damai 1 Paket</li> </ul>



•	Rehabilitasi Drainase Desa Talumopatu 1 Paket
•	Pembangunan Drainase Jl.. BJ. Habibie I 1 paket
•	Pembangunan Drainase Desa Bongoime 1 paket
•	Pembangunan Sistem Draainase Desa Toto Utara-Selatan 1 Paket

## B. CAPAIAN KINERJA

Adapun hasil/outcome serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

### a. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

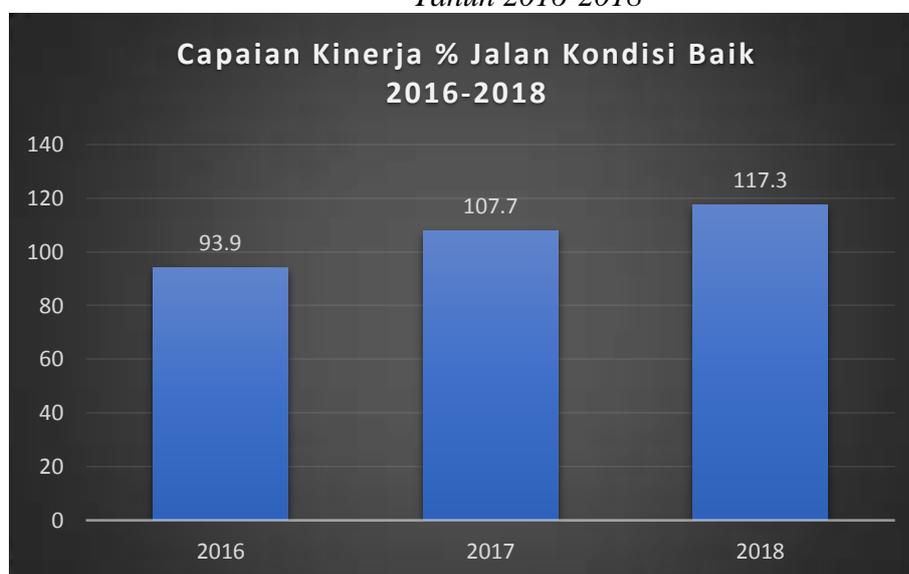


Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum melalui Program Kegiatan Tahun 2018 telah melaksanakan peningkatan jalan sebesar 27,954 km sehingga realisasi jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Bone Bolango mencapai 78,63% atau

sepanjang 297,424 km dari 342,71 km total keseluruhan jalan Kabupaten.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui bahwa kinerja untuk pencapaian sasaran persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 117,3%. Kinerja ini meningkat dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.30 Capaian Kinerja Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2016-2018*





Grafik 4.31 Panjang Jalan dan Persentase Jalan Kondisi Baik Tahun 2016-2018



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,16% menjadi 86,79% atau bertambah sepanjang 27,96 Km menjadi 297,424 Km.

**b. Jaringan Irigasi (Sekunder dan Tersier) dalam Kondisi Baik**

Untuk Jaringan irigasi (sekunder dan tersier) kondisi baik Tahun 2018 mencapai 1.359 Ha atau sebesar 73,38 % dari total luasan jaringan irigasi Kabupaten Bone Bolango seluas 1.852 Ha.

Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 terjadi peningkatan kinerja menjadi 165,7% dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2016 sebesar 98,8% dan tahun 2017 sebesar 106,3

Grafik 4.32 Capaian Kinerja Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2018





Jaringan irigasi (sekunder) kondisi baik tahun 2018 ditargetkan mencapai 76,5% yaitu sepanjang 7.650 meter kondisi baik dari total jaringan irigasi sepanjang 10.000 meter. Dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 kondisi Jaringan Irigasi yang kondisi baik sepanjang 12.672,5 meter atau sebesar 126,725 % dengan capaian kinerja sebesar 165,7 %. Sedangkan untuk luas jaringan irigasi sampai dengan tahun 2018 mencapai 1.359 ha, meningkat sebesar 1.117 ha seperti yang digambarkan pada grafik berikut:

*Grafik 4.33 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2018*



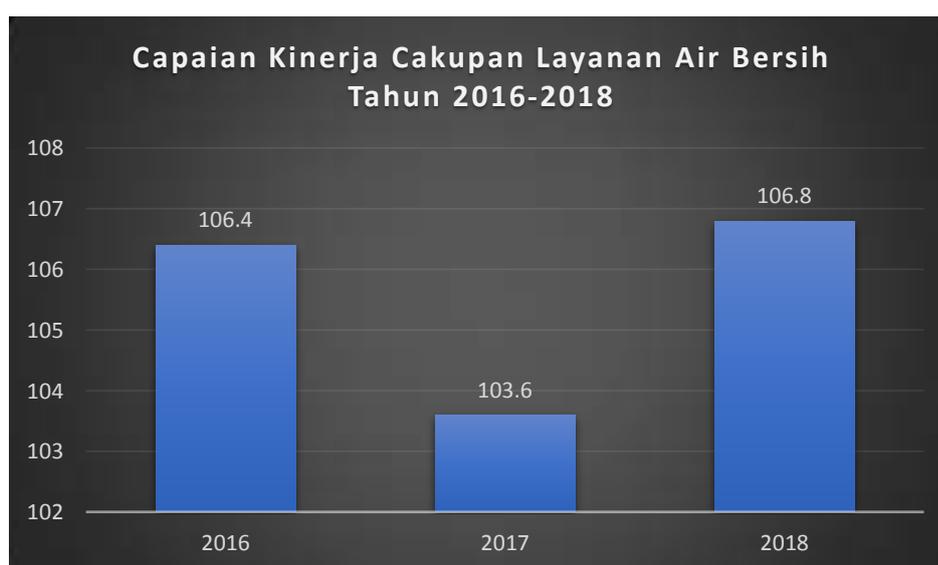
### c. Cakupan Layanan Air Bersih

Perkembangan cakupan layanan air bersih di Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2018 lebih di fokuskan pada pelayanan air bersih di perdesaan. Masyarakat yang terlayani air bersih pada Tahun 2018 sebanyak 3.050 jiwa jika diakumulasikan dengan capaian tahun sebelumnya yakni 35.885 jiwa pada Tahun 2017 maka total masyarakat yang terlayani air bersih sebanyak 38.935 jiwa atau 75,50 persen dari total masyarakat yang ada di perdesaan sebesar 51.570 jiwa. Pembangunan akses jaringan air minum ini melalui program PAMSIMAS di 20 desa dan penambahan jaringan perpipaan sebanyak 360 SR melalui dana APBD 2018.



Untuk layanan air bersih diperkotaan, PDAM Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pembangunan sambungan pipa perkotaan melalui program sambungan gratis bagi masyarakat Bone Bolango yang ingin melakukan penyambungan pipa kerumah. Adapun jumlah sambungan layanan air bersih yang tersambung pada Tahun 2018 melalui sambungan pipa perkotaan oleh PDAM sebanyak 3.938 SR sehingga total sambungan menjadi 18.303 SR. Adapun capaian kinerja Cakupan Layanan Air Bersih dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

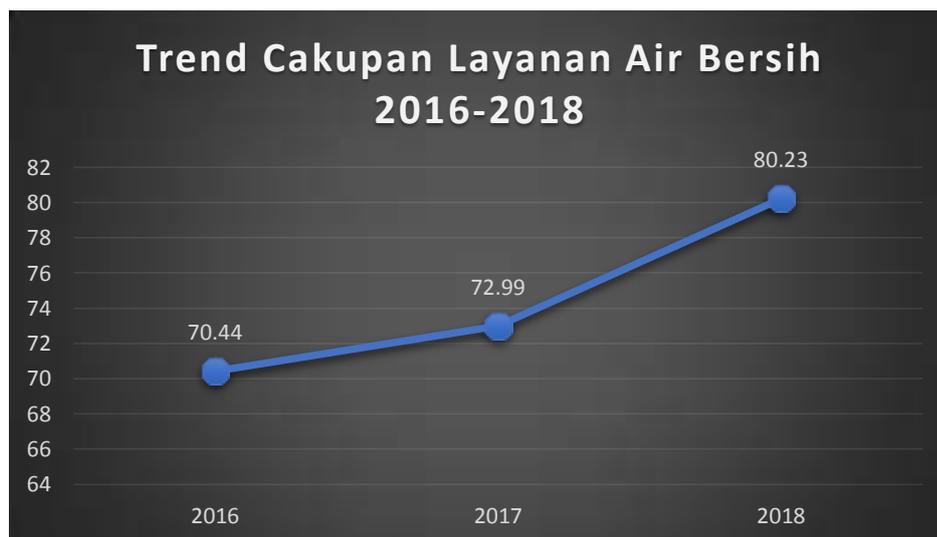
*Grafik 4.34 Capaian Kinerja Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2016-2018*



Kinerja dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 meningkat menjadi 106,8% dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2017 hanya sebesar 103,6% dan tahun 2016 sebesar 106,4%.

Impact dari kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat Bone Bolango, dimana pada tahun 2018 cakupan layanan air bersih mencapai 80,23% meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan persentase pada tahun 2016 sebesar 70,44% dan pada tahun 2017 sebesar 72,99%. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini

*Grafik 4.35 Trend Cakupan Layanan Air Bersih  
Tahun 2016-2018*



#### d. Sanitasi



Pembangunan akses sanitasi pada Tahun 2018 berjumlah 750 rumah tangga. Jika dijumlahkan dengan capaian sampai dengan tahun sebelumnya, dimana rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sampai dengan tahun 2017 sejumlah 18.635 rumah tangga, maka total rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sampai dengan tahun 2018 sejumlah 19.385 rumah tangga atau 55,50 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Bone Bolango sebesar 34.928 rumah tangga.

*Grafik 4.36  
Capaian Kinerja Sanitasi Yang Layak Tahun 2016-2018*



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran sanitasi yang layak terlihat menurun menjadi 89,52% dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 101,4% dan tahun 2016 sebesar 101,48%. Walaupun demikian, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 55,5% dibandingkan dengan persentase pada tahun 2017 sebesar 52,73% dan tahun 2016 sebesar 44,81%, hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.37  
Trend Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi  
Tahun 2016-2018*



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Dalam hal pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan menemukan beberapa kendala diantaranya kepemilikan tanah yang akan dibebaskan masih mengalami proses penyelesaian sengketa.
- Kegiatan pembangunan fisik yang belum sesuai rencana, dimana kendala dilapangan ditemukan bahwa banyaknya utilitas dibahu jalan yang digunakan untuk pelebaran, kondisi lokasi kegiatan yang sulit sehingga mobilisasi pekerjaan terhambat

### b. Solusi

- Negosiasi dalam pembebasan lahan



- Pembongkaran dan pemasangan utilitas harus masuk dalam paket pekerjaan.

#### 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

##### A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk tahun 2018 Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.580.758.652,32 dengan realisasi Rp. 6.432.064.568,00,- atau 97,60% yang dikelola oleh Dinas Perumahan rakyat, Kawasan pemukiman dan Pertanahan. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.16 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun 2018*

1.	Program Pengembangan Perumahan	
	•	Pengadaan bahan baku bangunan sanitasi hunian pantas bagi MBR sebanyak 35 unit (APBD)
	•	Rumah layak huni 280 Unit (APBN BSPS)
2.	Program Pengembangan Pemukiman	
	•	Penyusunan perda penyelenggaraan permukiman
	•	Penanganan Kawasan kumuh di 2 desa
	•	Penanganan Kawasan perumahan permukiman sebanyak 2 paket
	•	Pematangan lahan lokasi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

##### B. CAPAIAN KINERJA

###### a. Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat

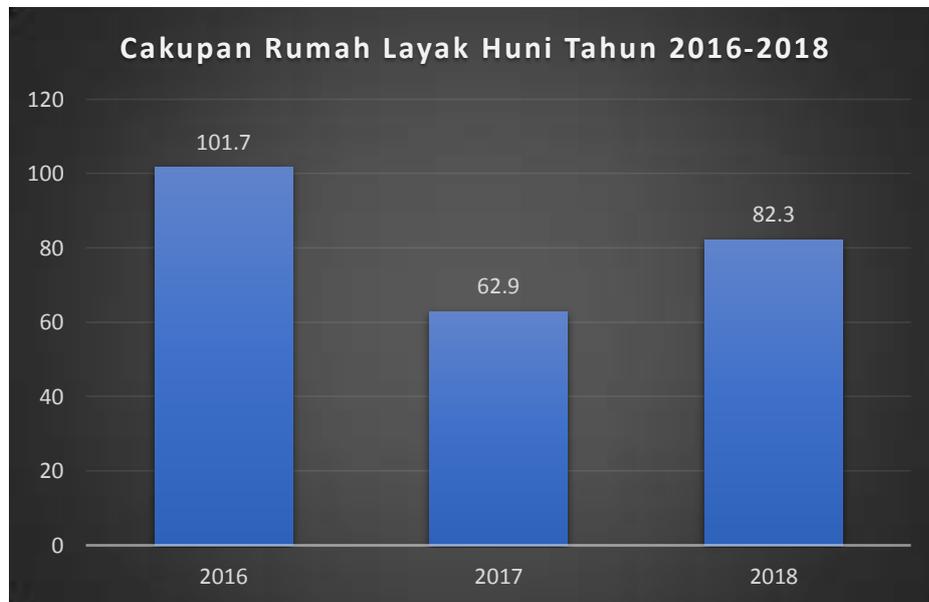
Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Perumahan dan Pertanahan telah melakukan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 365 unit rumah yang menggunakan dana APBN sebanyak 280 unit rumah dan dana APBD sebanyak 85 unit rumah. Sedangkan jumlah rumah yang dibangun menggunakan dana desa sebanyak 361 melalui program Hunian Pantas.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi kinerja pada tahun 2018 mencapai 82,3% lebih tinggi dari realisasi kinerja pada tahun 2017



sebesar 62,9% namun lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 101,7%. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.38 Capaian Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni Tahun 2016-2018*



Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan sebesar 82,3% dibandingkan tahun 2017 sebesar 64,57% dan tahun 2016 sebesar 48,14%. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.39 Trend Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Tahun 2016-2018*



Adapun jumlah total rumah layak huni yang telah dibangun sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.17 Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Tahun 2016-2018*

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2016-2018		
	2016	2017	2018
Cakupan Rumah layak huni bagi masyarakat	26.044	20.921	21.647

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 3 Huruf f yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni dan terjangkau” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan pasal 24 huruf a bahwa yang dimaksud dengan “rumah yang layak huni” adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Ukuran standar kecukupan minimal luas bangunan rumah yang dimaksud adalah luas lantai perkapita sebesar 7,2 meter per segi.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Permen PUPR No. 13 Tahun 2016 jumlah total rumah yang tersebar di di seluruh Kecamatan sebanyak 33.523 unit. Jumlah rumah layak huni sebanyak 21.647 unit dan rumah tidak layak huni 17.626 unit. Rendahnya kinerja rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango disebabkan adanya Perubahan Peraturan Menteri PUPR dimana pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2016 menyebutkan bahwa rumah yang rusak ringan tidak lagi termasuk dalam kategori rumah layak huni, sehingga jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 jika menurut Permen PUPR Nomor 39 Tahun 2015 yang berjumlah 27.222 rumah berkurang menjadi 16.841 rumah. Untuk lebih jelasnya sebaran rumah layak huni perkecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18 Rekapitulasi Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni  
Kabupaten Bone Bolango

NO	KECAMATAN	JUMLAH SELURUH RUMAH	JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
1	2	3	4	5
1	Tapa	1634	1103	1123
2	Kabila	4778	4008	3634
3	Suwawa	2487	1997	1488
4	Bone Pantai	2117	1313	786
5	Bulango Utara	1800	1009	901
6	Tilongkabila	3488	2760	2182
7	Botupingge	1348	628	662
8	Kabila Bone	2515	1465	971
9	Bone	2140	1186	639
10	Bone Raya	1625	812	718
11	Suwawa Timur	1198	536	532
12	Suwawa Selatan	1180	640	365
13	Suwawa Tengah	1471	1015	644
14	Bulango Ulu	934	376	95
15	Bulango Selatan	1963	1405	1372
16	Bulango Timur	1186	635	548
17	Bulawa	1173	598	472
18	Pinogu	466	161	94
<b>TOTAL</b>		<b>33.523</b>	<b>21.647</b>	<b>17.626</b>

**b. Persentase MBR yang Memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni**

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 diperoleh realisasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memperoleh fasilitas rumah layak huni hanya sebesar 315 rumah, meningkat sedikit jika dibandingkan dengan fasilitas rumah layak huni pada tahun 2017 sebesar 305 rumah. Sedangkan pada tahun 2016 fasilitas rumah layak huni sebanyak 730 rumah. Bantuan fasilitas ini berupa bahan bangunan rumah yang diserahkan langsung kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

*Grafik 4.40*  
*MBR yang memperoleh Fasilitas Rumah Layak Huni*  
*Tahun 2016-2018*



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Rendahnya kinerja rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango disebabkan adanya Perubahan Peraturan Menteri PUPR dimana pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2016 menyebutkan rumah yang rusak ringan tidak termasuk lagi dalam kategori rumah layak huni, sehingga jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017 jika menurut Permen PUPR Nomor 39 Tahun 2015 yang berjumlah 27.222 rumah berkurang menjadi 21.647 rumah
- Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang responsive (sehat, Aman, Harmonis dan Berkelanjutan)

### b. Solusi

Solusi yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah adalah harus memberikan bantuan secara utuh untuk pembangunan rumah, bukan hanya berupa bantuan stimulant. Karena jika hal ini bisa diwujudkan maka dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango yaitu 160 desa maka setiap tahun bisa menyediakan rumah sebanyak 160 rumah Hunian Pantas utuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah di setiap desa di Kabupaten Bone Bolango.



Dengan harapan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## 5. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2018, anggaran untuk urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dialokasikan sebesar Rp.9.550.553.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.435.197.459,00

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

*Tabel 4.18 Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018*

1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
	•	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
	•	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
	•	Pengendalian keamanan lingkungan
2.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
	•	Pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
	•	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
	•	Pelatihan Aparat Polisi Pamong Praja sebanyak 600 orang
3.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
	•	Pelatihan personil Damkar sebanyak 25 orang
	•	Pencegahan bahaya kebakaran
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
	•	Pembinaan Forum Pembaruan Kebangsaan
	•	Pemantauan dalam rangka peningkatan rasa solidaritas dan ikatan



		social di masyarakat
	•	Penyuluhan/sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai luhur budaya
5.		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	•	Penyuluhan/sosialisasi tim terpadu penanganan konflik sosial
6.		Program Pendidikan Politik Masyarakat
	•	Penyuluhan budaya dan etika politik
	•	Penyusunan database partai politik, LSM dan Ormas
	•	Penyuluhan peraturan UU Pemilu kepada masyarakat
7.		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat
	•	Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama
	•	Sosialisasi pencegahan praktek prostitusi, judi, miras dll
8.		Program Ketahanan Ekonomi
	•	Dialog Ketahanan Ekonomi
	•	Pemantauan ketahanan ekonomi
9.		Program Darurat dan Logistik
	•	Makan minum petugas pencarian orang hilang/hanyut
	•	Bufferstock untuk korban bencana alam

## B. CAPAIAN KINERJA

Capaian urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2018 adalah penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah sebanyak 34 kasus yaitu Perda Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Lepas dan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pada pelanggaran ketertiban umum sebanyak 13 kasus yang ditangani yang terdiri dari razia balap liar, Razia kost-kostan, tempat hiburan malam dan pengguna miras.

Dalam penanganan bencana, sebanyak 30 bencana kebakaran yang berhasil dipadamkan serta kesiagaan logistik pada bencana orang hilang/hanyut.



Dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat untuk kerukunan beragama dibentuk FKBU sebagai wadah pemersatu antar umat beragama. Selain itu pelaksanaan hari-hari besar keagamaan menjadi keluaran dari program-program strategis yang dilaksanakan pada urusan ini.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang kesatuan bangsa adalah

- Belum optimalnya pembinaan Sumberdaya aparatur dengan tugas khusus (intelijen) dirasakan masih kurang secara kualitatif dan kuantitatif sehingga pelaksanaan tugas SKPD belum maksimal.
- Belum lancar dan optimalnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga informasi dan isu-isu aktual tentang keadaan sosial politik daerah kurang memadai.

### b. Solusi

Adapun yang menjadi solusi atas permasalahan di atas adalah

- Meningkatkan implementasi menyangkut beberapa kegiatan yang dapat disinergikan seperti sosialisasi Pilkades, Koordinasi Penanganan Masalah Strategis, Sosialisasi Bahaya Pornografi Pornoaksi, Komunitas Intelijen Daerah, Pembinaan dan Pendidikan Politik Masyarakat
- Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait melalui wadah Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam bentuk rapat koordinasi dan rapat berkala
- Mengusulkan perubahan ketentuan tentang standar bantuan yang dapat diberikan oleh daerah untuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) kepada Mendagri.
- Butuh keseriusan dari aparat penegak Perda untuk menindak tegas para pelanggar peraturan

## 6. SOSIAL

Urusan sosial pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



## A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran yang telah dialokasikan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 9.502.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.178.183.526,00,00 atau capaian anggaran sebesar 96,58%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

*Tabel 4.19 Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018*

1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan teknis LK3 dan TSKK 18 orang</li> <li>• Bantuan stimulan KUBE kepada 100 orang penerima</li> </ul>
2.	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian bantuan kepada 1000 anak yatim</li> <li>• Pemberian bantuan kepada janda miskin sebanyak 793 orang</li> <li>• Pemberian bantuan kepada lansia sebanyak 761 lansia</li> <li>• Pemberian 10 kursi roda kepada disabilitas</li> <li>• Pemberian 5 alat pendengar kepada disabilitas tuna rungu</li> <li>• Pemberian tongkat bagi 5 disabilitas tuna netra</li> <li>• Verifikasi dan validasi data PBI/JKN/PMKS</li> <li>• Sosialisasi Kampung Siaga Bencana (2 kampung siaga)</li> <li>• Bantuan UEP lanjut usia</li> <li>• Bantuan UEP anak cacat</li> </ul>
3.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi 10 Karang Taruna</li> <li>• Pemberdayaan 1000 orang fakir miskin</li> <li>• Pemberdayaan veteran sebanyak 2 orang</li> <li>• Pemberdayaan janda veteran sebanyak 2 orang</li> <li>• Santunan keluarga pahlawan sebanyak 2 orang</li> <li>• Bantuan kesejahteraan berbasis masyarakat kepada 6 kelompok</li> </ul>



4	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkuatan tebing sungai desa Mamungaa Timur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Normalisasi sungai desa Modelomo</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA

Jumlah PMKS saat ini mencapai 3.982 PMKS. Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui urusan sosial memberikan intervensi pada masyarakat miskin melalui pemberian KUBE/UEP. Selain itu juga dilakukan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya. Pelaksanaan festival anak yatim menjadi hasil dari Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Pembentukan kampung siaga bencana di Kecamatan Suwawa Timur serta pemberian bantuan untuk karang taruna.

Pada tahun 2018 pembeatan dan sunat masal yang diikuti oleh 200 orang untuk beat masal dan 200 orang untuk sunat masal dimana seluruhnya adalah anak yatim dan anak yatim piatu selain itu keseluruhan anak-anak itu diberikan perlengkapan sekolah berupa tas dan sepatu. Hari anak yatim pada Tahun 2018 dihadiri oleh 1000 anak yatim yang ada di Kabupaten Bone Bolango

Untuk intervensi pemerintah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, diberikan bantuan kepada 100 orang berupa bantuan untuk warung kecil, kantin, penjual ikan, alat pangkas rambut, percetakan dan pembuatan kue. Untuk bantuan kepada para janda miskin diberikan bantuan berupa modal dagang kecil, kantin dan pembuatan kue yang jumlah keseluruhannya sebanyak 793 orang. Pemberian bantuan juga dilakukan terhadap 791 lansia serta bantuan kepada 20 orang penyandang disabilitas dan anak cacat.

### a. Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango terus menggalang kekuatan untuk menangani PMKS. Sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini yakni Pemberdayaan PMKS. Pada tahun 2018, rehabilitasi sosial untuk PMKS ditargetkan sebesar 2%, realisasi yang dicapai sebesar 2,66% dengan capaian 133%.

Adapun jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan social pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.20*  
*Jumlah PMKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial*  
*Tahun 2016-2018*

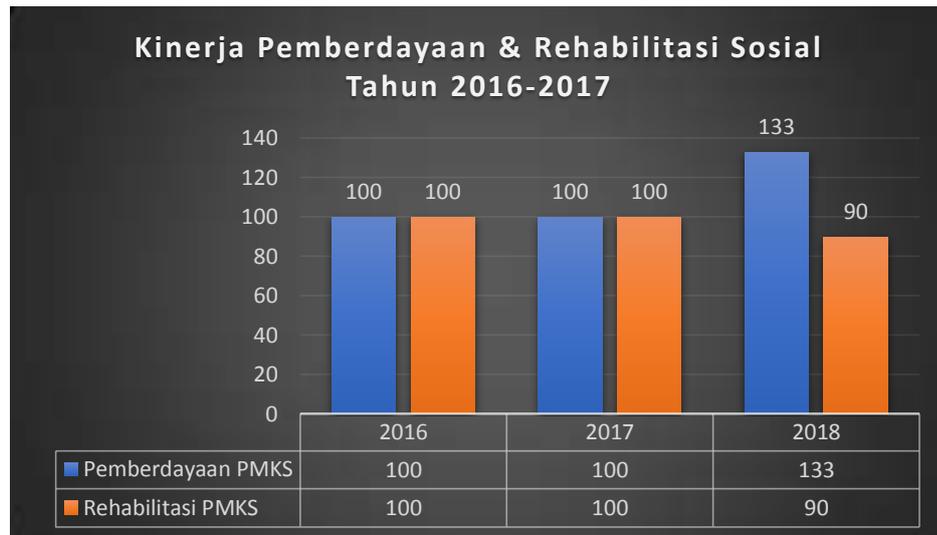
NO	Jenis PMKS	Jumlah yang diberdayakan	Jumlah yang seharusnya diberdayakan
1.	Fakir Miskin	100 orang	3.965 orang
2.	Veteran	2 orang	9 orang
3.	Janda Veteran	2 orang	6 orang
4.	Keluarga Pahlawan	2 orang	2 orang
<b>Jumlah</b>		<b>106 orang</b>	<b>3.982 orang</b>
<b>Persentase</b>		<b>2,66 %</b>	

**b. Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial**

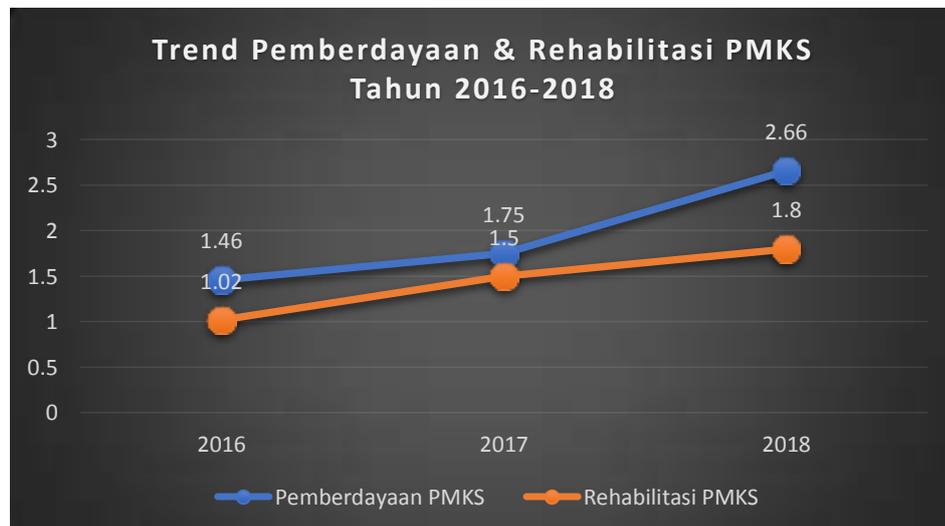
Penanganan penyandang cacat/disabilitas di Kabupaten Bone Bolango yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dirasakan belum optimal, hal ini terkendala oleh segi aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial harus disertai dengan proposal pengajuan bantuan sosial yang disampaikan satu tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial tidak dapat dengan leluasa memberikan bantuan sosial berupa alat bantu bagi penyandang cacat seperti kursi roda, hearing-aid, tongkat putih, dan sebagainya. Target rehabilitasi PMKS pada tahun 2018 sebesar 2 % dengan realisasi sebesar 1,80 % atau 20 dari 1.312 PMKS atau dengan pencapaian sebesar 90%. Capaian kinerja dan trend persentase pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS kurun waktu 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 4.41  
Kinerja Pemberdayaan & Rehabilitasi Sosial  
Tahun 2016-2017



Grafik 4.42  
Trend Pemberdayaan & Rehabilitasi PMKS  
Tahun 2016-2018



**c. Korban Bencana yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Pada Tahun 2018 terjadi bencana sosial yang terdiri dari kebakaran 5 unit rumah, rumah tertimpa pohon sebanyak 19 unit, bencana angin puting beliung terhadap 13 unit rumah dan korban banjir 1 unit rumah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berperan aktif dalam penyaluran bantuan korban gempa di Sigi dan Palu Provinsi Sulawesi Tengah.



Selain itu, pada Tahun 2018 telah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana seperti pekuatan tebing dan normalisasi sungai di daerah yang terdampak bencana.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Jumlah PMKS yang semakin tinggi karena permasalahan sosial yang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih optimal lagi.
- Kurangnya pemahaman akan diri sendiri oleh penyandang cacat, sehingga tidak tahu apa potensi yang dimiliki dan bagaimana cara mengembangkannya serta stigma dalam masyarakat, memiliki anggota keluarga cacat merupakan aib, memalukan, menurunkan harkat dan martabat keluarga
- Belum optimalnya penyaluran bantuan bagi korban bencana yang disebabkan oleh prosedur pelayanan yang birokrasi, lambannya pencairan dana bantuan, letak geografi dan terisolirnya domisili korban, yang kurang didukung dengan infrastruktur yang memadai, sehingga penyaluran santunan dan bantuan kurang efektif, terbatasnya anggota tim yang terlibat dalam penanganan korban bencana alam, maka penyaluran bantuan kepada para korban bencana alam mengalami keterlambatan.

### b. Solusi

- Pemberdayaan mengandung makna adanya partisipasi seluruh sasaran pelayanan dan komunitas serta masyarakat pada umumnya. Pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan menggali kemampuan sasaran pelayanan, mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia dimasyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan dan bimbingan sosial serta pengembangan KUBE/UEP dan usaha kesejahteraan social.
- Memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas tentang potensi dirinya sendiri agar dapat mengembangkan diri serta dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan memberikan pemahaman serta mendorong keluarga agar dapat memberikan motivasi kepada anggota keluarganya yang menyandang disabilitas



- Agar penyaluran bantuan lebih efektif perlunya dilakukan pemangkasan jalur birokrasi dengan mengurangi pos-pos yang dianggap dapat menghambat proses penyelesaian bantuan, perlunya ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, perlu penambahan personil cadangan sehingga suatu saat jika anggota lainnya berhalangan dapat digantikan oleh anggota cadangan.

## B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

### 1. KETENAGAKERJAAN

#### A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang meliputi peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk urusan Tenaga Kerja pada tahun 2018 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.542.666.800,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 1.530.885.165,00,- atau 99,24%. Urusan tenaga kerja tersebut diarahkan untuk program dan kegiatan sebagai berikut:

*Tabel 4.21 Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2018*

1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</li> <li>• Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja</li> </ul>
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat</li> </ul>
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja</li> </ul>

#### B. CAPAIAN KINERJA

##### a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2017 meningkat 0,42 menjadi 4,70 dibandingkan Tahun 2016 sebesar 4,28. Dari



74.377 orang total angkatan kerja, tercatat bahwa pengangguran yang ada sebanyak 3.494 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.22*  
*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran*  
*Tahun 2017*

Jenis Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Angkatan Kerja</b> <b><i>Economically Active</i></b>	<b>48 953</b>	<b>25 424</b>	<b>74 377</b>
1. Bekerja <i>Working</i>	47 049	23 834	70 883
2. Penganggur <i>Unemployment</i>	1 904	1 590	3 494
<b>II. Bukan Angkatan Kerja</b> <b><i>Economically Inactive</i></b>	<b>7 772</b>	<b>31 953</b>	<b>39 725</b>
1. Sekolah <i>Attending School</i>	4 705	4 845	9 550
2. Mengurus Rumah Tangga <i>Housewife</i>	1 295	25 057	26 352
3. Lainnya <i>Others</i>	1 772	2 051	3 823
<b>Jumlah Total</b>	<b>56 725</b>	<b>57 377</b>	<b>114 102</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b> <b><i>Economically Active Participate Rate</i></b>	<b>86,30</b>	<b>44,31</b>	<b>65,18</b>
<b>Tingkat Pengangguran <i>Unemployment Rate</i></b>	<b>3,89</b>	<b>6,25</b>	<b>4,70</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bone Bolango

*Grafik 4.43*  
*Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2011 – 2017*



Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka diprediksi meningkat menjadi 5,53%. Hal ini dikarenakan adanya penajaman program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan rilis dari BPS Kabupaten Bone Bolango.

#### b. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Capaian kinerja pencari kerja pada Tahun 2018 sebesar 7,21%, menurun dibandingkan capaian pada Tahun 2017 bahkan lebih rendah dari kondisi Tahun 2015 sebesar 7,51%. Capaian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.44*  
*Persentase Pencari Kerja Tahun 2015 – 2018*



### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### a. Permasalahan

- banyaknya pencari kerja yang rata-rata memiliki pendidikan masih rendah yaitu SD dan SMP yang menyebabkan rendahnya ketrampilan yang mereka miliki sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan
- Sarana dan prasarana yang belum tersedia yaitu gedung Balai Pelatihan Kerja yang dapat menampung kegiatan pelatihan
- Belum optimalnya pembinaan bagi calon tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja



- Belum optimalnya kerja sama dengan pihak swasta dalam perekrutan tenaga kerja dalam daerah

**b. Solusi**

- Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui dinas terkait.
- Membenahi upah dan gaji tenaga kerja
- Membangun balai pelatihan kerja yang lebih memadai
- Pengoptimalisasikan pemnfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek proyek pemerintahan serta advokasi pada investasi swasta dalam pemanfaatan tenaka kerja lokal.
- Meningkatkan proyek-proyek padat karya utamanya yang dilaksanakan melalui APBDesa.
- Meningkatkan fasilitas dibidang industri dalam upaya penciptaan lapangan kerja
- Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola kekayaan alam daerah sehingga akan tecipta lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja

**2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Pada Tahun 2018, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 614.965.500 dengan realisasi 546.478.636,00 atau 88,86%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

*Tabel 4.23 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018*

1.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	• Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
2.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	• Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
3.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam



	pembangunan
•	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
•	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
•	Bantuan usah home industry kepada 16 kelompok

## B. CAPAIAN KINERJA

### a. Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak

Capaian kinerja penurunan kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak pada Tahun 2018 sebesar 94,8% menurun dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 169,28% dan Tahun 2016 sebesar 184,6%, hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.45

*Capaian Kinerja Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Hak-hak Perempuan dan Anak Tahun 2016 - 2017*



Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, diperoleh gambaran indikator kinerja persentase penurunan kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak tahun 2018 ditetapkan sebesar 29,10% sedangkan realisasinya sebesar 30,61% atau penurunan kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak sampai tahun 2018 sebesar 15 kasus dari 49 kasus dengan persentase kinerja sebesar 94, 8% dengan kategori Sangat Tinggi. Meski konsekuensi hukumannya cukup berat, dan pemerintah maupun masyarakat sipil di



Kabupaten Bone Bolango pun telah bekerja keras mengatasinya dengan menghabiskan dana serta sumber daya lainnya, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah justru terus terjadi. Sepertinya para pelaku kekerasan itu tidak takut sedikit pun. Untuk lebih jelasnya persentase penurunan kasus dan jumlah kasus pelanggaran hak-hak perempuan dan anak tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.

*Grafik 4.46*  
*Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran*  
*Hak-hak Perempuan dan Anak Tahun 2016 - 2018*



*Tabel 4.24*  
*Jumlah Kasus Pelanggaran hak anak dan hak perempuan*  
*Tahun 2015 2018*

Uraian	2015	2016	2017	2018
Kasus pelanggaran hak anak	50 kasus	57 kasus	46 kasus	40 kasus
Kasus pelanggaran hak perempuan	84 kasus	107 kasus	57 kasus	9 kasus
<b>Total</b>	<b>134 kasus</b>	<b>164 kasus</b>	<b>103 kasus</b>	<b>49 kasus</b>

**b. Persentase Perempuan yang Menduduki Jabatan Publik**

Pada Tahun 2018 ditargetkan persentase perempuan yang menduduki jabatan publik adalah 23,73% atau sebanyak 601 pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari total pegawai perempuan yang berjumlah 2534 orang,



namun yang terealisasi sebesar 12,32% atau 312 pegawai perempuan dengan persentase kinerja sebesar 51,9%. Capaian kinerja dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.47*  
*Capaian Kinerja Perempuan yang menduduki Jabatan Publik*  
*Tahun 2016 - 2018*



Sedangkan persentase perempuan yang menduduki jabatan publik kurun waktu 2016-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini

*Grafik 4.48*  
*Persentase Perempuan yang menduduki Jabatan Publik*  
*Tahun 2016 - 2018*





### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### a. Permasalahan

- Masih rendahnya pendidikan dan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dilingkungan keluarga
- Dominasi orang tua terhadap anak sehingga mengakibatkan pola asuh yang salah
- Efek dari tayangan media elektronik, sosial media yang menyajikan kekerasan yang mempengaruhi kejiwaan.
- Hambatan dari diri perempuan sendiri yang selalu terikat pada peran domestic yang memainkan peran ganda yakni sebagai wanita karir sekaligus istri dan ibu rumah tangga.

#### b. Solusi

- Perlu diadakan sosialisasi yang mendalam tentang dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatkan kepesertaan keluarga berencana
- Meningkatkan dan menggiatkan peran keagamaan dalam penanganan moral kepada masyarakat.
- Peningkatan kompetensi dan daya saing ASN perempuan
- Penambahan pengalaman kerja bagi ASN perempuan melalui pemberian tanggung jawab pekerjaan maupun jabatan.

### 3. PANGAN

Urusan wajib pangan diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango

#### A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran untuk urusan pangan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 3.113.428.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.072.139.483,00 atau mencapai 98,67%.

Program dan kegiatan yang difokuskan untuk urusan pangan antara lain :

*Tabel 4.25 Program dan Kegiatan Urusan Pangan Tahun 2018*

1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
	•	Bantuan Kios Pangan di 21 Kios Pangan
	•	Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)/toko tani indonesia



	•	Pengembangan Lembaga distribusi pangan masyarakat
	•	Lumbung pangan masyarakat
	•	Pengembangan desa mandiri pangan
	•	Pemberdayaan gapoktan sebanyak 2 kelompok
2.		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	•	Pelaksanaan lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman
	•	Keikutsertaan dalam Hari Pangan Sedunia

## B. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2018 dibuat suatu analisis tentang pangan di Kabupaten Bone Bolango oleh Dinas Pangan. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan bahwa Angka kecukupan gizi terdapat di 38 desa yang termasuk dalam kategori rawan pangan berat, 9 desa rawan pangan ringan, dan 118 desa tahan pangan. Pola Pangan Harapan dapat diungkapkan bahwa terdapat 6 kelompok bahan makanan dalam kondisi deficit, yakni umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah-buahan.

Rumah Tangga Rawan Pangan (RTRP) berjumlah 11.432 dan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Bone, Bonepantai dan Tilongkabila. Pangan yang berkontribusi terhadap inflasi adalah cabe, tomat dan bawang merah terutama pada saat hari besar keagamaan. Dalam hal sarana prasarana pangan, Lumbung Pangan Masyarakat yang aktif hanya tiga unit yang di kelola oleh kelompok tani, selain itu beberapa terobosan yang telah dibuat antara lain Kawasan Rumah Pangan Lestari, Desa Mandiri Pangan yang terdapat di 6 lokasi.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Belum adanya MOU antara BPTP Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- Belum adanya system informasi pangan dan gizi yang terintegrasi.
- Belum disusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
- Belum berfungsinya Gudang cadangan pangan pemerintah karena belum adanya landasan hukum tentang pengelolaannya.



b. Solusi

- Melakukan kerjasama dengan BPTP Provinsi Gorontalo dalam penerapan hasil-hasil penelitian dalam rangka pengembangan sentra produksi pangan, melakukan kerja sama dalam hal pelatihan dan pengelolaan cadangan pangan dengan BULOG Provinsi Gorontalo, melakukan kerjasama peningkatan kompetensi SDM dengan BPOM Provinsi Gorontalo
- Deteksi dini dan penanggulangan stunting serta sertifikasi untuk industry pangan rumah tangga.
- Pelimpahan program lumbung pangan masyarakat menjadi urusan desa.

**4. PERTANAHAN**

Urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Anggaran yang telah di alokasikan untuk urusan pertanahan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 14.708.062.950,00 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan realisasi sebesar Rp. 14.701.648.686,00 atau 99,96%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanan antara lain :

*Tabel 4.26 Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2018*

1.	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan sistem pendaftaran tanah</li> </ul>
2.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</li> </ul>

**B. CAPAIAN KINERJA**

Adapun yang menjadi capaian kinerja dari urusan pertanahan yakni :

- Tersosialisasinya hukum dan peraturan perundangan tentang pertanahan
- Tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanahan utamanya adalah terkait belum optimalnya pembinaan masyarakat tentang peraturan pertanahan terutama menyangkut hak milik dan pengelolaan tanah

### b. Solusi

Pada awalnya upaya sosialisasi dan negosiasi yang dilakukan pemerintah berjalan lancar, namun seringkali pada saat pelaksanaan pekerjaan tetap mendapat penolakan dari sebagian masyarakat dengan alasan pembayaran lahan tidak sesuai keinginan mereka, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan tindakan pengalihan lokasi alternatif pembangunan jalan ke lokasi yang lain. Ini menyebabkan perubahan target lokasi pelaksanaan pembangunan jalan.

## 5. LINGKUNGAN HIDUP

Urusan lingkungan hidup pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp. 13.387.388.177,44 dengan realisasi sebesar Rp. 13.101.166.665,00 atau sebesar 97,86%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

*Tabel 4.26 Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018*

1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
	•	Pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah sebanyak 9 unit
	•	Pengadaan mesin potong rumput
	•	Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
	•	Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
	•	Pengadaan mobil dump truck persampahan



2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
	•	Pemantauan Kualitas Lingkungan
	•	Pengadaan instalasi pengelolaan air limbah kotoran ternak
	•	Pengadaan instalasi air limbah usaha kecil (pabrik tahu)
3.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
	•	Pemeliharaan RTH sebanyak 5 unit
	•	Pengadaan mobil truk skylif
	•	Pengadaan tanaman hortikultura
	•	Pembangunan RTH Bone Raya 500 m <sup>2</sup>
	•	Pembangunan RTH Bulawa 800 m <sup>2</sup>
	•	Pembangunan RTH Kabila Bone 1500 m <sup>2</sup>
	•	Pembangunan Taman Muda Cemerlang 1000 m <sup>2</sup>
	•	Pembangunan Pintu Gerbang 120 m <sup>2</sup>
	•	Penataan Kawasan Rumah Dinas Bandayo 1 paket
	•	Penataan dan Rehabilitasi Objek Wisata Lombongo 1 Paket
	•	Pembangunan RTH Tamboo 1 paket
	•	Pembangunan Parkir di Kantor Dinas Capil
	•	Pembangunan Patung Nani Watabone (hibah ke KODIM)
	•	Penataan Halaman Kantor Camat Bulango Utara
	•	Pemeliharaan Median+Totoar+Tugu
	•	Pembangunan RTH kantor Dinas Pendidikan

## B. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2018 telah dibangun 6 RTH di Kabupaten Bone Bolango, hal ini memang sangat jauh dari yang diharapkan dimana target yang telah ditentukan pada Tahun 2018 sebanyak 10 unit RTH yang akan dibangun, sehingga mempengaruhi kinerja yang hanya sebesar 10%.

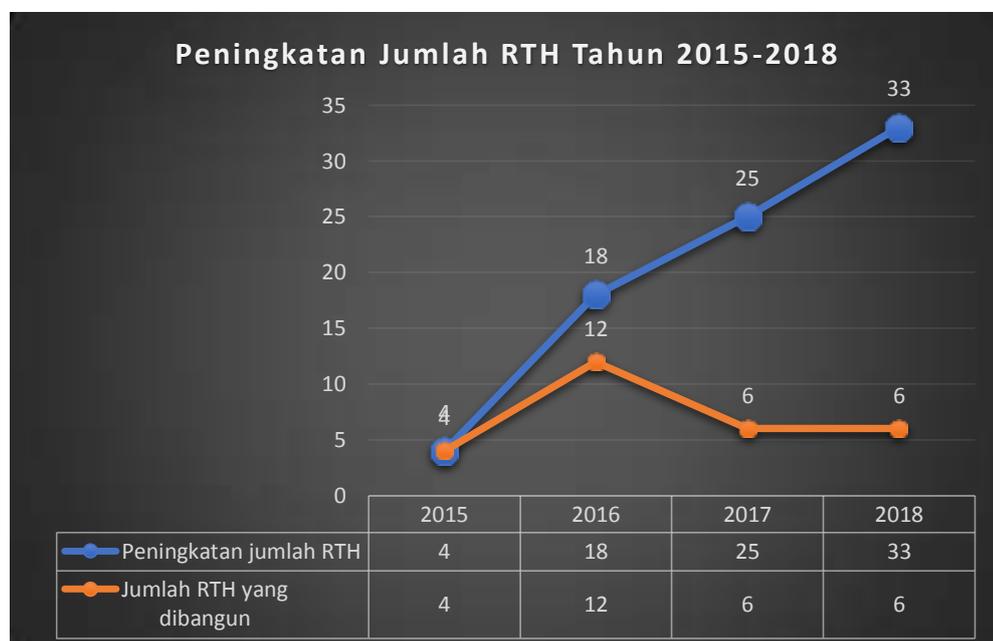
Adapun pencapaian kinerja pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

*Grafik 4.49*  
*Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah RTH*  
*Tahun 2016 - 2018*



Adapun peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang telah dibangun sejak tahun 2015 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

*Grafik 4.50*  
*Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah RTH*  
*Tahun 2015 - 2018*





## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Pembebasan lahan masyarakat merupakan masalah yang utama bagi lahan yang bukan lahan pemerintah.
- Masih Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ruang terbuka hijau

### b. Solusi

- Negosiasi dengan masyarakat dan pembayaran tanah harus dilakukan tahun sebelum pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain pemerintah harus memastikan bahwa tanah yang akan dibangun Ruang Terbuka Hijau telah menjadi milik pemerintah.
- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Ruang Terbuka Hijau

## 6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp. 4.870.694.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.854.273.519,00 dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

*Tabel 4.27 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018*

1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
	•	Pengoperasian Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
	•	Sosialisasi SIAK bagi operator desa
	•	Maintenance alat perekaman di 16 kecamatan
	•	Pencetakan blangko KK dan akta pencatatan sipil lainnya
	•	Pelayanan mobile di tingkat desa
	•	Sosialisasi KIA, pemanfaatan data penduduk yang non permanen



## B. CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2017 mendekatkan pelayanan masyarakat menjadi prioritas, dengan dilakukannya pelayanan mobile untuk meningkatkan kepemilikan KTP 100 %. Dinas kependudukan dan catatan sipil selaku pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan modal 1 program dan 6 kegiatan berhasil menaikkan persentase kepemilikan KTP elektronik dari 89,42 % menjadi 95,34 %.

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2016	Capaian Kinerja 2017	Capaian Kinerja 2018
1.	Kepemilikan KTP	89,42 %	95,34 %	NA

Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah baik di daerah maupun ditingkat pusat. Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 adalah 162.965 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 81.938 jiwa dan penduduk perempuan 81.027 jiwa.

Kepadatan penduduk Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2018 sebesar 80 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bulango Selatan, yaitu 1.098 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pinogu yaitu 6 jiwa per km<sup>2</sup>. Pada tahun 2018 KTP yang dicetak sebanyak 117.395 jiwa dari 117.918 penduduk yang wajib memiliki KTP, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 49.460 jiwa, jumlah penduduk yang memiliki akta kematian sebanyak 1325 jiwa.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Rendahnya animo masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil
- Wilayah yang luas serta banyak wilayah yang sulit dijangkau atau sulit untung mengunjungi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Keterbatasan sumber daya manusia dan ASN dalam penyelesaian tugas administrasi kependudukan
- Belum meratanya lokasi pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil



**b. Solusi**

- Meningkatkan pelayanan mobile sampai ke desa yang terpencil
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam hal kepengurusan akta kematian
- Pelaksanaan sosialisasi yang merata
- Publikasi informasi melalui media massa, media elektronik dan media sosial tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

**7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Urusan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan ini pada Tahun 2018 total sebesar Rp. 5.499.770.000,00 dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 3.247.460.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.252.310.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.425.685.488,00 atau sebesar 98,65%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

*Tabel 4.28 Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018*

1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	
	•	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten
	•	Penyusunan Data Profil Desa
	•	Sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
	•	Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
3.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
	•	Pencanangan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten
	•	Lomba Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten
	•	Lomba Dusun Heroik
	•	Kegiatan Jumbara PKK



	•	Koordinasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
	•	Pelatihan Kelompok Masyarakat
	•	Bantuan Kelompok Masyarakat
	•	Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten
4.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	
	•	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
	•	Bimbingan Teknis PTPKD
	•	Bimbingn Teknis BPD
	•	Pelatihan Kepala Desa Awal Masa Jabatan
5.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	
	•	Pelatihan kelompok perempuan dalam usaha meningkatkan ekonomi keluarga
	•	Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus PKK
6.	Program Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	
	•	Koordinasi dan evaluasi pemerintah desa /kelurahan
	•	Koordinasi dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
	•	Pelantikan Kepala Desa
	•	Koordinasi Penyusunan APBDes Tahun 2019

## B. CAPAIAN KINERJA

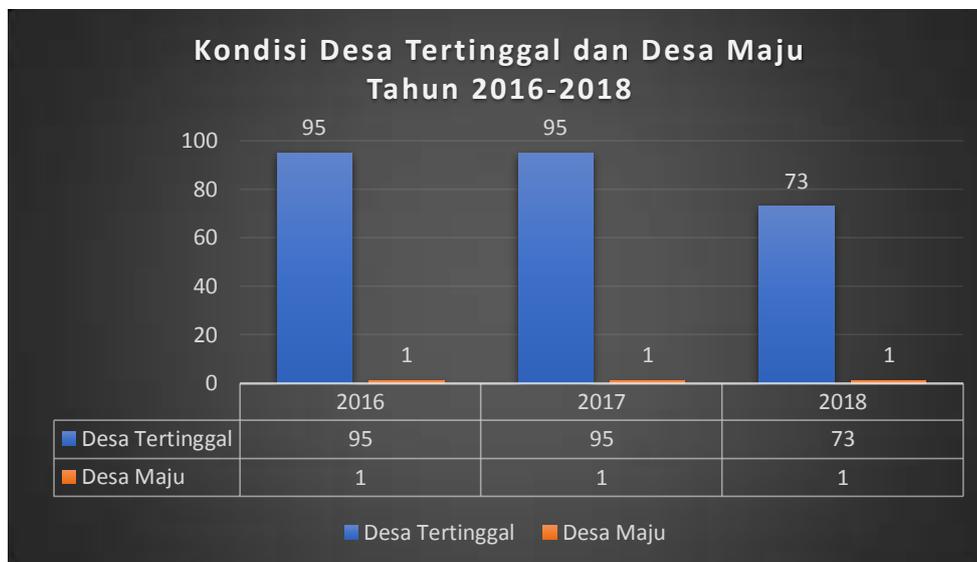
Adapun sasaran daerah yang ingin dicapai pada penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal dan bertambahnya desa maju. Tahun 2018, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Bone Bolango berkurang menjadi 73 desa dari 95 desa pada tahun 2017, namun jumlah desa maju tidak mengalami perubahan, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 47,7% menurun dibandingkan pada Tahun 2017 yang mencapai 81,25%.

Di tahun 2018 desa maju masih tetap sama seperti tahun sebelumnya karena pihak kementerian mengeluarkan status desa tidak setiap tahunnya. Karena dalam prediksi ada kenaikan walaupun dalam kenyataan masih sama seperti tahun sebelumnya tetapi karena ada peningkatan target sehingga terjadi penurunan



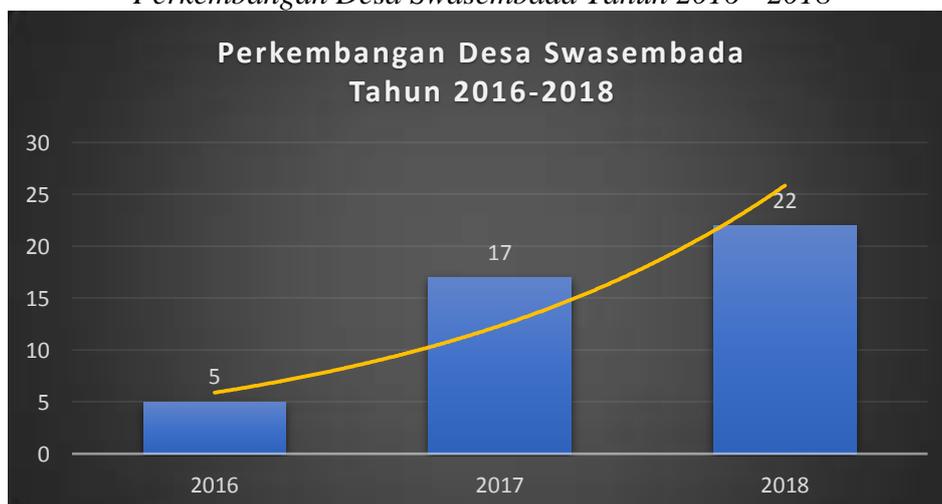
pencapaian kinerja. Capaian kinerja untuk berkurangnya desa tertinggal/sangat tertinggal hanya mencapai 87,69% dan desa maju sebesar 7,7%.

*Grafik 4.51*  
*Kondisi Desa Tertinggal dan Desa Maju Tahun 2016 – 2018*



Dari hasil penyelenggaraan program dan kegiatan, jumlah desa swasembada meningkat dari 17 desa pada Tahun 2017 menjadi 22 desa di Tahun 2018. Hal ini didukung oleh sumber daya aparatur yang membaik melalui sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan serta semakin besarnya bantuan keuangan yang di terima oleh desa yang bersumber dari APBD maupun APBN yang diperuntukan untuk pemberdayaan perekonomian desa maupun pembangunan infrastruktur dasar desa.

*Grafik 4.52*  
*Perkembangan Desa Swasembada Tahun 2016 - 2018*





Dinas PMD melaksanakan kegiatan Lomba inovasi teknologi tepat guna (TTG) bertujuan untuk memupuk kreativitas masyarakat untuk berinovasi didalam menghadapi perkembangan teknologi dimasyarakat. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, Hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah penggunaan dan perawatannya. keberadaan karya teknologi tepat guna ini memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya, solusi bagi peningkatan produktifitas dan efektifitas dalam menjalankan produksi usaha rumahan (home industry), industry kecil dan menengah (IKM) dan juga terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Dengan hadirnya aneka produk inovasi teknologi tepat guna, kita bisa menggunakan sekaligus mendapatkan manfaat dari alat tersebut, terutama kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Produk-Produk TTG ini juga telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui pameran inovasi TTG. Sehingga masyarakat dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dinas PMD menargetkan sebanyak 10 produk yang ikut dalam lomba inovasi TTG akan tetapi yang mengikuti lomba inovasi TTG sebanyak 17 produk. untuk itu kegiatan ini dinilai sangat berhasil karena melampaui target dari kegiatan itu sendiri. adapun dokumentasi kegiatan dan daftar Produk inovasi TTG yang telah mengikuti Lomba dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.29 Daftar Alat/Produk Ttg  
Pada Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna ( TTG )  
Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018

No	Jenis Inovasi TTG	Nama Inovator TTG / Utusan	Peringkat	Dimanfaatkan
1.	Serangan Gajah (Alat Sortasi dan Grading)	Kosasih, M.Pd SMK Negeri Model Gorontalo	I	Ya
2.	Pineapple Seeds Remover (Alat Pencungkil Mata Nanas)	Akri Pakaya Posyantek Bina Mandiri Kec. Botupingge	II	Ya
3.	Kompom Biomassa Type Batch	Hais Sude, A.Md Politeknik Gorontalo	III	Belum
4.	Nugget Jaman (Nugget	Hamsir Usman	IV	Ya



No	Jenis Inovasi TTG	Nama Inovator TTG / Utusan	Peringkat	Dimanfaatkan
	Jagung Manis)	Desa Dutohe Barat Kec. Kabila		
5.	ANIMA (Alat Hidroponik Hemat Biaya)	Asriani Wahda SMK Negeri 1 Bulango Utara	V	Ya
6.	Daur Ulang “Tongkol Milu” Lampu Hias	H. Achril Y. Babyonggo, ST, M.Ec. Dev Kec. Suwawa	VI	Ya
7.	Mie Sagu dan Kopi Kulit Pisang	Zikran Mbuti & Sitrawati Suleman Politeknik Gorontalo	VII	Ya
8.	Daur Ulang Sampah	Ahmad Django Kec. Suwawa	VIII	Ya
9.	KOPAYA (Kopi Biji Pepaya)	Silvana Kadir Politeknik Gorontalo	IX	Belum
10.	Lampu Hias dari Tongkol Jagung	Nugroho Yusuf Desa Lompotoo Kec. Suwawa Tengah	X	Ya
11.	TASACI (Kertas Sabun Cuci)	Rahmatiya Lawajo SMK Negeri Model Gorontalo	XI	Ya
12.	BATPIZZ (Batata Pizza)	Melisa Mahmud SMK Negeri 1 Bulango Utara	XII	Ya
13.	GO BISTAKRAW (Biskuit Batata Krawang)	Nurhayati Jambula, A.Md Kec. Botupingge	XIII	Ya
14.	Krupuk Jantung Pisang	Misran Djamil Kec. Bulango Timur	XIV	Ya
15.	APELMA ( Alat Penggaruk Gulma)	Aif Gani SMK Negeri 1 Bulango Utara	XV	Belum
16.	Miniatur Center Point	Aljufri Suleman Kec. Bulango Utara	XVI	Ya
17.	Miniatur Puade (Pakaian dan Puade Adat Gorontalo)	Sopyan Radji Kec. Bulango Timur	XVII	Ya

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Desa memiliki potensi yang cukup besar di beberapa bidang seperti pertanian, perkebunan dan perikanan akan tetapi belum didukung oleh



permodalan dan tingkat pemasaran hasil usaha yang belum maksimal. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dibidang pengelolaan keuangan desa, hal ini ditandai adanya desa yang menetapkan APBDes tidak tepat waktu sedangkan pada bidang pemerintahan desa ditandai adanya aparatur desa yang melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan tupoksi

**b. Solusi**

- Untuk menyelesaikan masalah ini Dinas PMD ditahun yang akan datang akan terus berupaya memberikan pendampingan terhadap Bumdes dalam kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan permodalan dan pemasaran hasil-hasil usaha Bumdes itu sendiri

**8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan ini pada Tahun 2018 sebesar 8.721.467.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.048.308.183,00 atau sebesar 80,82%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

*Tabel 4.30 Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018*

1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
	•	Pembinaan Keluarga Berencana
	•	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
2.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
	•	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

**B. CAPAIAN KINERJA**

Sampai dengan Tahun 2018, jumlah peserta KB di Kabupaten Bone Bolango mencapai 36.779 peserta. Jumlah terbesar dalam kepesertaan KB yakni pada KB



suntik sebanyak 11.045 peserta, pengguna KB pil sebanyak 8.092 peserta sedangkan yang terkecil adalah peserta KB dengan metode MOP sebanyak 256 peserta. Jumlah yang bukan peserta KB pada Tahun 2018 mencapai 9.314 peserta dimana jumlah terbesar yakni pada IAS sebanyak 2.140 peserta dan yang paling kecil adalah TIAL sebanyak 730 peserta

*Tabel 4.31 Capaian KB Aktif Tahun \2018*

Capaian KB Aktif Tahun 2018	
Peserta KB	Bukan Peserta KB
36.779 Keluarga	9.314 Keluarga

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### a. Permasalahan

- Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat terutama remaja tentang arti pentingnya pemeliharaan kesehatan alat reproduksi dan pencegahan penyakit menular seksual serta upaya pencegahan dari yang diakibatkan karena pergaulan bebas
- Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program keluarga berencana akibat keterbatasan pilihan kontrasepsi dan terbatasnya jumlah tenaga medis dalam inovasi pelayanan kontrasepsi

#### b. Solusi

- Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus tentang reproduksi dan segala hal yang menyangkut tentang program keluarga berencana serta perilaku sehat yang dimulai dari SD sampai perguruan tinggi
- Meningkatkan kualitas perencanaan urusan keluarga berencana secara matang dan terarah setiap tahunnya.
- Mengoptimalkan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) di seluruh kecamatan, yang berfungsi untuk mensosialisasikan upaya-upaya pencegahan kerusakan alat reproduksi dan bahaya penyakit menular seksual kepada remaja



## 9. PERHUBUNGAN

Urusan wajib perhubungan pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan pada Tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp. 6.140.240.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.116.821.181,00 atau persentase realisasi sebesar 99,62%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

*Tabel 4.32 Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2018*

1.	Program peningkatan pelayanan angkutan	
	•	Pembentukan tim pengatur dan pengawas lalu lintas dan angkutan jalan
	•	Sosialisasi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
	•	Sosialisasi keselamatan nelayan
	•	Pemberian penghargaan kepada sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan yang layak jalan sebanyak 50 orang
2.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
	•	Pengadaan Bus Perhubungan 1 unit
	•	Pembangunan shelter 2 unit
3.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
	•	Pengadaan rambu lalu lintas 100 buah
	•	Pengadaan marka jalan 8.814 meter
4.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	
	•	Pembangunan Balai Uji Kendaraan

### B. CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dicapai kinerja sebagai berikut :

#### a. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pada tahun 2018 realisasi dari persentasi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan mencapai 60% dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.



- b. Kendaraan yang memenuhi kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor  
Jumlah kendaraan yang memenuhi kelayakan untuk pengoperasian pada Tahun 2018 sebanyak 3.621 unit dimana 222 unit merupakan kendaraan yang baru, jumlah ini mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2017 hanya sebanyak 3.339 unit.
- c. Penurunan jumlah lakalantas  
Dengan adanya penambahan rambu-rambu serta marka jalan pada Tahun 2018 menimbulkan dampak pada jumlah lakalantas yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango dimana pada Tahun 2017 terjadi 120 kasus lakalantas maka di Tahun 2018 menurun menjadi 70 kasus, dengan rincian lakalantas yang mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 13 kasus, luka berat 0 kasus, luka ringan 46 kasus dan rugi material sebanyak 11 kasus. Berdasarkan angka jumlah kasus tersebut maka di Tahun 2018 terjadi penurunan lakalantas secara drastis hingga mencapai 48 %.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- Masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompoten baik di bidang perhubungan serta tenaga teknologi informasi
- Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang aparat dalam melaksanakan tugas pokok
- Pembangunan rambu-rambu serta marka jalan belum merata di sepanjang jalan kabupaten
- Masih terbatasnya pagu anggaran sehingga belum mengakomodir kegiatan tambahan lainnya.
- Terhentinya kegiatan pemungutan retribusi di pos-pos perhubungan karena dapat terindikasi pungutan liar
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas.
- Adanya penghentian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor bagi daerah yang belum memenuhi syarat pengujian.

**b. Solusi**

- Lebih memaksimalkan pelatihan atau bimbingan aparat perhubungan
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan kinerja aparat
- Pemerataan pembangunan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan
- Pemberian alokasi anggaran yang tepat
- Pengaktifan kembali pos-pos retribusi
- Adanya payung hukum yang jelas mengenai retribusi perhubungan
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi sadar keselamatan lalu lintas di seluruh lini masyarakat
- Penyiapan sarana dan prasarana pengujian kendaraan.

**10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan Komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone Bolango

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**



Urusan komunikasi dan informatika mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.388.615.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.241.269.557,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana berikut :

program dan kegiatan sebagaimana berikut :

*Tabel 4.33 Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018*

1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan layanan internet publik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan ruang server</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan website pemda Bone Bolango</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan website aplikasi KIM</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan layanan internet bagi instansi pemerintah</li> </ul>
2.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kepada 50 peserta</li> </ul>



	• Pelatihan penggunaan aplikasi siMAYA kepada 50 orang
--	--

## B. CAPAIAN KINERJA

Adapun capaian kinerja dari pelaksanaan program antara lain :

### a. Penerapan e-government pada SKPD

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 capaian kinerja yang dihasilkan mencapai 41,82% yang berarti 23 dari 55 SKPD dan kecamatan telah terlayani oleh jaringan informasi (internet) dimana capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 105,6% dari kondisi pada tahun 2017 sebesar 115,9%.

Adapun daftar SKPD yang telah menerapkan e-government dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.34 SKPD yang telah menerapkan e-government*

NO	OPD	NAMA APLIKASI
1	Dinas pendidikan	WEBSITE DINAS PENDIDIKAN PROFIL PENDIDIKAN APLIKASI DAPODIK
2	Dinas pemdes	SISKEUDES SIP PROFIL DESA SIMAN
3	Dinas kominfo	APLIKASI KIM WEBSITE KOMINFO
4	Dinas ptsp dan najer	SI CANTIK
5	Dinas duk capil	WEBSITE DUKCAPIL KONSOLIDASI
6	Bappeda litbang	SIPPD SIMONEV SIM TKPK SIM TATA RUANG SIMDA PERENCANAAN WEBSITE BAPPEDA LITBANG
7	Bkpd	APLIKASI POS PBB P-2 SMART MAP PBB-2 SI-PERSEDIAAN SI-MONITORING PENDAPATAN SIMDA KEUANGAN SIKAP
8	Dinas pertanian peternakan	E-PROPOSAL PERTANIAN SIMLUH



NO	OPD	NAMA APLIKASI
		EVLUH ERORMNAK KAMPUNG KELAPA
9	Dinas perpustakaan	SLIM 8.3 AKASIA
10	Bkppd	SIMPEG DAERAH E-LIKE SIKAP SISPEG (SMS GETWAY) DESY'S
11	Dinas kesehatan	E-RENGGER PMKDR SIKDA BRIDGING P-VARE ASPAK SIMAK E-WARDS E-MONEV HSP SIMPEG ROPEG E-LOGISTIK E-MONEV OBAT
12	Bagian TUP	SIRUP
13	Bag Humas Protokoler	LPSE
14	Dinas Ppkbpp Dan Pa	SI-KESEJAHTERAAN SOSIAL
15	Bagian Ekbang	E-MONEV+
16	Perindag	WEBSITE PERINDAGKOP
17	DPRD	WEBSITE DPRD
18	DLH	WEBSITE DLH
19	Pangan	WEBSITE DINAS PANGAN
20	Kec. Tilongkabila	APLIKASI SIAP
21	Inspektorat Daerah	APLIKASI LAPOR
22	Dinas Sosial	SIKS-NG
23	Dinas Pariwisata	WEBSITE DINAS PARIWISATA

Pencapaian kinerja yang sangat baik ini tidak lepas dari usaha pemerintah kabupaten bone bolango dengan memperbaiki sarana prasarana yang mendukung e-government juga memberikan kebebasan kepada SKPD dengan masih mengacu pada aturan yang berlaku untuk mengembangkan sistem pelayanan publik dengan berbasis internet untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

b. Layanan internet untuk publik

Adapun jumlah kecamatan yang telah terkoneksi dengan jaringan internet pada Tahun 2018 sebanyak 13 Kecamatan melalui pemasangan Wifi Manager



Services (WMS TELKOM) sebanyak 38 titik, Wifi Manager Services (WMS Icon Plus) sebanyak 4 titik dan WMS untuk wilayah Bulango sebanyak 12 titik.

- c. Peningkatan kapasitas dibidang teknologi komunikasi dan informatika
- Untuk meningkatkan kapasitas dibidang teknologi komunikasi dan informatika, pemerintah telah menyenggarakan beberapa kegiatan pelatihan yakni pelatihan bagi pejabat pengelola PPID sebanyak 50 orang, pelatihan pengelola konten dan media sosial sebanyak 50 orang dan pelatihan aplikasi siMAYA sebanyak 50 orang.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Masih minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang komunikasi dan informatika untuk pengelolaan saran dan prasarana informasi daerah
- Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang, walaupun ada teknologi yang di gunakan bukanlah teknologi yang terbaru
- Kurangnya anggaran untuk mendukung program dan kegiatan

### b. Solusi

- Pengusulan ke BKPPPD untuk penambahan aparat yang sesuai dengan latar belakang teknologi informasi
- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang layanan public
- Penambahan anggaran untuk belanja public maupun belanja operasional.

## 11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran yang dialokasikan untuk urusan koperasi, usaha kecil dan menengah pada Tahun 2018 sebesar Rp. 735.312.550,00 dengan realisasi keuangan sebesar 648.306.800,00 atau sebesar 88,17% yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 4.35 Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018

1.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian pembangunan Gallery Coffee Bone Bolango</li> </ul>
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan kewirausahaan terhadap 75 peserta</li> </ul>
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah</li> </ul>
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

### a. Koperasi Aktif

Realisasi dari persentase koperasi aktif di Kabupaten Bone Bolango sebesar 59,29% dari target yang telah direncanakan yakni sebesar 38,33% dengan demikian capaian kinerja pada Tahun 2018 sebesar 154,68%.

Capaian kinerja persentase koperasi aktif kurun waktu Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.53  
Kinerja Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 - 2018





Jumlah Koperasi Aktif yang ada di Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2018 sebanyak 83 unit koperasi dari 140 unit koperasi atau 59,29%. Sedangkan pada tahun 2017 telah melebihi target dan mengalami peningkatan sebanyak 6 Unit koperasi aktif apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Kondisi perkembangan koperasi di Kabupaten Bone Bolango kurun waktu Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.54  
Perkembangan Koperasi Tahun 2016 - 2018*



b. Persentase Pertumbuhan UMKM

Dari total prosentase realisasi pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah pada tahun 2018 telah mencapai target 1,5% dari sasaran kinerja apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Sehingga dapat diketahui bahwa realisasi indikator pertumbuhan UMKM pada tahun 2018 telah melampaui target. Hal ini diakibatkan adanya penumbuhan wirausaha baru dan UMKM yang berkembang, dan berkat bimbingan dari pihak pihak terkait. Oleh sebab itu masih perlu Pelatihan kewirausahaan dan Bimbingan teknis pengelolaan usaha untuk lebih meningkatkan pertumbuhan umkm pada tahun berikutnya.

Perkembangan UMKM selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.36 Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018

Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018			
UMKM	2016	2017	2018
Usaha Mikro	22,195	22,265	22.270
Usaha Kecil	451	454	457
Usaha Menengah	92	93	93
<b>Jumlah</b>	<b>22,738</b>	<b>22,812</b>	<b>22,830</b>

Berbeda halnya dengan UMKM, persentase koperasi di Bone Bolango kelihatan stagnan bahkan menurun, hal ini di pengaruhi oleh koperasi tidak aktif di Tahun 2017 tidak dapat tumbuh dan aktif kembali serta kemunculan koperasi baru yang sangat sedikit, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.37 Perkembangan UMKM Tahun 2016-2018

NO	INDIKATOR KOPERASI	2016	2017	2018
1	Jumlah Seluruh Koperasi	135	139	140
2	Jumlah Koperasi Aktif	76	82	83
3	Jumlah Koperasi Sehat	25	25	25
4	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	56	56	56
5	Jumlah Koperasi Baru	5	3	1

Adapun persentase koperasi sehat selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.55  
Persentase Koperasi Sehat Tahun 2016 - 2018



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Belum meratanya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data laporan perkembangan usaha kepada pemerintah, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya
- Pengelolaan koperasi pada umumnya belum dilaksanakan secara professional dan sebagian besar koperasi dikelola paruh waktu atau sisa pekerjaan lainnya.
- Pola kemitraan dan kerjasama antara koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan dengan pengusaha besar belum optimal
- Globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh pada daya saing produk UMKM.

### b. Solusi

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan koperasi dan UMKM
- Meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi melalui pelatihan.
- Meningkatkan daya saing produk UMKM
- Meningkatkan skill para pelaku usaha UMKM



## 12. PENANAMAN MODAL

Urusan wajib penanaman modal dilaksanak oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 4.221.868.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.170.037.850,00 dengan persentasi sebesar 98,77%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

*Tabel 4.38 Program dan Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018*

1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan potensi unggulan daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA</li> </ul>
2.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal</li> </ul>

### B. CAPAIAN KINERJA

#### a. Penurunan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Capaian PMA Tahun 2018 sebesar Rp.31.790.685.400 jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000.000,- bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 347.219.626.000,- capaian realisasi investasi sangat menurun. Untuk itu capaian kinerja investasi PMA tahun 2018 dengan dinilai **tidak memuaskan** atau 0,93% perkembangannya bila dibandingkan dengan target realisasi tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh hanya satu perusahaan asing yang melakukan kegiatan dari lima perusahaan asing yang ada.

#### b. Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Perkembangan investasi PMDN tahun 2018 masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 83.742.705.000,- hanya 0,85% dari target realisasi 2018. Bila dibandingkan dengan realisasi perkembangan



investasi tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar Rp. 34.507.273.775,- akan tetapi realisasi tersebut masih jauh dari penetapan target sebesar Rp. 550.000.000.000,-.

Adapun perkembangan pertumbuhan investasi daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

*Grafik 4.56*  
*Perkembangan Pertumbuhan Investasi Daerah Tahun 2016 - 2018*



### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### a. Permasalahan

Perkembangan investasi dari Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bone Bolango realisasi investasi mengalami peningkatan. Namun dari sisi jumlah perusahaan mengalami penurunan jumlah.

Adapun perusahaan PMA Bone Bolango sampai dengan tahun 2018 ;

1. PT. Gorontalo Mineral
2. PT. Explorasi Indonusa Jaya
3. PT. Panah Mas
4. PT. Bone Bolango Energi
5. PT. Celebes Bolango Mineral

Perusahaan yang masih melakukan kegiatan usahanya yakni PT. Bone Bolango Energi



**b. Solusi**

Permasalahan ini telah ditindaklanjuti dengan mendiskusikan dengan pemerintah provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya seperti pihak kepolisian dan kejaksaan. Usaha promosi terus dilakukan dengan menyebarkan leaflet penyediaan buklet tentang potensi wilayah kabupaten Bone Bolaango, dan kemudahan pengurusan izin. diperlukan juga penataan kembali peraturan daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi sehingga lebih mendukung investasi melalui koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota

**13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Urusan wajib kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga pada Tahun 2018 sebesar Rp. 7.488.146.941,00 yang terdiri dari Rp. 5.960.180.941,00 belanja langsung dan Rp. 1.527.966.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah Rp. 7.107.163.701,00 atau sebesar 94,91%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.39 Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Tahun 2018*

1.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	
	•	Pembinaan Organisasi Kepemudaan terhadap 1 organisasi
	•	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
	•	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan kepada 100 pemuda
	•	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan dengan 180 peserta
2.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	
	•	Sertifikasi pelatih dan wasit kepada 40 orang
3.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	



	•	Pembinaan 4 club olahraga
	•	Pelaksanaan pertandingan 6 cabang olah raga
	•	Pelaksanaan senam aerobis sebanyak 44 kali
	•	Penyelenggaraan Kompetisi 3 cabang olah raga
	•	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
	•	Seleksi olahraga tradisional di tingkat kabupaten sebanyak 18 team
	•	Pembelian bonus/penghargaan kepada pelatih dan atlet sebanyak 10 orang
4.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
	•	Bantuan alat olahraga sebanyak 2 jenis
	•	Pembangunan 7 lapangan olah raga

## B. CAPAIAN KINERJA

### a. Persentase keikutsertaan pemuda dalam kegiatan daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas pemuda di kabupaten Bone Bolango maka pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Keterlibatan pemuda bone bolango dapat dilihat dari kegiatan pemuda yang dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.40  
Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017 - 2018

No	Uraian Kegiatan	Jumlah s/d Tahun 2017	Tahun 2018	Total
1	Kemah Bhakti Pemuda	180	108	288
2	Seleksi Paskibraka	100	190	290
3	Seleksi JPI	36	36	72
4	Wirausaha Pemuda	20	20	40
5	Gerak Jalan	1.275	1.340	2.615



6	Pembibitan Atlit Berbakat	60	75	135
7	Kejurnas Olah Raga	14	14	28
8	Pekan Olah Raga Provinsi	90	200	290
9	Tournament Sepak Bola	-	300	300
10	Tournamet Volly Ball	300	120	420
11	Olahraga Tradisional	40	20	60
12	Tournament Bulutangkis	159	150	309
<b>TOTAL</b>				<b>18.402</b>

Persentase keikutsertaan pemuda dalam kegiatan daerah selang Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik 4.57 Persentase Keikutsertaan Pemuda Dalam Kegiatan Daerah Tahun 2016 - 2018*



Di tahun 2018, pemuda yang terpilih untuk mengikuti kegiatan/iven ketingkat provinsi dan nasional sebnayak 19 orang, sedangkan medali yang diperoleh di tingkat provinsi/nasional yakni 17 emas, 13 perak dan 3 perunggu.

Adapun keikutsertaan kegiatan kepemudaan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.41 Keikutsertaan Kepemudaan Tahun 2018*

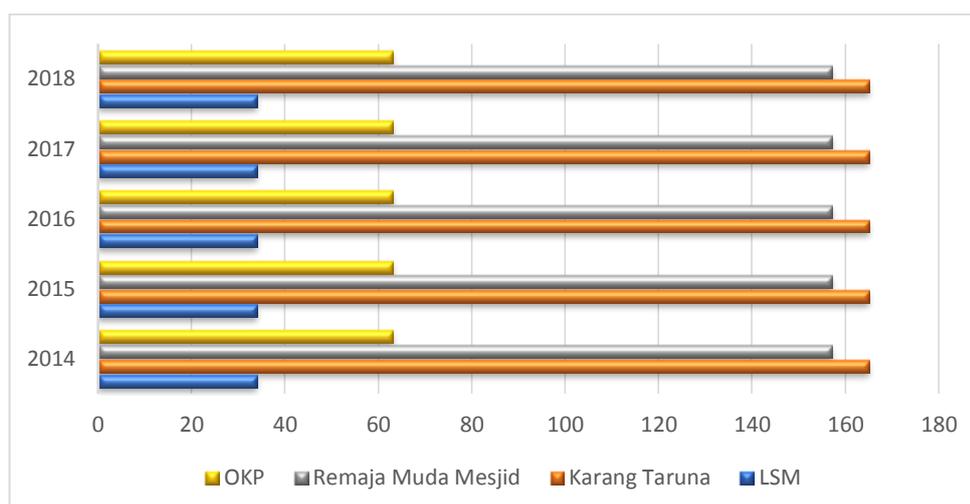
NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1.	Seleksi Paskibraka	261 Orang



NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
2.	Seleksi JPI	36 Orang
3.	Kemah Bhakti	72 Orang
4.	Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) dari 6 Kab. Kota	1000 Orang
5.	Gerak Jalan antar SD,SMP,SMA sederajat, Masyarakat Umum dan SKPD se- Kab. Bone Bolango	500 Regu
6.	Kejuaraan Volly Ball antar Kecamatan se-Kab. Bone Bolango	18 Kecamatan
7.	Tunamen Sepak Bola Bupati Cup Bone Bolango	18 Kecamatan
8.	Open Turnamen Lari Marathon Bonebol 2018	1100 Orang
9.	Lomba Sepeda Nusantara (GOWES) 2018	1050 Orang
10.	Pertandingan Futsal antar SKPD se-Kab. Bone Bolango	20 Regu

Dalam rangka peningkatan kualitas diri, selain sebagai seorang individu maupun tim yang bisa berkiprah diajang perlombaan dan pertandingan, pemuda Bone Bolango juga aktif di organisasi kepemudaan. Pemerintah berusaha memberikan fasilitas kepada pemuda yang mau aktif di organisasi. Ada beberapa organisasi kepemudaan yang ada di kabupaten bone bolango, seperti dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

*Grafik 4.58  
Lembaga organisasi kepemudaan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018*





## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Masih kurangnya tenaga pelatih, wasit serta teknisi olahraga yang memiliki sertifikat keahlian, sebagai penunjang didalam pembinaan, pembibitan dan pelatihan para atlit-atlit berprestasi.
- Masih kurangnya sarana prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Bone Bolango, sebagai penunjang didalam berolahraga

### b. Solusi

- Perlu mengikut sertakan para wasit, pelatih dan tekknisi olahraga didalam pelatihan maupun bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas ataupun keahlian yang memiliki legalitas/ bersertifikat.
- Lebih memperhatikan aspek kebutuhan didalam melatih dan berolahraga sehingga didalam penyusunan rencana kerja khususnya peningkatan pembangunan sarana dan prasaran olahraga, yakni untuk penentuan lokasi pembangunan lapangan/ sarana prasarana olahraga

## 14. PERPUSTAKAAN

Urusan wajib perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Perpustakaan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 2.444.574.150,00 yang terdiri dari Rp. 717.516.150,00 belanja langsung dan Rp. 1.727.058.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah Rp. 2.437.059.866,00 atau sebesar 99,69%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.42 Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2018*

1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan minat dan budaya baca</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah</li> </ul>



## **B. CAPAIAN KINERJA**

Adapun capaian kinerja outcom bidang perpustakaan adalah

- Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat alam meningkatkan pemahaman masyarakat melalui media-media non elektronik
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pustaka dalam meberikan layanan informasi di segala bidang

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

### **a. Permasalahan**

- Terbatasnya sarana dan prasarana perustakaan dalam enjangkau kebutuhan informasi sampai ke pelosok-pelosok desa
- Terbatasnya petugas atau pustakawan dalam memberikan layanan pustaka kepada masyarakat

### **b. Solusi**

- Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan desa yang diharapkan dapat menjangkau kebutuhan informasi sampai di desa yang sulit dijangkau
- Mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan teknis, diklat atau sosialisasi tentang manajemen perpustakaan desa
- Meningkatkan jumlah buku-buku perpustakaan yang dijadikan bahan bacaan dan literatur bagi kalangan masyarakat, peneliti dan pihak lain yang teribat langsung dengan pencarian informasi

## **15. KEARSIPAN**

Urusan wajib perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 197.565.000,00 dan realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah Rp. 195.309.000,00 atau sebesar 98,86%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:



Tabel 4.43 Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2018

1.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	
	•	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
2.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	
	•	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
	•	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

## B. CAPAIAN KINERJA

Adapun capaian kinerja outcome yang telah dicapai adalah meningkatnya pengelolaan dan arsip daerah sebagai dokumen daerah yang menggambarkan proses kinerja daerah setiap tahunnya

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Belum optimalnya pembinaan aparatur dalam merencanakan, mengelola serta mendokumentasikan peristiwa pembangunan daerah
- Terbatasnya sarana dan prasaran kearsipan dalam mendukung proses pengarsipan dokumen daerah yang profesional

### b. Solusi

- Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam mengelola arsip daerah
- Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dalam mendukung proses pengarsipan dokumen daerah sehingga terhindar dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam.

## 16. STATISTIK

Urusan wajib statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang menangani urusan statistic pada tahun 2018 melekat pada program dan kegiatan yang menyatu dengan urusan perencanaan, karena adanya kebijakan daerah untuk melakukan penajaman (refocusing) terhadap program dan kegiatan yang ada di setiap SKPD. Adapun anggaran yang



dialokasikan untuk urusan statistic sebesar Rp. 135.593.300 dengan realisasi sebesar Rp. 127.435.400,00

## B. CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan kegiatan dicapai beberapa output sebagai berikut :

- Pengadaan buku statistic Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2018
- Pengadaan buku statistic Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

Adapun Belum optimalnya publikasi data disebabkan pengolahan data statistik yang masih terkesan lambat

### b. Solusi

## 17. KEBUDAYAAN

Urusan wajib kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan pada Tahun 2018 sudah melekat pada urusan Pendidikan namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.44 Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2018*

1.	Program Pengembangan Nilai Budaya
	• Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
2.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	• Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

### B. CAPAIAN KINERJA

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan kebudayaan adalah :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memelihara budaya daerah sebagai wujud sikap dan perilaku masyarakat yang berbudaya



- Terpeliharanya budaya daerah sebagai perwujudan bangsa yang berbhineka tunggal ika dimana diantara berbagai suku bangsa, bbudaya bne bolango merupakan salah satu suku bangsa yang kaya akan adat dan budaya daerah.
- Meningkatnya rasa persatuan dan solidaritas antar masyarakat dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga terhindar dari tindakan yang meecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

### **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Permasalahan utama pada urusan kebudayaan di Kabupaten Bone Bolango antara lain:

- Belum optimalnya pembinaan budaya daerah sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu masih mengedepankan sifat kedaerahan yang sering memicu konflik antar suku, adat dan budaya
- Belum optimalnya organisasi budaya daerah dalam mengembangkan adat budaya daerah sehingga adat budaya daerah dapat dikenal di tingkat nasional maupun international

## **C. URUSAN WAJIB PILIHAN**

### **1. KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 7.697.376.666,00 yang terdiri dari Rp. 7.249.776.666,60 belanja langsung dan Rp. 447.600.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah Rp. 6.015.859.190 atau sebesar 78.15%. Selain melaksanakan program dengan anggaran yang bersumber dari APBD, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengelola anggaran yang bersumber dari DAK.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:



Tabel 4.45 Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

1.	Program pengembangan budidaya perikanan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pengembangan perikanan</li> </ul>
2.	Program pengembangan perikanan tangkap
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap</li> <li>• Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap</li> <li>• Pembangunan tambatan perahu 3 unit</li> <li>• Pembangunan sarana pendukung lainnya 1 unit</li> </ul>
3.	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar</li> <li>• Pengembangan Kawasan Budi daya udang Vaname</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA

Produksi perikanan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yakni sebesar 1.289,76 ton menjadi 13.586,54 ton dibandingkan produksi pada Tahun 2017 yang hanya sebesar 12.911,35 ton. Walaupun terjadi peningkatan namun realisasi ini masih jauh dari yang ditargetkan sebesar 15.209 ton.

Produksi perikanan kurun waktu Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 4.59  
Produksi Perikanan Tahun 2017 - 2018





Tabel. 4.46  
Jumlah Produksi Perikanan Laut Berdasarkan Jenis Ikan

NO	JENIS IKAN	2017		2018	
		Produksi (ton)	Nilai (Rp)	Produksi (ton)	Nilai (Rp)
1	Layang	2.829,6	15.282.394	3.599,3	53.988.900
2	Selar	2.631,5	13.157.525	3.412,5	51.186.900
3	Tongkol	1.950,7	10.538.339	2.089,2	20.891.600
4	Cakalang	1.952,4	13.667.804	2.054,3	24.652.080
5	Tenggiri	198,3	1.475.257	193,6	3.871.200
6	Ikan Terbang	23,1	69.441	0	0
7	Julung - julung	17,4	52.081	0	0
8	Ika Kuwe	594,6	4.756.965	0	0
9	Cumi - cumi	585	4.837.008	551	13.774.500
10	Tuna	361	7.217.734	1.439,3	28.786.400
11	Madidihang	1.003,9	20.079.995	0	0

Tabel. 4.47  
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan  
Tahun 2017 - 2018

NO	JENIS KOMUNITAS BUDIDAYA	2017	2018
1	Ikan Nila	45,9	127,71
2	Ikan Lele	12	28,49
3	Ikan Mas	2,05	1,45
4	Ikan Kerapu	0,1	-
5	Udang	-	-

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Bantuan sarana dan prasarana banyak yang tidak dapat didistribusikan karena terbitnya aturan Permendagri no 14, tahun 2016.pasal 7 (point G), “bahwa setiap penerima bantuan wajib berbadan hukum.



- Perikanan budidaya realisasi produksi relative sedikit, salah satu yang mempengaruhi karena masyarakat penerima bantuan yang berusaha hanya pada saat menerima bantuan saja dan tidak berkelanjutan. Dengan kata lain, jika ada bantuan maka ada produksi

**b. Solusi**

- Merubah mindset masyarakat dengan sosialisasi ataupun pelatihan dalam pengembangan budidaya perikanan dalam peningkatan produksi perikanan yang hanya mengharapkan bantuan dari Pemerintah sehingga budidaya perikanan berkelanjutan tanpa bantuan Pemerintah.
- Membina kelompok nelayan dari nelayan pemula memiliki badan hukum

**2. PARIWISATA**

Urusan pariwisata pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango.

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata pada Tahun 2018 sebesar Rp. 6.340.057.000,00 yang terdiri dari Rp. 4.500.570.000,00 belanja langsung dan Rp. 1.839.487.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah Rp. 6.279.393.241,00 atau sebesar 99,04%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.48 Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2018*

1.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	
	•	Pembuatan liflet, baner dan standing picture elektrik dalam rangka promosi pariwisata
	•	Pengadaan buku pariwisata
	•	Pelaksanaan Calender Event
	•	Pelaksanaan kegiatan fetival dangdut danau perintis
	•	Pelaksanaan Bone Bolango Fair
	•	Pelaksanaan festival band dan festival sound
	•	Pelaksanaan kegiatan arung rakit patriotik

	•	Pelaksanaan Gebyar Ramadhan
	•	Pelaksanaan Dive Olele
	•	Pelaksanaan pesta rakyat nada dan dakwah
	•	Pelaksanaan festival vespa
	•	Pelaksanaan kegiatan Sewindu Bone Bolango
2.		Program pengembangan destinasi pariwisata
	•	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana wisata di 4 objek wisata
	•	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi
	•	Pengadaan bangunan gedung garasi
	•	Pengadaan alat rumah tangga untuk obyek wisata
3.		Program pengembangan Kemitraan
	•	Pembentukan kesenian daerah
	•	Pembuatan souvenir angkatan II
	•	Kegiatan Bone Bolango Kreatif
	•	Lomba cipta menu kreatif
	•	Lomba cipta cinderamata
	•	Lomba desain kerawang

## B. CAPAIAN KINERJA

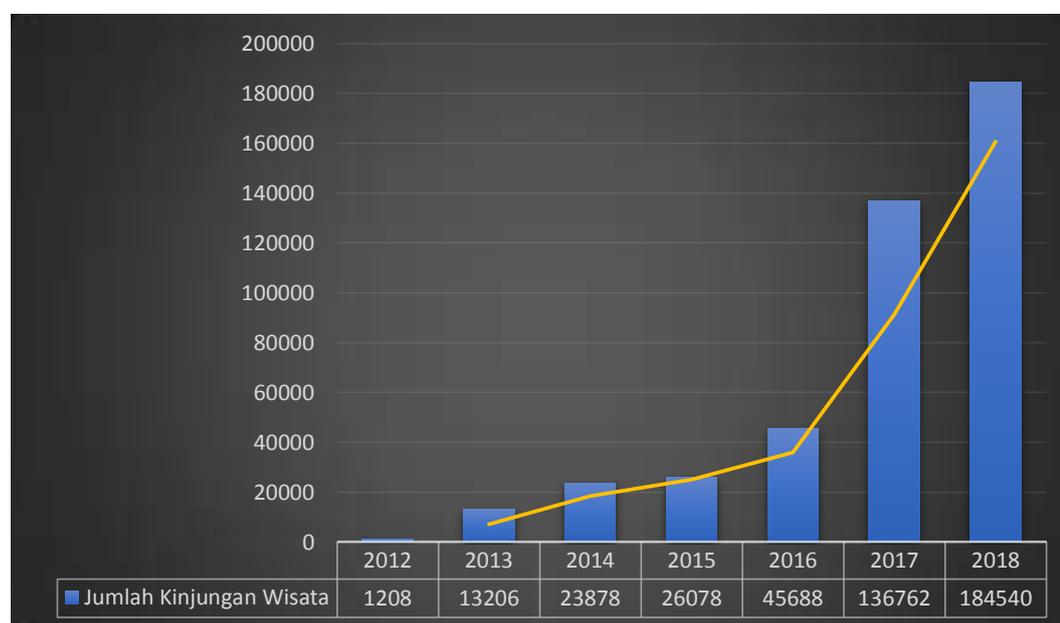


Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan dari sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang berarti dan terus tumbuh, Jumlah kunjungan wisata merupakan indikator penting atas tumbuhnya sektor pariwisata di Kabupaten Bone Bolango yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan atau penurunan dari kunjungan wisatawan dipengaruhi baik oleh faktor internal berupa kondisi destinasi wisata. Pada tahun 2018 terjadi Peningkatan kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan



pada tahun 2018 mencapai 184.7540 kunjungan wisatawan, dimana jumlah wisatawan lokal sebanyak 180,806 kunjungan dan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 3,734 kunjungan. Lebih jelasnya tentang peningkatan kunjungan wisata sampai Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel. 4.60*  
*Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2012 - 2018*



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Rendahnya promosi sebagai destinasi wisata dan pengelolaan yang tidak optimal
- Tidak adanya event promosi pariwisata yang menarik kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara
- Masih kurangnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- Banyaknya potensi sumber daya alam yang bias dijadikan sebagai destinasi wisata.
- Belum tumbuhnya minat dan bakat para pelaku industry kreatif

### b. Solusi

- Perlu adanya promosi pariwisata diberbagai destinasi dan pengelolaan yang optimal
- Perlu diadakan kegiatan berupa event yang dapat menarik kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara

- Perlu ditingkatkannya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
- Kurangnya sumber daya manusia dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan destinasi wisata.

### 3. PERTANIAN

#### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian pada Tahun 2018 sebesar Rp. 41.068.712.529,00 yang terdiri dari Rp 30.310.153.450,00 belanja langsung dan Rp. 10.758.559.079,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah Rp. 39.314.198.253,00 atau sebesar 95,73%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.49 Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2018*

1.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	• Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
	• Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
	• Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
3.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
	• Promosi atas hasil produksi Pertanian/Perkebunan unggulan daerah
4.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
	• Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 8 unit
	• Pembangunan irigasi air tanah dangkal 8 unit
	• Pembangunan irigasi air tanah dalam sebanyak 3 unit
	• Pembangunan jalan usaha tani 1 km
	• Pembangunan embung 3 unit
5.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
	• Peningkatan kapasitas 10 orang penyuluh pertanian
6.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	• Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
7.	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	• Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
	• Pemberian bantuan bibit ternak kepada 1.340 masyarakat

#### B. CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, maka pada tahun 2018 dicapai hal-hal sebagai berikut :

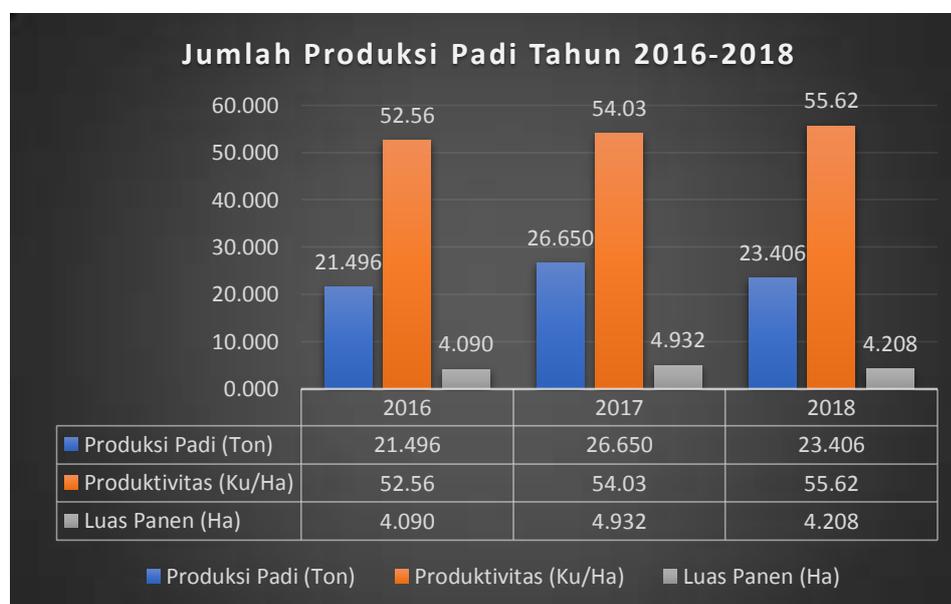
1. Jumlah Produksi padi.



Untuk Produksi padi di tahun 2018 adalah 23.405 Ton, ini mengalami Penurunan produksi yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 26.650 Ton, dari penurunan produksi padi dari produksi padi tahun 2018 adalah sebesar 3.245 Ton atau 12,17%.

Penurunan Produksi terjadi karena Luas Panen untuh tahun 2018 terjadi hanya dua kali panen atau dua musim, maka produksi padi untuk tahun 2018 menurun tetapi produktivitas mengalai kenaikan. Produktivitas tahun 2018 55,62 kuintal/Ha dan tahun 2017 produktivitas hanya 54,03 Kuintal/Ha. Untuk Tahun 2018 luas panen 4.208 Ha bila di bandingkan Tahun 2017 yang luas panen mencapai 4.932 Ha artinya penurunan jumlah luas panen sebesar 724 Ha. Kondisi di Provinsi Gorontalo terjadi panen 5 Kali selama dua tahun. Produksi padi Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik. 4.61  
Jumlah Produksi Padi Tahun 2016 - 2018



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Produksi Padi di Tahun 2018 Mengalami Penurunan dibandingkan tahun 2017, target produksi tahun 2018 sebesar 27.818Ton dan realisasi tahun 2018 sebesar 23,406 Ton atau 84 %. Apabila di lihat dari sisi target dan realisasi memang belum melampui dari target yang ditetapkan. Tetapi dengan penurunan 12,17% dari produksi tahun 2017 sebagai dasar bahwa Produksi padi bukan hanya sekedar mengejar produksi saja tetapi harus dikejar Produktivitasnya. Produktivitas Padi bisa juga dilihat dari tahun 2017 sebesar 54,03 Kuintal/Ha yang meningkat menjadi 55,62 Kuintal/Ha atau mengalami peningkatan sebesar 2,94%.

## 2. Jumlah Produksi Jagung



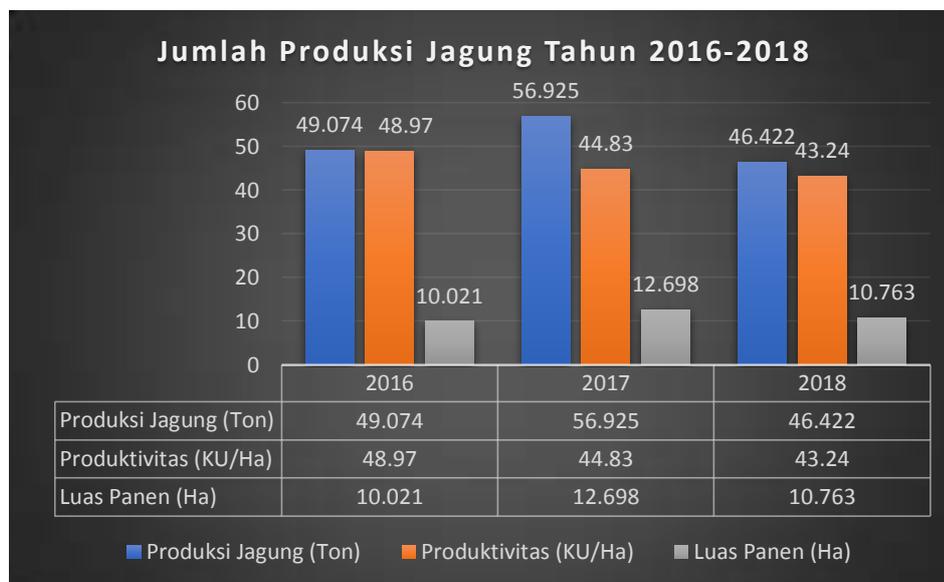
Untuk produksi jagung di Kabupaten Bone Bolango untuk tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat besar dengan angka 46.422 Ton/Tahun. yang pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 56.925 Ton/Tahun. Penurunan tersebut sekitar 18,45 % dari produksi tahun 2017. Untuk target produksi jagung tahun 2018

adalah 48.695 Ton dengan realisasi 46.422 Ton atau menurun menjadi 18.45% dari Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kalau dilihat data dari tahun 2014 s.d 2017 produksi jagung mengalami kenaikan, walaupun untuk produktivitas jagung mengalami penurunan. Penurunan kinerja ini di karenakan dari Pemerintah pusat bantuan benih Jagung mengalami keterlambatan, yang baru di tanam di Bulan Nopember Desember. Di Samping adanya keterlambatan benih terjadi juga adanya penurunan Produktivitas jagung yang apada tahun 2017 produktivitasnya 44,83 kuintal/Ha. Namun untuk tahun 2018 hanya 43,24 Kuintal/Ha atau turun 3,54%.

Produksi jagung Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini



Grafik. 4.62  
Jumlah Produksi Jagung Tahun 2016 - 2018



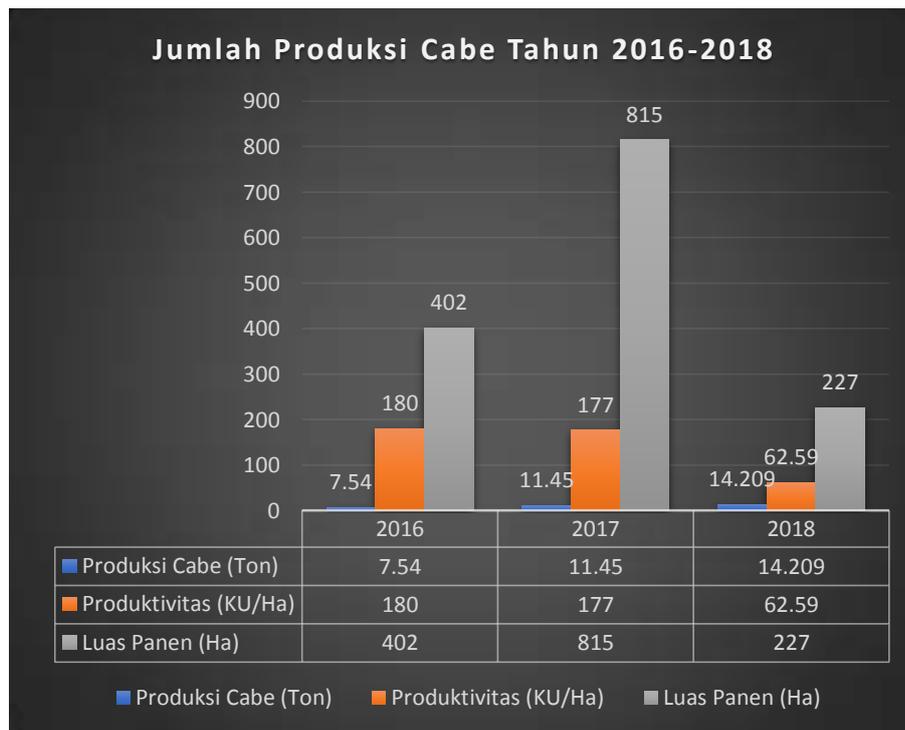
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Produksi Jagung di Tahun 2018 tidak tercapai target karena adanya bantuan benih jagung dari pemerintah yang sebagian baru ditanam di Bulan Nopember 2018. Dan ketika panen mengalami kekeringan sehingga mempengaruhi produksi jagung yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

### 3. Jumlah Produksi Cabe

Untuk produksi Cabe di Kabupaten Bone Bolango untuk tahun 2018 mengalami Kenaikan produksi yang sangat besar dengan angka 14,209 Ton/Tahun. Yang pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 11,45 Ton/Tahun. Kenaikan tersebut sekitar 24 % dari data tahun 2017. Kalau dilihat data dari tahun 2014 s.d 2018 produksi cabe mengalami Kenaikan sejak tahun 2014 s.d 2018. Pencapaian kinerja ini didukung dari dana APBN berupa bantuan bibit sebanyak 75 Ha, dalam bentuk benih cabe, biaya pengolahan dan sarana dan prasarana lainnya

Produksi cabe Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik. 4.63  
Jumlah Produksi Cabe Tahun 2016 - 2018



#### 4. Jumlah Produksi Kopi, Aren dan Cengkeh

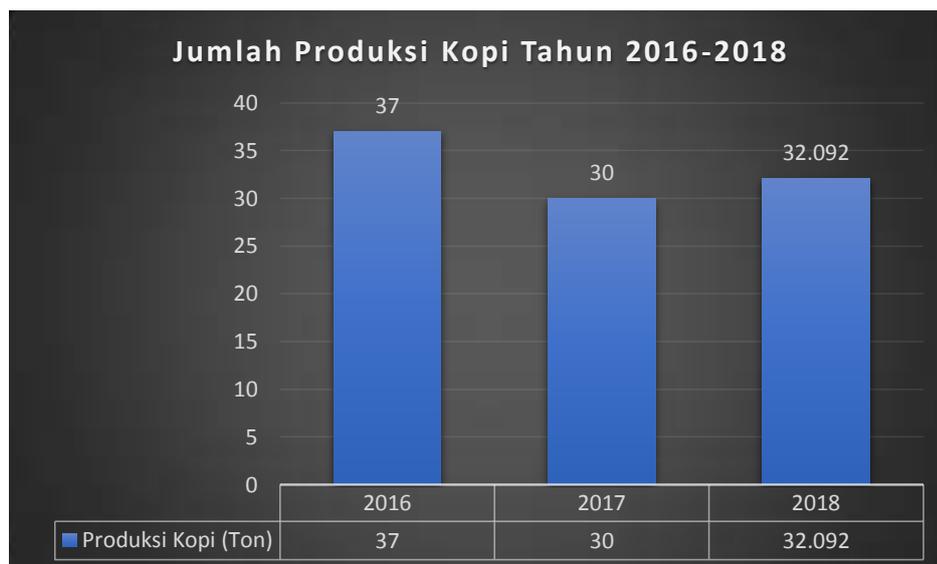


Untuk produksi Kopi di Kabupaten Bone Bolango untuk tahun 2018 mengalami Peningkatan produksi dengan angka 32,092 Ton/Tahun. Yang pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 30,32 Ton/Tahun. Kenaikan tersebut sekitar 2 Ton dari data tahun 2017. Indikator kinerja ini di dukung oleh pemerintah daerah melalui kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering.

Sedangkan bantuannya berupa bibit kopi, pupuk organik dan sarana dan prasarana pasca panen.

Produksi kopi Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik. 4.64  
Jumlah Produksi Kopi Tahun 2016 - 2018



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Produksi Kopi Tahun 2018 mengalami Kenaikan dibandingkan tahun 2017 dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut :

- Adanya Tanaman Kopi sebanyak 39.500 yang memulai berbuah.
- Keberhasilan Dalam Peremajaan Kopi
- Kesadaran Petani Kopi dalam pemeliharaan Tanaman Kopi.

#### 5. Jumlah Populasi Ternak



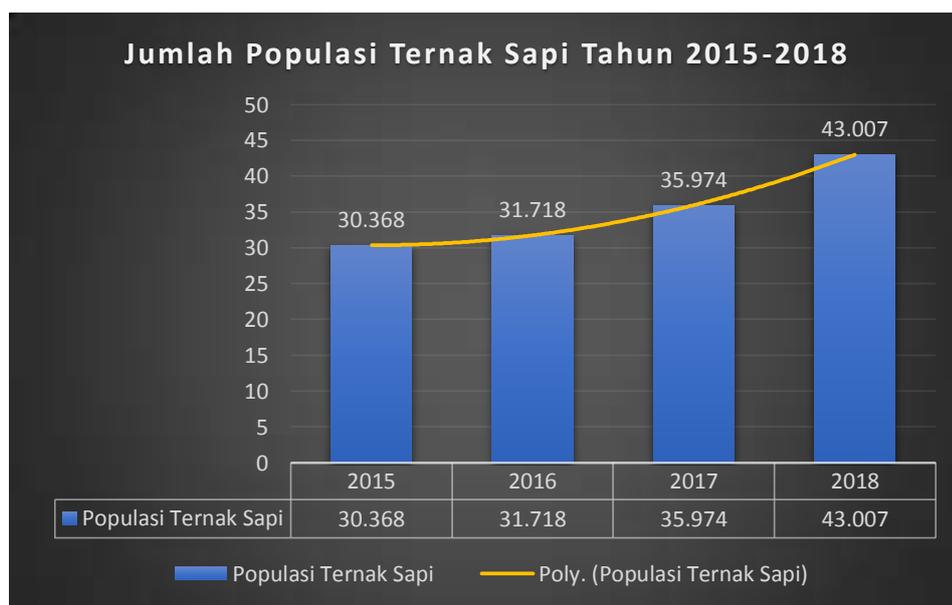
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Drh. I Ketut Diarmita menyatakan jika populasi sapi di Indonesia mencapai 14,6 juta ekor atau masih memenuhi sekitar 67 persen kebutuhan sapi potong di Indonesia. Dan Untuk Kabupaten Bone Bolango mempunyai program peningkatan Populasi Ternak sapi yang arahnya untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango. Peningkatan

Populasi Ternak sapi untuk tahun 2018 mencapai 43.007 Ekor yang sebelumnya untuk data tahun 2017 mencapai 35.974 Ekor. Indikator yang mendukung kegiatan ini adalah Pendistribusian Bibit ternak kepada masyarakat. Berupa bantuan ternak sapi sebanyak 2.680 ekor, Pembibitan dan perawatan



ternak dan Pembangunan sarana pembibitan ternak. Dengan program pemerintah tersebut diharapkan untuk tahun selanjutnya semakin menggembirakan, agar kemiskinan untuk Kabupaten Bone Bolango yang sekitar 18% dapat bisa dikurangi dengan adanya bantuan sapi tersebut. Untuk peningkatan populasi ternak sapi dapat dilihat pada grafik berikut di bawah ini.

*Grafik. 4.65*  
*Jumlah Populasi Ternak Sapi Tahun 2015 - 2018*



Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Populasi Ternak Sapi mengalami peningkatan yang sangat pesat karena mulai Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Pertanian dan Peternakan ada Program Bantuan Sapi Betina untuk Kelompok Ternak yang di Utama Masyarakat Miskin untuk mengurangi kemiskinan. Untuk Tahun 2018 populasi ternak sapi mencapai 43.007 Ekor yang pada tahun sebelumnya tahun 2017 adalah 35.974 Ekor. Dari data tersebut dapat dilihat ada peningkatan sekitar 18%.

Peningkatan Populasi Ternak Sapi di sebabkan beberapa faktor berikut ini :

- Adanya Program Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Bantuan Ternak Sapi.
- Program Sapi Induk Betina Wajib Bunting ( SIWAB ).
- Asuransi Ternak Sapi

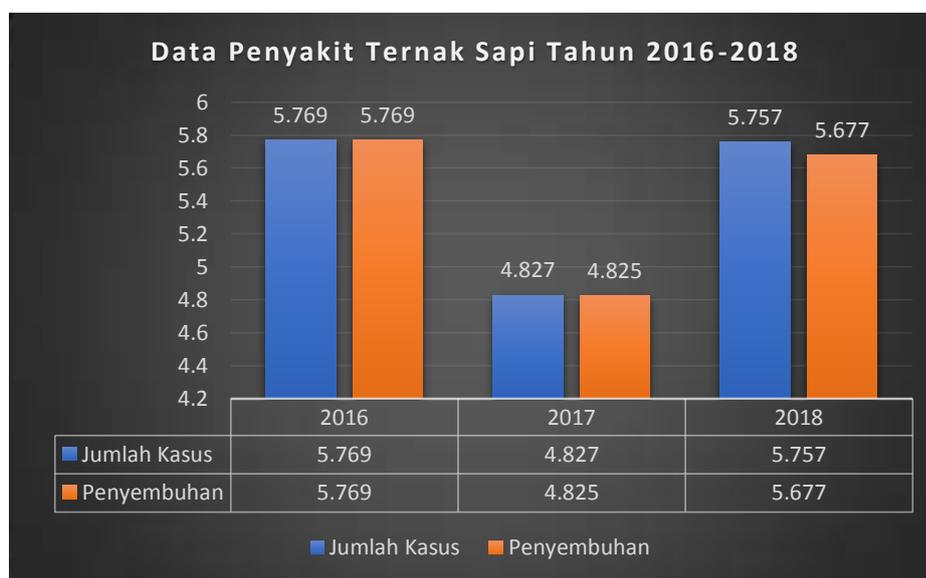


6. Ternak yang disembuhkan dari total pelacakan

Penyakit anthrax adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular pada manusia. Biasanya kategori penyakit seperti ini disebut zoonosis. Nama lain dari anthrax adalah radang limpa. biasanya disebabkan oleh bakteri yang masuk dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang mengandung bakteri basillus anthracis. selain melalui makanan yang tidak bersih tersebut bakteri anthrax bisa masuk dalam tubuh melalui tanah yang tercemar bakteri yang masuk melalui pernafasan dan luka pada sapi. Indikator keberhasilan di dukung oleh pemerintah daerah melalui kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular.

Untuk tahun 2018 untuk penyakit sapi tidak ada kasus penyakit sapi yang tidak bisa di sembuhkan, hampir semua sapi yang peyakitnya di luar penyakit antrax bisa disembuhkan. Data penyakit bisa dilihat dalam data berikut.

Grafik. 4.66  
Data Penyakit Ternak Sapi Tahun 2016 - 2018



Dari data di atas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan tahun 2017 jumlah yang di tangani semakin Naik itu bisa dilihat pada tahun 2017 jumlah sapi yang terserang penyakit berjumlah 4.827 Ekor sedangkan untuk tahun 2018 jumlah sapi yang sakit Naik menjadi 5.757 Ekor. Setelah di Lihat di Tingkat Lapangan untuk Sapi yang sakit rata – rata sapi bantuan yang di datangkan dari luar provinsi Gorontalo.



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Pembinaan yang telah dilaksanakan belum mampu memberikan kesadaran petani dalam manajerial dan perencanaan kelompok tani
- Pada pemberian bantuan bibit sapi, para peternak belum menyediakan kandang sebagai syarat menerima bantuan bibit ternak sapi
- Kurangnya diklat-diklat teknis yang diikuti oleh penyuluh pertanian maupun peternakan
- Ketersediaan bibit bersertifikat di Provinsi Gorontalo masih terbatas pada bibit cengkeh dan bibit kelapa sehingga masih membutuhkan pasokan bibit dari luar daerah

### b. Solusi

- Melakukan pembinaan kepada kelompok tani melalui penguatan kelembagaan terutama dibidang manajerial kelompok tani
- Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan ternak sapi untuk menyediakan kandang ternak.
- Mengirimkan penyuluh-penyuluh pertanian dan peternakan untuk mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan tugas fungsi penyuluh.
- Mengadakan pemilihan blok penghasil tinggi pada tanaman kopi dengan melibatkan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar di Sulawesi Selatan.

## 4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian pada Tahun 2018 sebesar Rp. 6.376.784.750,00 dengan realisasi keuangan pada tahun 2018 adalah Rp. 6.195.777.302,00 atau sebesar 97,16%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

Tabel 4.50 Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018

1.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C</li> </ul>
2.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pengembangan tenaga listrikan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerangan Jalan 530 unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan penerangan jalan umum sebanyak 38 unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan jaringan listrik 1 unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan meteran listrik bagi masyarakat kurang mampu 181 unit</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA



Bahwa untuk melestarikan fungsi dan tatanan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia dan serta makhluk hidup lainnya, pengendalian galian C telah dilaksanakan secara tertib untuk mengurangi masyarakat yang merusak lingkungan. Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kelistrikan dibutuhkan sumber daya listrik yang cukup memadai dengan dukungan beberapa pembangkit listrik yang sudah dioperasikan untuk menjangkau kebutuhan penerangan khususnya di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh aliran listrik PLN.

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Masih minimnya pengetahuan penambang akan aturan dan teknik penambangan yang benar, sehingga secara kontinyu perlu dilakukan pengawasan dalam melakukan penambangan bahan galian C.
- Kurangnya peralatan dalam sistem yang berkaitan dengan kemampuan penyediaan daya untuk menghadapi beban

### b. Solusi

- Pemantauan dan pengawasan kegiatan pertambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan.



- Pemeliharaan peralatan penunjang jaringan tenaga listrik yang sudah beroperasi

## 5. PERDAGANGAN

Urusan perdagangan pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 4.315.458.100,00 dengan realisasi keuangan pada Tahun 2018 adalah Rp. 4.153.406.751,00 atau sebesar 96,24%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.51 Program dan Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2018*

1.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa</li> <li>• Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah</li> </ul>
2.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk</li> <li>• Pembangunan pasar 3 unit</li> </ul>
3.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan</li> <li>• Penataan dan revitalisasi 2 unit</li> </ul>

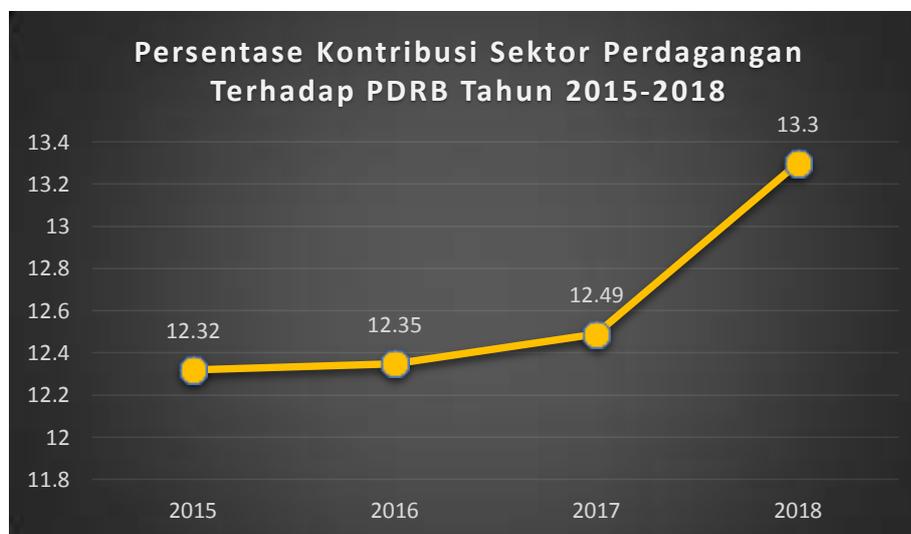
### B. CAPAIAN KINERJA

#### a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak terlepas dari kondisi perekonomian daerah yang sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya adalah konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Oleh karena itu, meningkatnya daya beli masyarakat dan pengeluaran pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan konsumsi daerah sehingga memacu pertumbuhan perekonomian daerah.

Adapun persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada grafik dibawah.

*Grafik. 4.67*  
*Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB*  
*Tahun 2015 - 2018*

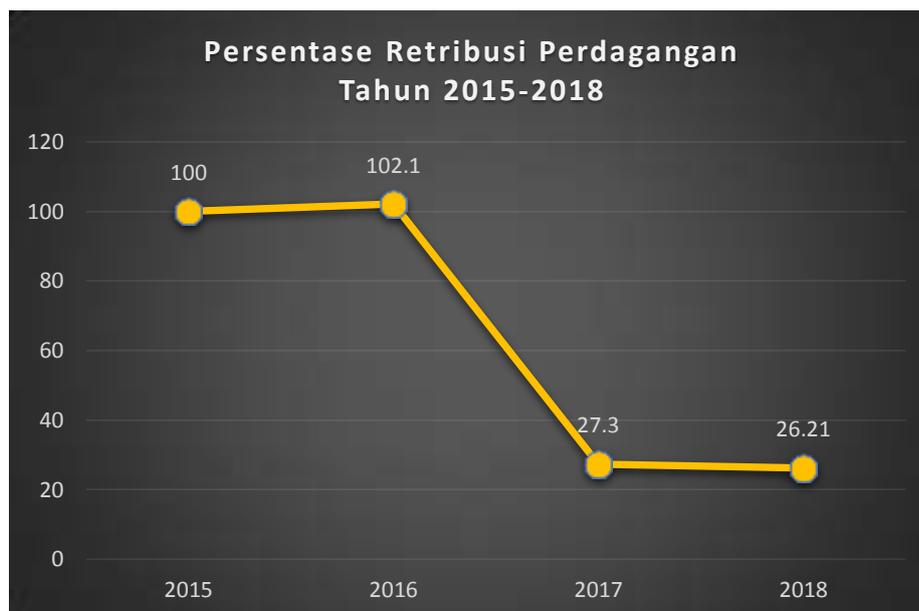


#### **b. Retribusi Perdagangan**

Retribusi Perdagangan Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 hanya mencapai Rp. 170.377.000,- atau 26,21% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Retribusi Daerah Lebih Rendah Lagi dibandingkan dengan Retribusi pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp. 177.450.000,- dari PAD yang ditargetkan Rp. 650.000.000,- atau 27,3 %.

Menurunnya Prosentase Retribusi Perdagangan Kabupaten Bone Bolango mengindikasikan terjadinya penurunan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dan menurunnya distribusi barang yang beredar dipasaran serta menurunnya kesadaran para pelaku usaha disektor perdagangan yang membayar retribusi perdagangan. Hal ini belum sejalan dengan program pemberdayaan dan pengembangan sektor perdagangan yang menjadi salah satu prioritas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang produk, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pedagang sektor informal (pedagang kaki lima) , dan menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha perdagangan terutama perdagangan asongan yang berjualan di pasar-pasar tradisional.

Grafik. 4.68  
Persentase Retribusi Perdagangan Tahun 2015 - 2018



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Masih rendahnya kinerja pengelola retribusi pasar karena kurangnya ketegasan dan keberanian petugas penagih atau mandor pasar.
- Kurangnya pengawasan dan masih banyak terjadinya kebocoran dalam hal penagihan retribusi pasar yang dilakukan oleh mandor pasar
- Menurunnya kesadaran para pelaku usaha disektor perdagangan yang membayar retribusi perdagangan

### b. Solusi

- Lebih mengoptimalkan pengawasan dalam hal penagihan retribusi pasar
- Memberikan sanksi tegas bagi mandor pasar yang sering melakukan kecurangan
- Memberikan kesadaran kepada para pedagang di pasar tradisional untuk membayar retribusi perdagangan.
- Mengadakan sosialisasi kepada pengguna lapak

## 6. PERINDUSTRIAN

Urusan perindustrian pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.



## A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian pada Tahun 2018 sebesar Rp. 5.948.452.150,00 dengan yakni Rp. 3.627.337.150,00 belanja langsung dan Rp. 2.321.115.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada Tahun 2018 adalah Rp. 5.260.270.199,00 atau sebesar 88,43%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.52 Program dan Kegiatan Urusan Perindustrian Tahun 2018*

1.	Program pengembangan industri kecil dan menengah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya</li> </ul>
2.	Program penataan struktur industri
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir</li> </ul>
3.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan UPT dan Revitalisasi Sentra IKM (DAK)</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Bone Bolango mencapai 100 % atau melebihi dari target. Meningkatnya prosentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB kabupaten Bone Bolango mengindikasikan adanya peningkatan daya saing dan diversifikasi produk IKM . Hal ini sejalan dengan program pemberdayaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah yang menjadi salah satu prioritas Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan pelatihan bimbingan teknis dan non teknis serta promosi produk IKM di tingkat Nasional maupun International.

Adapun persentase kontribusi sector industry terhadap PDRB dapat dilihat pada grafik berikut.

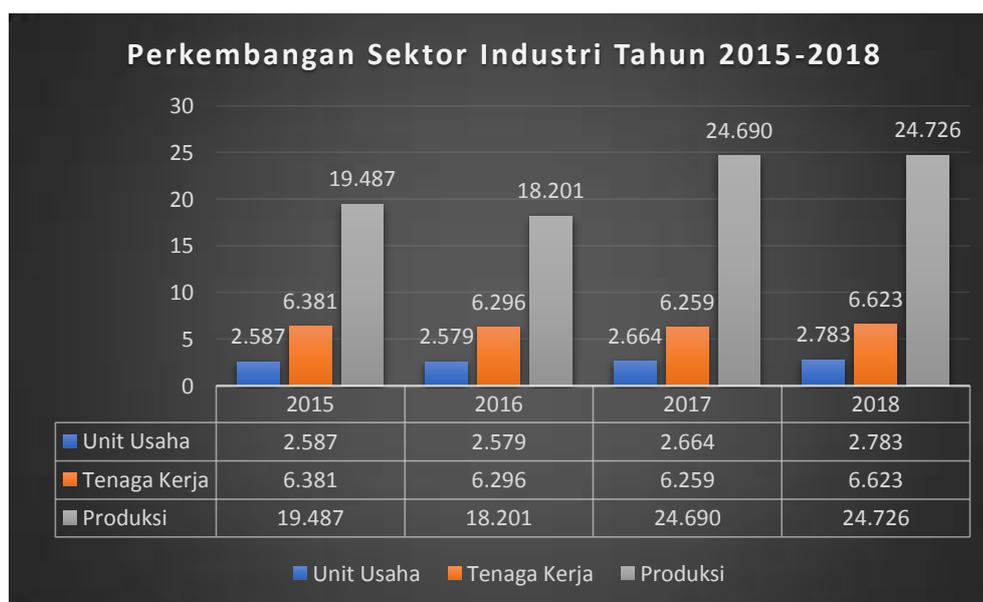


Grafik. 4.69  
Persentase Kontribusi Sektor Industri Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2015 - 2018



Sedangkan perkembangan sektor industry Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik. 4.70 Perkembangan Sektor Industri  
Tahun 2015 - 2018



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Terbatasnya kemampuan dan jumlah SDM atau dibidang keahlian teknis





- Terbatasnya sarana prasarana pendukung pengembangan industri kecil menengah
- Belum dimanfaatkan secara optimal penggunaan hasil potensi bahan baku di kabupaten Bone Bolango
- Rendahnya jiwa Kewirausahaan dan kreativitas pengembangan usaha industri

**b. Solusi**

Pengembangan Industri kecil menengah melalui fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya dan pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster Industri serta pendampingan / bimbingan teknis kepada IKM agar memiliki sertifikat produk maupun kompetensi tenaga kerja

## **D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**

### **1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Urusan administrasi pemerintahan pada Tahun 2018 dilaksanakan oleh :

- a. Sekretariat Daerah yang meliputi :
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - Bagian Ekonomi Pembangunan
  - Bagian Tata Pemerintahan
  - Bagian Tata Usaha Pimpinan
  - Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana
  - Bagian Pelayanan Pengadaan
- b. Sekretariat DPRD
- c. Seluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango

### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan Tahun 2018 sebesar Rp. 111.022.422.447,00 yang terdiri dari Rp. 58.789.725.697,00 belanja langsung dan Rp. 52.232.696.750,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada Tahun 2018 adalah Rp. 109.401.873.003,00 atau sebesar 98,54%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:



Tabel 4.53 Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan  
Tahun 2018

1.	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Peringatan Hari - hari Besar Nasional</li> </ul>
2.	Penataan Daerah Otonomi Baru
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah</li> </ul>
3.	Program Kerja Sama Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah</li> </ul>
4.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Instrumen Standar Operasional Prosedur</li> </ul>
5.	Program penataan peraturan perundang-undangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Fasilitasi Sosialisasi peraturan perundang-undangan</li> </ul>
5.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</li> </ul>
6.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah (Bid. Ekonomi)</li> <li>• Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah (Bid. Pembangunan)</li> </ul>
6.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik</li> </ul>
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor</li> </ul>
8.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Daerah</li> <li>• Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</li> <li>• Fasilitasi Kegiatan Keagamaan</li> <li>• Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Organisasi Masyarakat</li> <li>• Fasilitasi Kegiatan Adat dan Budaya</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan</li> </ul>
9.	Program Mengintensifkan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> </ul>
10.	Program Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>
11.	Program Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa</li> </ul>
12	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agamav</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat-rapat alat kelengkapan dewan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat-rapat paripurna</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Reses</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi peraturan perundang-undangan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik</li> </ul>
13.	Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD</li> </ul>
	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan</li> </ul>
14.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya tingkat Kecamatan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan</li> </ul>



	•	Pengendalian dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan
--	---	---

## B. CAPAIAN KINERJA

### a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bone Bolango terhadap layanan pemerintah dan program pembangunan Bone Bolango merupakan akumulasi keseluruhan jenis layanan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Setiap jenis layanan dan atau program pemerintah yang diukur IKM-nya dapat memberikan unsur atau indikator layanan yang berbeda antara satu jenis layanan / program dengan jenis layanan / program lainnya. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang akan disurvei yakni 15 bidang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hanya 5 parameter/bidang.

Dari hasil realisasi, capaian indeks kepuasan masyarakat Tahun 2018 sebesar 73,8% meningkat 3% dari capaian Tahun 2017 sebesar 73,5%. Indeks kepuasan masyarakat ini merupakan akumulasi dari keseluruhan jenis layanan dan program pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel.4.54  
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018*

NO	OPD	IKM 2018	KATEGORI	KUALITAS
1	Dinas Kesehatan	79,0	B	Memuaskan
2	Rumah Sakit Umum Daerah	78,2	B	Memuaskan
3	Dinas Kependudukan dan Capil	77,7	B	Memuaskan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77,2	B	Memuaskan
5	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	73,7	B	Memuaskan
6	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	73,0	B	Memuaskan



	Perlindungan Anak			
7	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	72,5	B	Memuaskan
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72,0	B	Memuaskan
9	Dinas Lingkungan Hidup	71,5	B	Memuaskan
10	Dinas Pariwisata	71,3	B	Memuaskan
11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	70,4	B	Memuaskan
12	Dinas Pangan	70,2	B	Memuaskan
13	Inspektorat	69,8	B	Memuaskan
14	BAPPPEDA dan Litbang	69,7	B	Memuaskan
15	Dinas Sosial	68,5	B	Memuaskan
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,2	B	Memuaskan
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	68,0	B	Memuaskan
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67,7	B	Memuaskan
19	Sekretariat Dewan	67,2	B	Memuaskan
20	Sekretariat Daerah	67,1	B	Memuaskan
21	Dinas Pertanian dan Peternakan	67,0	B	Memuaskan
22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	66,6	B	Memuaskan
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	65,7	B	Memuaskan
24	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	63,6	B	Memuaskan
25	Dinas Perhubungan	62,1	C	Kurang Memuaskan
26	Dinas Perikanan dan Kelautan	61,3	C	Kurang Memuaskan
27	Dinas SatPol PP dan Damkar	61,1	C	Kurang Memuaskan
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	60,5	C	Kurang Memuaskan



*Tabel 4.55. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan  
Pemerintah Kecamatan Tahun 2018*

NO	PEMERINTAH KECAMATAN	IKM 2018	KATEGORI	KUALITAS
1	Pemerintah Kecamatan Bulawa	87,5	A	Sangat Memuaskan
2	Pemerintah Kecamatan Suwawa	85,4	A	Memuaskan
3	Pemerintah Kecamatan Kabila Bone	84,9	A	Sangat Memuaskan
4	Pemerintah Kecamatan Bulango Timur	83,1	A	Sangat Memuaskan
5	Pemerintah Kecamatan Bonepantai	82,8	A	Sangat Memuaskan
6	Pemerintah Kecamatan Pinogu	81,6	B	Memuaskan
7	Pemerintah Kecamatan Botupingge	81,0	B	Sangat Memuaskan
8	Pemerintah Kecamatan Suwawa Selatan	81,0	B	Memuaskan
9	Pemerintah Kecamatan Suwawa Tengah	81,0	B	Memuaskan
10	Pemerintah Kecamatan Bulango Utara	80,8	B	Memuaskan
11	Pemerintah Kecamatan Boneraya	80,4	B	Memuaskan
12	Pemerintah Kecamatan Kabila	79,9	B	Memuaskan
13	Pemerintah Kecamatan Bone	79,0	B	Memuaskan
14	Pemerintah Kecamatan Tapa	78,8	B	Memuaskan
15	Pemerintah Kecamatan Bulango Ulu	78,5	B	Memuaskan
16	Pemerintah Kecamatan Bulango Selatan	78,1	B	Memuaskan
17	Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur	75,0	B	Memuaskan
18	Pemerintah Kecamatan Tilongkabila	74,5	B	Memuaskan



**b. Produk hukum yang disahkan sesuai dengan perundang-undangan**

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan telah berhasil dilaksanakan Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum daerah, Hal ini tidak terlepas dari kerjasama Tim Pengarah dan Tim Teknis Legislasi Ranperda Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari kalangan eksekutif dan juga kalangan akademisi. Adapun produk hukum yang diharmonisasi dan disinkronisasikan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.56*

*Produk Hukum Daerah yang di Harmonisasi dan Sinkronisasi Tahun 2018*

No.	Produk Hukum	Rancangan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah
1	Peraturan Daerah	16	16
2	Peraturan Bupati	31	31
3	Surat Keputusan Bupati	473	473
4	Surat Keputusan Sekda	27	27
	<b>JUMLAH</b>	<b>547</b>	<b>547</b>

**c. Pengadaan Barang dan Jasa yang Difasilitasi**

Dalam Tahun Anggaran 2018 ini, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa, menyediakan 80 Paket pada Tahun 2018, paket tersebut terlelang semua dengan rincian sebagaimana pada tabel Berikut :

*Tabel. 4.57*

*Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018*

No.	Jenis Pengadaan	Jumlah Penyedia Barang dan jasa	Paket Pengadaan Barang dan Jasa
		2018	2018
1	Barang	10	10
2	Konstruksi	51	51
3	Konsultasi	9	9
4	Jasa Lainnya	2	2
	<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>72</b>

**d. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya**



Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya mencapai 100 persen. Koordinasi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah. Masyarakat cukup antusias menanggapi, maka dari prinsip sentralistik. Kondisi ini memberikan Angin segar kepada para pemangku kepentingan yang ada di daerah. Sebelumnya kepala Daerah kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan perkembangannya situasi dan kondisi, dianggap tidak lagi memenuhi aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah, tentu sebagai aparatur yang ada di daerahnya diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

**e. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Adat Budaya Daerah**

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan keagamaan dan kegiatan adat budaya daerah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

*Tabel. 4.58  
Kegiatan Keagamaan Tahun 2018*

No.	Uraian	Lokasi
1	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	Kab. Bone Bolango
2	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi	Prov. Gorontalo
3	Peringatan Isra Mi'raj 1438/2018	Kab. Bone Bolango
4	Perayaan Idul Fitri	Kab. Bone Bolango
5	Perayaan Idul Adha	Kab. Bone Bolango
6	Ramah Tamah Calon Haji	Kab. Bone Bolango
7	Perayaan tahun baru Islam	Kab. Bone Bolango
8	Peringatan Nisfu sya'ban	Kab. Bone Bolango



9	Tabligh Akbar	Kab. Bone Bolango
10	Pembinaan Spritual Bagi PNS (Kajian Islam)	Kab. Bone Bolango
11	Peringatan Hari Asyura	Kab. Bone Bolango
12	Maulid Nabi Muhammad SAW	Kab. Bone Bolango
13	Peringatan Natal	Kab. Bone Bolango
<b>JUMLAH</b>		

Tabel. 4.59 Kegiatan Adat Budaya Tahun 2018

No.	Uraian	Lokasi
1	Tanggeyamo : a. 1 Romadhan, b. Idul Fitri c. Idul Adha	Kab. Bone Bolango
2	Pelaksanaan Tombilotohe	Kab. Bone Bolango
3	Upacara Adata Tilolo (Penyambutan Tamu)	Kab. Bone Bolango
4	Upacara Adat Kematian	Kab. Bone Bolango
<b>JUMLAH</b>		

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2018 tentu tidak lepas dari beberapa permasalahan yang menghambat pencapaian target sasaran yang telah ditentukan. Masalah tersebut antara lain :

- Masih terdapat Aparat Sipil Negara (ASN) yang cenderung berperilaku tidak disiplin dalam Kerja sebagai akibat dari lemahnya reward (penghargaan) atas ASN yang berprestasi dan punishment (hukuman) terhadap ASN yang telah melakukan Pelanggaran Disiplin
- Lemahnya pemahaman ASN terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku



- Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian intern pada SKPD, sehingga cenderung memperbesar terjadinya berbagai penyimpangan disiplin Kerja

**b. Solusi**

- Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi kepada ASN yang ditemukan melakukan tindakan Tidak Disiplin dalam Kerja dan yang berprestasi oleh Pemerintah daerah dengan diberikan penghargaan.
- Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada ASN dan sosialisasi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan

**2. PENGAWASAN**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pengawasan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 8.028.235.000,00 dengan yakni Rp. 3.320.000.000,00 belanja langsung dan Rp. 4.708.235.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada Tahun 2018 adalah Rp. 7.904.966.410,00 atau sebesar 98,46%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.60 Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan  
Tahun 2018*

1.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan</li> </ul>
2.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur



		pengawasan
	•	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	•	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

## B. CAPAIAN KINERJA

### a. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal Tahun 2018 ditargetkan TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah sejumlah 203 Rekomendasi atau 65% dari total Rekomendasi yakni 313 Rekomendasi. Sedangkan Realisasi TL Rekomendasi tahun 2018 adalah 218 Rekomendasi atau 69,64% dengan capaian kinerja 107,13%, atau kategori nilai (*Sangat Tinggi*). Selanjutnya untuk TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI ditargetkan 747 Rekomendasi atau 75% dari jumlah total yakni 997 Rekomendasi, namun yang terealisasi hanya 719 Rekomendasi atau 72,12% dengan capaian kinerja 96,16 %, kategori (*Sangat Tinggi*).

Sampai dengan tahun 2018 keadaan hasil pengawasan atau temuan aparatur pengawasan APIP dan BPK-RI serta capaian kinerja dapat dilihat seperti dibawah ini.

*Tabel 4.61  
Jenis Temuan APIP Tahun 2018*

Jumlah		Sudah ditindak lanjuti	Nilai (Rp)	Belum ditindak lanjuti	Nilai (Rp)
Temuan	Rekom				
254	313	218	844.342.551,88	89	1.900.263.625,46

*Tabel 4.62  
Jenis Temuan BPK-RI Tahun 2018*

Jumlah		Sudah ditindak lanjuti	Nilai (Rp)	Belum ditindak lanjuti	Nilai (Rp)
Temuan	Rekom				
379	997	719	13.223.338.948,54	89	1.900.263.625,46



## b. Tenaga Fungsional Auditor Yang Bersertifikat

Pada Tahun 2018 ditargetkan Tenaga Fungsional Auditor yang Bersertifikat sudah harus mencapai 75% dari 60 orang (total pegawai Inspektorat) yang ada. Dan alhamdulillah target ini tercapai bahkan terlampaui dengan realisasi capaian sebesar 76%. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2018 adalah sebesar 101% yang dihitung berdasarkan pada target yang ditetapkan sebesar 75% dan realisasinya 76%. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.63

Tenaga Fungsional APIP Inspektorat Kab. Bone Bolango Tahun 2018

Jumlah Pegawai Inspektorat	Tenaga Fungsional APIP Bersertifikat	Kebutuhan	JFA	Dalam Proses Usulan Ke JFA	Belum Bersertifikat Auditor
60	46	67	42	2	14

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Masih terdapat Pejabat Pelaksana Kegiatan SKPD yang cenderung berperilaku KKN sebagai akibat dari lemahnya reward (penghargaan) atas pejabat yang berprestasi dan punishment (hukuman) terhadap pejabat yang telah melakukan KKN.
- Lemahnya pemahaman pejabat pelaksana terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Lemahnya sistem pengendalian intern pada setiap SKPD, sehingga cenderung memperbesar terjadinya berbagai penyimpangan.
- Jumlah aparat pengawasan yang memiliki kualifikasi sebagai auditor masih kurang memadai.
- Masih terdapat aparat pengawasan yang berperilaku belum sesuai dengan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

### b. Solusi

- Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi kepada pejabat yang ditemukan melakukan tindakan KKN, dan yang berprestasi oleh Pemerintah daerah dengan diberikan penghargaan.



- Memberikan pembinaan berupa pemberian Bimbingan Teknis kepada pejabat dan sosialisasi terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan.
- Antisipasi permasalahan ini dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya SPIP dan perlu dibentuknya Satgas SPIP baik ditingkat SKPD maupun ditingkat pemerintah daerah.
- Melakukan pengusulan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Daerah untuk permintaan penambahan pegawai sesuai dengan latar pendidikan yang diharapkan

### 3. PERENCANAAN

#### A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 8.546.294.500,00 yang terdiri dari Rp. 5.610.318.500,00 belanja langsung dan Rp. 2.935.976.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada Tahun 2018 adalah Rp. 8.084.558.867,00 atau sebesar 94,60%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.64 Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan  
Tahun 2018*

1.	Program pengembangan data/informasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kab. Bone Bolango Tahun 2018</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kab. Bone Bolango Tahun 2018</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Koordinasi Data</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis Simda Perencanaan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Dokumen PDRB</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Dokumen Bone Bolango Dalam Angka</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Dokumen Kecamatan Dalam Angka</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Buku Satu Data Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018</li> </ul>



2.	Program perencanaan pembangunan daerah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan tahun 2016 - 2021</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Perubahan tahun 2016 - 2021</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan tahun 2016 - 2021</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen RKPD tahun 2019</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS tahun 2019</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan tahun 2018</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen KUPA dan PPASP tahun 2018</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Musrenbang RKPD</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen LKIP tahun 2017</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek SAKIP</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coaching clinic Penguatan SAKIP</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen LKPJ Tahun 2017</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen IKM</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dok. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2018</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Data Analisis dan Evaluasi Capaian Program Sebagai Bahan Evaluasi RPJMD 2018</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2017</li> </ul>
3.	Program perencanaan pembangunan ekonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Usulan DAK Tahun 2020</li> </ul>
4.	Program perencanaan sosial dan budaya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan SDGS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Kota Sehat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi penanggulangan kemiskinan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutahiran mandiri basis data terpadu kemiskinan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pembangunan desa</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi pendaftaran MPM</li> </ul>



5.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Infrastruktur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Masterpland Pengembangan jalan baru</li> </ul>

## B. CAPAIAN KINERJA

### a. Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Yang Disusun

Keterpenuhan Dokumen Perencanaan yang wajib disusun yang terdiri dari 7 Dokumen yaitu: RKPD 2019, RKPD – P 2018, KUA dan PPAS 2019 dan KUPA PPASP 2018, dokumen Perubahan RPJMD 2016 - 2021 telah tercapai atau 100% dengan telah selesainya penyusunan ke-7 dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut.

Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan yang wajib disusun selama tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

*Grafik. 4.71*  
*Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan yang disusun*  
*Tahun 2016 - 2018*





**b. Konsistensi Program dan Kegiatan APBD yang Sesuai dengan RKPD**

Konsistensi perencanaan dan penganggaran dapat dianalisis melalui isi pokok dari setiap dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA/DPA SKPD dan APBD. Kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) merupakan kebijakan yang menjadi pedoman bagi satuan aparat perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Oleh karena itu, penjabaran kebijakan menjadi program-program pemerintah daerah harus dirumuskan dengan memperhatikan tingkat konsistensi penjabarannya jika perlu sampai pada rumusan kegiatan-kegiatan indikatif. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan kebijakan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi kemudahan dan kejelasan kepada setiap SKPD sebagai pelaksana teknis dari kebijakan tersebut. Setiap SKPD harus mampu menarik benang merah dari setiap kebijakan yang tertuang ke dalam RPJMD.

Berikut ini grafik capaian konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

*Grafik. 4.72*  
*Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan APBD*  
*Tahun 2016 - 2018*





### c. Konsistensi RKPD dengan RPJMD

Ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah patut diapresiasi, namun belum cukup untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Ada tiga hal pokok yang harus tetap dijaga didalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah: (i) konsistensi isi/muatan dalam satu dokumen dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, (ii) penetapan indikator kinerja output dan outcome secara tepat dan (iii) bentuk kreasi (kreativitas) pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Berikut ini grafik capaian konsistensi antara RKPD dengan RPJMD sebagaimana berikut:

*Grafik. 4.73*  
*Persentase Konsistensi RKPD dengan RPJMD*  
*Tahun 2016 - 2018*



## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Minimnya ASN Bappeda Litbang yang mampu memberikan asistensi kepada SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan
- Belum konsistensinya SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan sehingga harus berulang kali dilaksanakan asistensi
- Keterlambatan penyampaian data dan informasi oleh SKPD. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya data yang valid di masing-masing



SKPD serta adanya keengganan dari masing-masing bidang di SKPD untuk menyampaikan data dan informasi ke kasubag perencanaan.

- Proses perencanaan seringkali hanya bersifat formalitas belaka. Forum yang semestinya bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat (termasuk berbagai kepentingan politik) kurang mendapat perhatian, karena sebagian besar lebih tertarik pada tahap penganggaran. Mudah dipahami, sebab pada tahap penganggaran-lah perhitungan biaya (uang) mulai dibahas. Akibatnya rencana kegiatan yang telah dibuat mesti dibahas ulang di tahap penganggaran yang seringkali bertele-tele karena lahirnya transaksi politik, Anggota DPRD yang menghendaki kepentingan politiknya (dan juga kepentingan pribadinya) terakomodasi mendesak kepada Pemda untuk dimasukkan dalam APBD. Tak jarang, kepentingan tersebut sebenarnya belum urgen untuk direalisasikan. Pemda akhirnya menghadapi dilema. Jika menolak maka terjadilah ketegangan yang mengakibatkan pembahasan APBD menjadi berlarut-larut., terkadang muncul program dan kegiatan baru yang tidak konsisten dengan dokumen RKPD.
- Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah, sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral.
- Kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. SDM perencana juga masih sering mengalami mutasi sehingga pejabat baru harus menyesuaikan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya copy paste dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner
- Masih adanya kemauan sepihak dari beberapa pejabat SKPD yang mengintervensi kasubag perencanaan untuk mencantumkan program kegiatan di dokumen Renja maupun RKA-SKPD yang tidak ada dalam dokumen RPJMD
- Kurangnya koordinasi internal SKPD, sehingga menyebabkan rendahnya komitmen dalam organisasi untuk mempertahankan konsistensi

#### **b. Solusi**



- Perlu penguatan kapasitas dan komitmen, baik bagi kalangan Pemda maupun DPRD. Namun sebenarnya yang utama adalah komitmen, dan justru inilah yang paling sulit. Proses politik berbiaya tinggi barangkali menjadi akar masalah kenapa seringkali anggota dewan (begitu pula Kepala Daerah) bernafsu besar ingin menguasai anggaran. Percepatan proses pembahasan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan ketepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
- Bappeda Litbang setiap tahunnya melaksanakan pelatihan bagi kasubag perencanaan dan operatornya, bahkan untuk SKPD teknis seperti Dinas PU dan Kesehatan, melibatkan aparatur perencana di masing-masing bidang sehingga diharapkan ketersediaan SDM perencana di SKPD teknis dapat terpenuhi baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Sementara itu, untuk internal Bappeda sendiri, diberikan coaching clinic bagi aparatur yang bertugas sebagai pengasistensi sebelum melaksanakan asistensi kepada SKPD. Melalui pelatihan ini diharapkan masing-masing kasubag perencanaan SKPD mampu menyusun dokumen perencanaan yang konsisten dan tepat waktu
- Untuk mengantisipasi keterlambatan penyampaian data dan informasi dari SKPD maupun instansi vertical di Kabupaten Bone Bolango, maka setiap triwulannya dilaksanakan Rapat Koordinasi Data (Rakor Data) yang diharapkan SKPD bisa saling berkoordinasi dan konsolidasi data teknis maupun data sektoral dengan BPS, sehingga penyajian dan penyampaian datanya bisa valid, akurat dan tepat waktu
- Selain itu, pada penyusunan APBD, pihak-pihak yang terlibat hendaknya memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan penyusunan APBD secara tepat waktu serta melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Adanya komitmen memberikan gambaran bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD untuk mengetahui secara jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan APBD. Selain itu, melalui komitmen dapat menciptakan motivasi dan kemauan bagi pihak penyusun APBD untuk menyelenggarakan tahapan



penyusunan APBD yang lebih baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

- Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta mengevaluasi dan menetapkan rencana program pembangunan dan anggaran (*budget planning*) SKPD
- perencanaan partisipatif sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan rancangan APBD dapat lebih terfokus pada besaran dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak lagi terlalu terbebani dengan transaksi-transaksi politik.
- Salah satu solusi untuk mengatasi lemahnya SDM perencana, dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan maupun bimtek perencanaan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak Pusbindiklatren BAPPENAS RI
- Membuat kaji ulang keselarasan antara Program RPJMD dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang tercantum pada dokumen RKPD/Renja/PPAS/DPA-SKPD sehingga tercipta sinkronisasi antara program RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya
- Peningkatan kualitas dokumen perjanjian kinerja eselon II, eselon III, eselon IV sampai staf, sehingga jelas garis pertanggungjawaban dari program kegiatan di masing-masing SKPD, dimana bentuk pertanggungjawabannya secara berjenjang dari level terendah staf kepada pejabat eselon IV sampai dengan eselon II kepada Bupati
- Mewajibkan kepada SKPD untuk menyusun petunjuk teknis tentang penyusunan dokumen perencanaan di masing-masing SKPD

#### 4. KEUANGAN

##### A. PROGRAM DAN KEUANGAN

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan keuangan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 201.546.038.296,00 dengan yang terdiri dari Rp. 7.059.498.500,00 belanja langsung dan Rp. 194.486.539.796,18,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada Tahun 2018 adalah Rp. 199.441.578.881,00 atau sebesar 98,96%. Belanja tidak langsung pada penyelenggaraan urusan keuangan terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 5.802.318.858,18, belanja hibah Rp. 7.691.670.000,00,



belanja bantuan sosial Rp. 3.853.200.000,00, belanja bantuan kepada pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp. 176.869.815.738,00 serta belanja tidak terduga sebesar Rp. 269.535.200,00.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.65 Program dan Kegiatan Urusan Keuangan  
Tahun 2018*

1.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	• Penyusunan standar satuan harga
	• Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
	• Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
	• Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
	• Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
	• Peningkatan manajemen aset/barang daerah
	• penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
	• Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
	• Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
	• Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

## B. CAPAIAN KINERJA

### a. Pengelolaan Keuangan Secara Akuntabel & Tepat Waktu

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak jauh berbeda dengan proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat-rapat fraksi, sidang paripurna, sampai akhirnya dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Proses ini juga berlaku bagi perubahan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA).

Prosentase dokumen Ranperda dan Ranperbup yang disampaikan ke intansi terkait tepat waktu pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100%.



Pada tahun 2018 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango telah menyelesaikan dokumen Ranperda dan Ranperbup sejumlah 12 dokumen secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Arus Kas;
- Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

**b. Barang Milik Daerah yang terinventarisasi**

Inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Kegiatan inventarisasi sangatlah penting dalam manajemen aset. Aset perlu diinventarisasi supaya bisa terorganisir dengan baik dan tidak terjadi permasalahan pada aset tersebut. Inventarisasi sangat penting dalam hal kegiatan manajemen aset, karena setiap aset yang kita miliki perlu untuk diinventarisasi supaya kita mengetahui jumlah, nilai dan status dari aset tersebut. Pada pelaksanaannya inventarisasi banyak menemui kendala seperti banyaknya aset yang harus didata, keragaman aset yang sangat banyak, dan faktor pengguna aset yang kurang peduli terhadap aset yang mereka gunakan. Adapun laporan barang milik daerah periode tahun anggaran 2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 4.66  
Laporan Barang Milik Daerah Periode 2016-2018*

Aset Tetap	Aset Tetap Hasil Audit BPK-RI Per 31 Des 2016 (Rp)	Aset Tetap Hasil Audit BPK-RI Per 31 Des 2017 (Rp)	Aset Tetap Hasil Audit BPK-RI Per 31 Des 2017 (Rp)
Tanah	66.655.080.402,91	70.573.887.221,51	83.234.996.768,76
Peralatan dan Mesin	215.999.556.763,51	231.719.900.348,83	263.731.776.188,67
Gedung dan Bangunan	386.700.705.384,27	444.849.831.597,27	494.972.239.450,27



Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.936.859.253,72	723.362.366.433,55	809.972.679.991,55
Aset Tetap Lainnya	25.351.812.329,72	26.307.496.464,68	28.932.800.549,68
Konstruksi Dan Pengerjaan Lainnya	53.388.441.912,33	6.560.927.370,33	49.718.671.058,33
Aset Tetap Tak Berwujud	3.944.908.450,00	4.095.108.450,00	4.296.313.450,00
Aset Lain lain	40.057.230.642,24	15.310.371.801,03	695.192.485,33
Akumulasi Penyusutan	(445.840.001.481,47)	(462.106.674.753,80)	(461.414.560.459,80)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.629.613.416,67)	(3.156.538.376,67)	(3.466.198.770)
<b>TOTAL</b>	<b>975.564.980.240,56</b>	<b>1.191.461.562.507,22</b>	<b>1.423.100.412.111,90</b>

### c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada PAD Tahun 2018 mengalami penurunan dalam capaiannya, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 PAD senilai Rp. 86.197.832.175,34 dimana didalamnya terdapat Dana BOS sebesar Rp.21.612.064.834,60. Sedangkan untuk PAD Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.65.110.910.717,33 tanpa ada Dana BOS di dalamnya (Sesuai regulasi dinyatakan bahwa Dana BOS tidak dimasukkan lagi sebagai salah satu unsur dari PAD).

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana



Perimbangan), Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya), dan Transfer Pemerintah Provinsi. Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Jumlah target pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango pada APBD tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 80.724.733.925,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan asli daerah yaitu : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penetapan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 65.110.910.717,33  
terdiri dari :

- a. Pajak Daerah Rp. 10.916.679.121,00
- b. Retribusi Daerah Rp. 1.438.637.979,50
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 1.244.178.967,00
- d. Lain-Lain PAD Yang Sah Rp. 51.511.414.649,83

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Kurang pahamnya aparat pengelolaan keuangan yang ada di satuan kerja pemerintah daerah atas penyusunan laporan keuangan SKPD.
- Kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja pemerintah daerah dengan pejabat pengelolaan keuangan di SKPD.
- SKPD belum secara optimal melakukan analisis kebutuhan barang di masing-masing satuan kerja
- Kurangnya sumber daya aparatur yang profesional terhadap pengelolaan BMD pada masing-masing SKPD.
- Aplikasi barang milik daerah (BMD) yang belum terintegrasi dengan aplikasi SIMDA Keuangan.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran kewajiban selaku wajib pajak pada sektor rumah makan, kos-kosan dll.
- Kurangnya koordinasi antara kepala satuan kerja pemerintah daerah dengan pejabat pengelolaan keuangan di SKPD



**b. Solusi**

- Peningkatan kinerja sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis
- Peningkatan sarana prasarana berupa Integrasi sistem (aplikasi) antara perencanaan, penganggaran dan realisasi kinerja program / kegiatan / anggaran.
- Membuat dokumen kebutuhan barang milik daerah dimasing-masing SKPD
- Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola BMD melalui bimbingan teknis.
- Perlu adanya integrated yang lebih mendalam antara sistem informasi BMD dan Simda Keuangan.
- Peningkatan kinerja sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis.
- Perlu peningkatan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kinerja pendapatan daerah di segala sektor.

**5. KEPEGAWAIAN**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepegawaian pada Tahun 2018 sebesar Rp. 6.989.958.000,00 yang terdiri dari Rp. 4.290.000,00 belanja langsung dan Rp. 2.699.958.000,00 belanja tidak langsung. Realisasi keuangan pada Tahun 2018 adalah Rp. 6.918.697.225,00 atau sebesar 98,98%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

*Tabel 4.67 Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2018*

1.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana pembinaan karir dan PNS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleksi penerimaan calon PNS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan sistem informasi keuangan daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penempatan PNS</li> </ul>



	•	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
	•	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
2.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	•	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
	•	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
	•	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

## B. CAPAIAN KINERJA

Adapun capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### a. Diklat Kepemimpinan II (PIM II)

Diklat PIM II yang ditargetkan sebesar 41,2 % hanya tercapai 32,4 %. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan dari sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensinya juga adanya faktor belum adanya pemahaman akan pentingnya pendiklatan ini untuk jenjang karir kedepan. Untuk itu kiat dalam menggenjot sumber daya aparatur tersebut kedepannya BKPPD akan mengadakan sosialisasi guna meningkatkan motivasi sumber daya aparatur tersebut.

### b. Diklat Kepemimpinan III (PIM III)

Diklat PIM III sebesar 40 % angka tersebut dibawah angka yang ditargetkan yaitu 41,3 %, hal ini disebabkan 2 orang peserta yang mengundurkan diri dengan alasan belum adanya kesiapan dari ASN tersebut. Untuk tahun 2018 Diklat PIM III targetnya tercapai karena dari 10 peserta yang ditargetkan semuanya mengikuti diklat kepemimpinan tersebut

### c. Diklat Kepemimpinan IV (PIM IV)

Angka Capaian Diklat Kepemimpinan IV (Diklat IV) dari hasil akumulasi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 100 %. Sementara angka yang ditargetkan pada tahun 2018 yakni 41,5 % peserta yang ditargetkan sebanyak 40 orang sesuai dengan ekspektasi yang ditargetkan

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### a. Permasalahan

- Masih Kurangnya SDM aparatur yang menguasai memahami peraturan perundang – undangan yang terkait dengan manajemen kepegawaian dan beberapa sumber daya aparatur BKPPD yang belum menguasai IT



- Masih minimnya sarana dan prasarana dalam pengaplikasian dan sosialisasi produk kepegawaian ke seluruh wilayah kabupaten Bone Bolango, terutama beberapa di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang medannya masih sulit dijangkau melalui darat

#### **b. Solusi**

- Mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh BKPPD Kabupaten Bone Bolango serta mewujudkan peningkatan baik SDM, sarana prasarana, kelembagaan maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tupoksi BKPPD Kabupaten Bone Bolango dan Menyelaraskan serta mengaplikasikan berbagai
- Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong ASN diseluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango sehingga mau dan mampu mengikuti diklat struktural maupun diklat teknis dan fungsional.



## BAB V

## PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan sebagai salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah sehingga perlu untuk dilakukan pendelegasian tugas kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur pada pasal 48 ayat 1. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (pasal 49 ayat 2). Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain: pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran (*output*) dan menambah nilai aset Pemerintah. Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2).

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.





## A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menerima tugas pembantuan dari kementerian / pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Adapun SKPD yang melaksanakan adalah:

### 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Tugas-tugas pembantuan tersebut dilaksanakan dan diarahkan pada kegiatan sesuai peruntukannya, mencakup :

#### 1. Tugas Pembantuan Urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dijabarkan berdasarkan:

##### 1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan

- Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – Undang No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA. 2016

##### 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

##### 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

##### 4. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) yang terdiri dari :

Program :

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :



Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar Rp.5.690.758.000,- atau mencapai 94,84%.

Tabel 5.1

*Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018*

NO	KEGIATAN/PROGRAM	LOKASI	SATUAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN
1	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Modern Kec. Bulango Timur	Unit	1	1	6.000.000.000

*Sumber Data Dinas Perindagkop UMKM Tahun 2018*

#### 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pasar Modern Lokasi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 6.000.000.000.-

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam Penyelesaian kegiatan tersebut tidak mengalami permasalahan

Pembangunan pasar rakyat di wilayah Kabupaten Bone Bolango oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI diharapkan bisa dikembangkan menjadi pasar induknya. Pembangunan pasar rakyat oleh Kemendag RI yang lokusnya ada di Bone Bolango ini, itu diharapkan bisa melayani rakyat di Kabupaten Bone Bolango Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen bersama dikembangkan menjadi pasar induk.

Dalam mencapai indikator sasaran Presentase Peningkatan Pasar Yang Berstatus Pasar Harian pemerintah mengambil kebijakan program pemerintah melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri yaitu :

1. Pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk
2. Sosialisasi kepada masyarakat untuk penggunaan produk dalam negeri
3. Penataan lapak jualan demi kenyamanan



Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dari Pemerintah Pusat untuk Revitalisasi 2 Pasar di bagian Bone Pesisir yakni Pasar Rakyat Tombulilato dan Pasar Rakyat Bilungala.

## **B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bahwa Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/ atau desa meliputi sebagian tugas- tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan /atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten /kota dan / atau desa meliputi sebagian tugas- tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/ kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman





Pengelolaan Keuangan Desa;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

## **2. Urusan Pemerintah Yang Ditugas Pembantuankan Kepada Kabupaten/ Kota dan Desa Untuk Provinsi atau Kepada Desa untuk Kabupaten/ Kota**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. Kemudian Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, dapat dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa,

### **a. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa diturunkan dengan tujuan untuk membantu desa atau memfasilitasi desa yang membangun sarana demi meningkatkan kinerja desa, adapun bertujuan memberikan modal untuk pembangunan BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan yang lainnya.

Berikut daftar Desa Penerima Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana dalam table dibawah ini :



Tabel 5.2  
Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun 2018

NO	PENYALURAN KE DESA	ALOKASI DANA DESA	KET
	<b>KEC. TAPA</b>	<b>2,027,343,000.00</b>	
1	Desa Talumopatu	290083000	
2	Desa Talulobutu	284783000	
3	Desa Dunggala	293591000	
4	Desa Langge	298190000	
5	Desa Talulobutu Selatan	281809000	
6	Desa Keramat	280776000	
7	Desa Meranti	298111000	
	<b>KEC. KABILA</b>	<b>2,039,912,000.00</b>	
1	Desa Dutohe	285339000	
2	Desa Tanggilingo	294923000	
3	Desa Toto Selatan	293058000	
4	Desa Poowo	295042000	
5	Desa Talango	287788000	
6	Desa Poowo Barat	289788000	
7	Desa Dutohe Barat	293974000	
	<b>KEC. SUWAWA</b>	<b>2,879,417,000.00</b>	
1	Desa Tingkohubu	290061000	
2	Desa Boludawa	309211000	
3	Desa Bube	276281000	
4	Desa Huluduotamo	278429000	
5	Desa Ulanta	290811000	
6	Desa Tinele	295554000	
7	Desa Bubeya	291669000	
8	Desa Bube Baru	284650000	
9	Desa Tingkohubu Timur	281440000	
10	Desa Helumo	281311000	
	<b>KEC. BONEPANTAI</b>	<b>3,814,904,000.00</b>	
1	Desa Tamboo	284148000	
2	Desa Bilungala	338905000	
3	Desa Uabanga	294737000	
4	Desa Tolotio	284008000	
5	Desa Tongo	290945000	
6	Desa Bilungala Utara	292708000	
7	Desa Tihu	291354000	
8	Desa Tunas Jaya	290491000	
9	Desa Lembah Hijau	294435000	





NO	PENYALURAN KE DESA	ALOKASI DANA DESA	KET
10	Desa Batu Hijau	285128000	
11	Desa Ombulo Hijau	290671000	
12	Desa Kemiri	286293000	
13	Desa Pelita Hijau	291081000	
	<b>KEC. BULANGO UTARA</b>	<b>2,638,802,000.00</b>	
1	Desa Boidu	285148000	
2	Desa Bandungan	300304000	
3	Desa Tupa	291628000	
4	Desa Longalo	299068000	
5	Desa Tuloa	292662000	
6	Desa Kopi	285425000	
7	Desa Lomaya	294637000	
8	Desa Suka Damai	298478000	
9	Desa Bunuo	291452000	
	<b>KEC. TILONGKABILA</b>	<b>4,189,337,995.00</b>	
1	Desa Bongoime	307077000	
2	Desa Bongopini	291275000	
3	Desa Toto Utara	404938995	
4	Desa Moutong	292694000	
5	Desa Tunggulo	301138000	
6	Desa Lonuo	294888000	
7	Desa Tamboo	287023000	
8	Desa Iloheluma	294154000	
9	Desa Motilango	289970000	
10	Desa Butu	289778000	
11	Desa Permata	289160000	
12	Desa Tunggulo Selatan	279645000	
13	Desa Bongohulawa	289888000	
14	Desa Berlian	277709000	
	<b>KEC. BOTUPINGGE</b>	<b>2,540,665,000.00</b>	
1	Desa Timbuolo	282995000	
2	Desa Panggulo	282679000	
3	Desa Luwohu	273513000	
4	Desa Buata	278952000	
5	Desa Timbuolo Timur	282098000	
6	Desa Tanah Putih	279203000	
7	Desa Panggulo Barat	274289000	
8	Desa Timbuolo Tengah	313811000	
9	Desa Sukma	273125000	
	<b>KEC. KABILA BONE</b>	<b>2,696,870,472.00</b>	





NO	PENYALURAN KE DESA	ALOKASI DANA DESA	KET
1	Desa Huangobotu	298540000	
2	Desa Molotabu	304078000	
3	Desa Oluhuta	305338472	
4	Desa Olele	305505000	
5	Desa Botutonuo	303263000	
6	Desa Modelomo	298598000	
7	Desa Biluango	295344000	
8	Desa Botubarani	295191000	
9	Desa Bintalahe	291013000	
	<b>KEC. BONE</b>	<b>3,724,483,218.00</b>	
1	Desa Taludaa	299757000	
2	Desa Sogitia	291828000	
3	Desa Moodulio	293635000	
4	Desa Bilolantunga	283344000	
5	Desa Inogaluma	282441000	
6	Desa Monano	281604000	
7	Desa Tumbuh Mekar	286629000	
8	Desa Molamaha	288167000	
9	Desa Masiaga	281886000	
10	Desa Ilohuwa	212942718	
11	Desa Muara Bone	291729000	
12	Desa Cendana Putih	209414250	
13	Desa Waluhu	209844750	
14	Desa Permata	211261500	
	<b>KEC. BONE RAYA</b>	<b>2,068,529,000.00</b>	
1	Desa Inomata	226172000	
2	Desa Tombulilato	209152500	
3	Desa Mootayu	211312500	
4	Desa Mootinelo	209188500	
5	Desa Pelita Jaya	217392750	
6	Desa Moopiya	210296250	
7	Desa Alo	217944750	
8	Desa Laut Biru	210759000	
9	Desa Bunga	140273500	
10	Desa Mootawa	216037250	
	<b>KEC. SUWAWA TIMUR</b>	<b>2,372,952,000.00</b>	
1	Desa Tulabolo	220151250	
2	Desa Dumbaya Bulan	216095250	
3	Desa Tulabolo Timur	526443000	
4	Desa Tilangobula	215902500	





NO	PENYALURAN KE DESA	ALOKASI DANA DESA	KET
5	Desa Poduwoma	208536750	
6	Desa Panggulo	209860500	
7	Desa Tulabolo Barat	215453750	
8	Desa Pangi	282120000	
9	Desa Tinemba	278389000	
	<b>KEC. SUWAWA SELATAN</b>	<b>1,803,387,450.00</b>	
1	Desa Bulontala	220129500	
2	Desa Libungo	224155500	
3	Desa Molintogupo	240823200	
4	Desa Bonedaa	224895000	
5	Desa Bondawuna	223653000	
6	Desa Bulontala Timur	222900750	
7	Desa Pancuran	223621500	
8	Desa Bondaraya	223209000	
	<b>KEC. SUWAWA TENGAH</b>	<b>1,293,917,250.00</b>	
1	Desa Lompotoo	213610500	
2	Desa Lombongo	219573750	
3	Desa Duano	221585250	
4	Desa Tolomato	209701500	
5	Desa Alale	217651500	
6	Desa Tapadaa	211794750	
	<b>KEC. BULANGO ULU</b>	<b>1,092,167,500.00</b>	
1	Desa Mongiilo	223243500	
2	Desa Owata	150668500	
3	Desa Mongiilo Utara	214830750	
4	Desa Pilolaheya	146052500	
5	Desa Ilomata	213923250	
6	Desa Suka Makmur	143449000	
	<b>KEC. BULANGO SELATAN</b>	<b>2,225,437,000.00</b>	
1	Desa Ayula Selatan	221330250	
2	Desa Huntu Utara	215483250	
3	Desa Ayula Utara	228615750	
4	Desa Huntu Selatan	236424750	
5	Desa Ayula Tilango	234278250	
6	Desa Ayula Timur	215637750	
7	Desa Lamahu	163000000	
8	Desa Tinelu Ayula	223443750	
9	Desa Sejahtera	232233750	
10	Desa Huntu Barat	254989500	
	<b>KEC. BULANGO TIMUR</b>	<b>999,521,000.00</b>	



NO	PENYALURAN KE DESA	ALOKASI DANA DESA	KET
1	Desa Bulotalangi	214438500	
2	Desa Toluwaya	209957250	
3	Desa Popodu	145686500	
4	Desa Bulotalangi Timur	213046500	
5	Desa Bulotalangi Barat	216392250	
	<b>KEC. BULAWA</b>	<b>1,378,575,750.00</b>	
1	Desa Mamungaa	216944250	
2	Desa Kaidundu Barat	143091000	
3	Desa Mopuya	141146000	
4	Desa Kaidundu	156672500	
5	Desa Bukit Hijau	145265500	
6	Desa Mamungaa Timur	148967000	
7	Desa Dunggilata	141444000	
8	Desa Pinomo Tiga	143158000	
9	Desa Patoa	141887500	
	<b>KEC. PINOGU</b>	<b>4,099,712,000.00</b>	
1	Desa Pinogu	786271000	
2	Desa Bangio	847276000	
3	Desa Dataran Hijau	833467000	
4	Desa Pinogu Permai	827406000	
5	Desa Tilonggibila	805292000	
	<b>TOTAL</b>	<b>43,885,933,635.00</b>	

\*) Sumber Data DPPKAD Tahun 2017

## b. Dana Desa

Dana Desa adalah anggaran yang diluncurkan dari Pemerintah untuk pembangunan Desa, dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, untuk Pembangunan didesa supaya terciptanya desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya.

Berikut dapat disampaikan realisasi alokasi dana desa sebagaimana dibawah ini :



Tabel 5.3  
Realisasi Dana Desa Tahun 2018

NO	PENYALURAN KE DESA	DANA DESA	KET
	<b>KEC. TAPA</b>	<b>5,266,392,000.00</b>	
1	Desa Talumopatu	707,568,000.00	
2	Desa Talulobutu	720,597,000.00	
3	Desa Dunggala	775,784,000.00	
4	Desa Langge	940,409,000.00	
5	Desa Talulobutu Selatan	686,565,000.00	
6	Desa Keramat	668,833,000.00	
7	Desa Meranti	766,636,000.00	
	<b>KEC. KABILA</b>	<b>5,047,220,000.00</b>	
1	Desa Dutohe	707,258,000.00	
2	Desa Tanggilingo	728,239,000.00	
3	Desa Toto Selatan	727,907,000.00	
4	Desa Poowo	739,564,000.00	
5	Desa Talango	695,088,000.00	
6	Desa Poowo Barat	698,647,000.00	
7	Desa Dutohe Barat	750,517,000.00	
	<b>KEC. SUWAWA</b>	<b>7,627,399,000.00</b>	
1	Desa Tingkohubu	717,141,000.00	
2	Desa Boludawa	804,879,000.00	
3	Desa Bube	667,309,000.00	
4	Desa Huluduotamo	686,385,000.00	
5	Desa Ulanta	930,457,000.00	
6	Desa Tinele	791,122,000.00	
7	Desa Bubeya	740,658,000.00	
8	Desa Bube Baru	910,728,000.00	
9	Desa Tingkohubu Timur	691,590,000.00	
10	Desa Helumo	687,130,000.00	
	<b>KEC. BONEPANTAI</b>	<b>11,056,791,000.00</b>	
1	Desa Tamboo	717,133,000.00	
2	Desa Bilungala	807,826,000.00	
3	Desa Uabanga	941,756,000.00	
4	Desa Tolotio	733,612,000.00	
5	Desa Tongo	943,438,000.00	
6	Desa Bilungala Utara	948,292,000.00	
7	Desa Tihu	740,984,000.00	
8	Desa Tunas Jaya	936,033,000.00	
9	Desa Lembah Hijau	978,965,000.00	





NO	PENYALURAN KE DESA	DANA DESA	KET
10	Desa Batu Hijau	722,789,000.00	
11	Desa Ombulo Hijau	935,265,000.00	
12	Desa Kemiri	702,138,000.00	
13	Desa Pelita Hijau	948,560,000.00	
	<b>KEC. BULANGO UTARA</b>	<b>7,579,228,000.00</b>	
1	Desa Boidu	709,757,000.00	
2	Desa Bandungan	954,627,000.00	
3	Desa Tupa	734,226,000.00	
4	Desa Longalo	954,911,000.00	
5	Desa Tuloa	1,085,229,000.00	
6	Desa Kopi	721,345,000.00	
7	Desa Lomaya	926,730,000.00	
8	Desa Suka Damai	759,139,000.00	
9	Desa Bunuo	733,264,000.00	
	<b>KEC. TILONGKABILA</b>	<b>11,194,546,000.00</b>	
1	Desa Bongoime	802,122,000.00	
2	Desa Bongopini	730,717,000.00	
3	Desa Toto Utara	742,170,000.00	
4	Desa Moutong	722,207,000.00	
5	Desa Tunggulo	1,009,231,000.00	
6	Desa Lonuo	753,868,000.00	
7	Desa Tamboo	727,821,000.00	
8	Desa Iloheluma	919,552,000.00	
9	Desa Motilango	718,900,000.00	
10	Desa Butu	923,609,000.00	
11	Desa Permata	1,045,280,000.00	
12	Desa Tunggulo Selatan	685,835,000.00	
13	Desa Bongohulawa	729,228,000.00	
14	Desa Berlian	684,006,000.00	
	<b>KEC. BOTUPINGGE</b>	<b>6,002,841,000.00</b>	
1	Desa Timbuolo	668,376,000.00	
2	Desa Panggulo	673,977,000.00	
3	Desa Luwohu	648,700,000.00	
4	Desa Buata	664,929,000.00	
5	Desa Timbuolo Timur	676,188,000.00	
6	Desa Tanah Putih	670,202,000.00	
7	Desa Panggulo Barat	657,945,000.00	
8	Desa Timbuolo Tengah	684,404,000.00	
9	Desa Sukma	658,120,000.00	
	<b>KEC. KABILA BONE</b>	<b>8,347,063,000.00</b>	





NO	PENYALURAN KE DESA	DANA DESA	KET
1	Desa Huangobotu	954,317,000.00	
2	Desa Molotabu	998,439,000.00	
3	Desa Oluhuta	1,039,613,000.00	
4	Desa Olele	988,805,000.00	
5	Desa Botutonuo	963,270,000.00	
6	Desa Modelomo	788,489,000.00	
7	Desa Biluango	960,558,000.00	
8	Desa Botubarani	934,836,000.00	
9	Desa Bintalahe	718,736,000.00	
	<b>KEC. BONE</b>	<b>11,003,361,000.00</b>	
1	Desa Taludaa	757,558,000.00	
2	Desa Sogitia	982,913,000.00	
3	Desa Moodulio	942,361,000.00	
4	Desa Bilolantunga	714,161,000.00	
5	Desa Inogaluma	729,603,000.00	
6	Desa Monano	718,976,000.00	
7	Desa Tumbuh Mekar	720,787,000.00	
8	Desa Molamaha	943,572,000.00	
9	Desa Masiaga	738,565,000.00	
10	Desa Ilohuwa	912,407,000.00	
11	Desa Muara Bone	720,536,000.00	
12	Desa Cendana Putih	706,800,000.00	
13	Desa Waluhu	703,982,000.00	
14	Desa Permata	711,140,000.00	
	<b>KEC. BONE RAYA</b>	<b>7,028,489,000.00</b>	
1	Desa Inomata	737,273,000.00	
2	Desa Tombulilato	670,101,000.00	
3	Desa Mootayu	685,123,000.00	
4	Desa Mootinelo	683,243,000.00	
5	Desa Pelita Jaya	731,783,000.00	
6	Desa Moopiya	681,016,000.00	
7	Desa Alo	724,809,000.00	
8	Desa Laut Biru	701,781,000.00	
9	Desa Bunga	721,120,000.00	
10	Desa Mootawa	692,240,000.00	
	<b>KEC. SUWAWA TIMUR</b>	<b>6,679,147,000.00</b>	
1	Desa Tulabolo	741,065,000.00	
2	Desa Dumbaya Bulan	713,318,000.00	
3	Desa Tulabolo Timur	1,089,774,000.00	
4	Desa Tilangobula	697,739,000.00	



NO	PENYALURAN KE DESA	DANA DESA	KET
5	Desa Poduwoma	675,106,000.00	
6	Desa Panggulo	687,604,000.00	
7	Desa Tulabolo Barat	698,049,000.00	
8	Desa Pangsi	697,230,000.00	
9	Desa Tinemba	679,262,000.00	
	<b>KEC. SUWAWA SELATAN</b>	<b>6,797,915,000.00</b>	
1	Desa Bulontala	741,015,000.00	
2	Desa Libungo	745,627,000.00	
3	Desa Molintogupo	1,014,442,000.00	
4	Desa Bonedaa	947,884,000.00	
5	Desa Bondawuna	938,354,000.00	
6	Desa Bulontala Timur	958,303,000.00	
7	Desa Pancuran	740,869,000.00	
8	Desa Bondaraya	711,421,000.00	
	<b>KEC. SUWAWA TENGAH</b>	<b>4,300,220,000.00</b>	
1	Desa Lompotoo	700,279,000.00	
2	Desa Lombongo	743,010,000.00	
3	Desa Duano	738,695,000.00	
4	Desa Tolomato	699,878,000.00	
5	Desa Alale	703,732,000.00	
6	Desa Tapadaa	714,626,000.00	
	<b>KEC. BULANGO ULU</b>	<b>5,410,859,000.00</b>	
1	Desa Mongiilo	965,488,000.00	
2	Desa Owata	998,337,000.00	
3	Desa Mongiilo Utara	721,032,000.00	
4	Desa Pilolaheya	945,967,000.00	
5	Desa Ilomata	740,186,000.00	
6	Desa Suka Makmur	1,039,849,000.00	
	<b>KEC. BULANGO SELATAN</b>	<b>7,624,992,000.00</b>	
1	Desa Ayula Selatan	734,528,000.00	
2	Desa Huntu Utara	731,483,000.00	
3	Desa Ayula Utara	759,698,000.00	
4	Desa Huntu Selatan	777,645,000.00	
5	Desa Ayula Tilango	775,713,000.00	
6	Desa Ayula Timur	692,430,000.00	
7	Desa Lamahu	810,396,000.00	
8	Desa Tinelo Ayula	731,266,000.00	
9	Desa Sejahtera	761,505,000.00	
10	Desa Huntu Barat	850,328,000.00	
	<b>KEC. BULANGO TIMUR</b>	<b>3,553,532,000.00</b>	



NO	PENYALURAN KE DESA	DANA DESA	KET
1	Desa Bulotalangi	712,000,000.00	
2	Desa Toluwaya	676,395,000.00	
3	Desa Popodu	726,501,000.00	
4	Desa Bulotalangi Timur	705,042,000.00	
5	Desa Bulotalangi Barat	733,594,000.00	
	<b>KEC. BULAWA</b>	<b>6,605,805,000.00</b>	
1	Desa Mamungaa	711,642,000.00	
2	Desa Kaidundu Barat	714,246,000.00	
3	Desa Mopuya	688,197,000.00	
4	Desa Kaidundu	716,706,000.00	
5	Desa Bukit Hijau	720,482,000.00	
6	Desa Mamungaa Timur	944,021,000.00	
7	Desa Dunggilata	699,715,000.00	
8	Desa Pinomo Tiga	704,396,000.00	
9	Desa Patoa	706,400,000.00	
	<b>KEC. PINOGU</b>	<b>4,051,863,000.00</b>	
1	Desa Pinogu	734,542,000.00	
2	Desa Bangio	866,021,000.00	
3	Desa Dataran Hijau	853,427,000.00	
4	Desa Pinogu Permai	826,386,000.00	
5	Desa Tilonggibila	771,487,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>125,177,663,000.00</b>	

\*) Sumber Data DPPKAD Tahun 2018

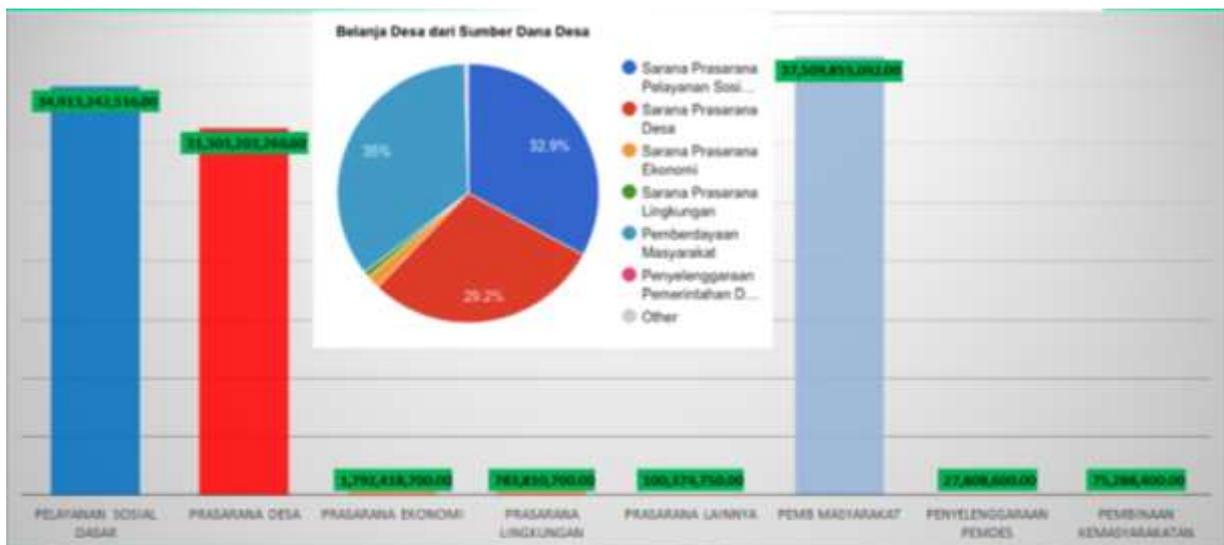
Salah satu strategi pemerintah untuk membantu desa untuk mandiri dan otonom adalah memberikan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bertujuan sebagai bantuan stimulant atau dana pendorong dalam pembiayaan program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2018 menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.43.885.933.635.- dan Dana Desa sebesar Rp.125.177.663.000. Dari dana tersebut digunakan untuk Pelayanan Sosial Dasar Rp.34.913.242.516, Prasarana Desa Rp.31.303.203.269, Prasarana ekonomi Rp.1.792.418.700, Prasraana lingkungan Rp.783.810.700, Prasarana Lainnya Rp.100.374.750, Pemberdayaan Masyarakat Rp.37.509.855.092, Penyelenggaraan Pemdes serta Pembinaan Kemasyarakatan



sebesar Rp.75.288.400

Dari hasil pelaksanaan bantuan keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di 160 Desa Tahun 2018 yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang digunakan untuk pembangunan Infrastruktur sangat bermanfaat secara umum dengan berpedoman pada peraturan perundangan dan pelaksanaan teknis yang berlaku, serta melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala sebagai bentuk langka pengendalian pemanfaatan anggaran agar sesuai dengan rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Grafik 5.1  
Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2018





## BAB VI

### PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Komitmen dan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan menjadi pra-syarat mutlak agar pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun skala regional menjadi mudah, cepat dan tepat sasaran. Olehnya, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk mengambil bagian secara aktif dalam setiap tahap pembangunan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan mengedepankan integrasi dan kerjasama seluruh elemen pembangunan daerah. Oleh karena itu, kerjasama antar daerah atau kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap optimalisasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

#### A. Kerjasama Antar Daerah

##### Kebijakan dan Kegiatan

Arah kebijakan kerjasama antar daerah yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan potensi dan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki serta dalam rangka peningkatan daya saing wilayah. Kerjasama tersebut diarahkan pula dalam upaya percepatan pembangunan wilayah termasuk pembangunan daerah perbatasan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus berpartisipasi dan mengembangkan koordinasi antar daerah melalui beberapa wadah kerja sama, antara lain Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) dan Kerjasama Utara-Utara. Selain aktif di



forum kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga melakukan kerjasama langsung dengan daerah lainnya diantaranya :

1. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kota Gorontalo Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Kabupaten/Kota dengan Nomor : 00/MoU/01/Pem.KS/ /2018.
2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Kabupaten dengan Nomor : 100/MoU/05/Pem.KS/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018.

Disamping melakukan kerjasama pembangunan antar daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara terus menerus mengembangkan kerja sama untuk beberapa program strategis, yang antara lain:

***Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga Yaitu :***

1. Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Bone Bolango Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan Nomor : 100/MoU/02/Pem.KS/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
2. Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 100/MoU/04/Pem.KS/VII/2018 dan GTO.III/MoU/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018.
3. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Universitas Brawijaya Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Nomor : 100/MoU/07/Pem.KS/X/2018 dan 119/UN10/KS/2018377 tanggal 25 Oktober 2018
4. Kerjasama Pusat Investasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : MoU/IP/2018 dan 100/MoU/08/Pem.KS/XI/2018.
5. Kerjasama Bagian Humas dan Protokoler Sekertariat Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan CV. Cahaya Patra tentang Pengelolaan Jasa Cetak Tabloid "KAMBUNGU" dengan Nomor : 100/PKS/01.a/Pem.KS/I/2018 dan 01/MOU/CP-K/2018 tanggal 4 Januari 2018
6. Kerjasama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango dengan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Sewa Menyewa



- Armada Dump Truck Tronton dengan Nomor : 100/PKS/01.b/Pem.KS/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
7. Kerjasama Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat dengan Nomor : 100/PKS/03/Pem.KS/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
  8. Kerjasama PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk dan Dinas Sosial Kabupaten Bone Bolango tentang Jasa Layanan Perbankan Program Bantuan Non Tunai Bahagia Lansia, Anak Yatim Ceria dan Janda Sejahterah dengan Nomor : /PKS/GTO.III/CCFU/VII/2018 dan 100/PKS/05/Pem.KS/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018
  9. Kerjasama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Media Penyiaran Go Radio 97.5 FM Gorontalo tentang Advokasi dan KIE Program KB Nasional Melalui Kegiatan Penayangan/Iklan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja dengan Nomor : 100/PKS/07/Pem.KS/III/2018 dan 92/SPK/GORAD/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018
  10. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Gorontalo tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Bone Bolango Dalam Rangka Universal Health Coverage.

***Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Intansi Vertikal Yaitu :***

1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Bolango tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotikan dan Prekursor Narkotika dengan Nomor : 100/MoU/10/Pem.KS/XI/2018 tanggal 19 November 2018.
2. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 100/PKS/01/Pem.KS/I/2018 tanggal 04 Januari 2018
3. Kerjasama Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan



Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).

4. Kerjasama dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo tentang Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo dengan Nomor : 100/MoU/13/PEM.KS/XI/17 dan HK.08.101.11.17.4133

## **B. Pembinaan Batas Wilayah**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Pembinaan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai dasar hukum eksistensi wilayah, kepastian cakupan wilayah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pencegahan timbulnya konflik antara daerah.

Sebagai dasar hukum eksistensi wilayah memberi makna bahwa suatu daerah yang telah berdiri sendiri harus memperoleh pengakuan publik yang harus didukung dengan Peraturan Perundang-undangan atau dengan kata lain wilayah yang telah berdiri sendiri perlu memiliki batas wilayah yang jelas dan pasti yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Tapal Batas.

Tidak jelasnya batas wilayah dapat berpotensi terjadinya konflik kepentingan pada wilayah perbatasan dalam proses penyelenggaraan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, serta kepemilikan lahan warga di wilayah perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut, pembinaan/penataan batas wilayah perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan pembinaan batas wilayah terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapal batas yang merupakan batas wilayah telah ditetapkan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003.

### **2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan melalui koordinasi bersama antar pemerintahan baik antar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan, maupun melalui



koordinasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Pembinaan tapal batas tersebut dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) serta Fasilitasi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

## C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

### 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya.

#### a. *Kejadian OrangHanyut/Hilang :*

Kejadian orang hanyut/hilang terjadi di 2 daerah yaitu Kecamatan Kabila dan Kecamatan Bulango Timur dengan jumlah korban 1 orang tiap lokasi kejadian pada bulan maret dan nove,ber.

Penanggulangannya :

- ❖ Pencarian korban dengan menurunkan Tim sebanyak 50 orang setiap kejadian yang terdiri dari SAR, TNI, Kepolisian, TGRC dan Masyarakat.
- ❖ BPBD Kabupaten Bone Bolango memfasilitasi makan dan minuman Tim pencarian korban selama 3 hari pada 2 kejadian.

#### b. *Kejadian bencana banjir :*

Bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango di 7 Kecamatan dan 27 Desa.

Penanggulangannya :

- ❖ Memberikan bantuan makanan siap saji selama pemulihan

#### c. *Kejadian bencana banjir bandang dan Tanah Longsor:*

Banjir Bandang di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 terjadi di 6 Kecamatan dan 18 Desa.

Tanah Longsor di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 terjadi di 2 Kecamatan dan 3 Desa

Penanggulangannya :

- ❖ Melakukan evakuasi terhadap korban bencana
- ❖ Memberikan makanan siap saji selama pemulihan
- ❖ Memberikan bantuan alat dapur seadanya
- ❖ Melakukan layanan kesehatan bagi korban banjir

#### d. *Kejadian Angin Putting Beliung :*



Kejadian angin puting beliung di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 terjadi di 2 Kecamatan dan 7 Desa.

Penanggulangannya :

- ❖ Melakukan evakuasi terhadap korban bencana
- ❖ Memberikan makanan siap saji selama pemulihan
- ❖ Memberikan bantuan alat dapur seadanya
- ❖ Melakukan layanan kesehatan bagi korban banjir

*Tabel.6.1*

*Data Kejadian Bencana Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor Dan Angin Putting Beliung Di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018*

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JENIS BENCANA
1	Kecamatan Bone	Desa Ilohuwa	Angin puting beliung
		Desa Bilolantunga	Angin puting beliung
		Desa Muara Bone	Angin puting beliung
2	Kecamatan Bone Raya	Desa Inomata	Angin puting beliung
		Desa Tombulilato	Angin puting beliung
		Desa Alo	Angin puting beliung
		Desa Mootawa	Angin puting beliung
3	Kecamatan Suwawa Selatan	Desa Bulontala	Banjir Bandang
		Desa Libungo	Banjir
4	Kecamatan Kabila	Desa Toto Selatan	Banjir Bandang
		Desa Poowo	Banjir Bandang
5	Kecamatan Tilongkabila	Desa Bongohulawa	Banjir dan Banjir Bandang
		Desa Bongopini	Banjir dan Banjir Bandang
		Desa Iloheluma	Banjir dan Banjir Bandang
		Desa Berlian	Banjir dan Banjir Bandang
		Desa Bongoime	Banjir dan Banjir Bandang
		Desa Mootilango	Banjir Bandang
		Desa Moutong	Banjir Bandang
		Desa Permata	Banjir Bandang
6	Kecamatan Tapa	Desa Tungala	Banjir
		Desa Keramat	Banjir
		Desa Talumopatu	Banjir
		Desa Bendungan	Banjir
7	Kecamatan Bulango Ulu	Desa Pilolaheya	Banjir dan Tanah Longsor
		Desa Mongiilo	Banjir dan Tanah Longsor
8	Kecamatan Bulango Utara	Desa Tupa	Banjir Bandang
		Desa Tuloa	Banjir dan Tanah Longsor





NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JENIS BENCANA
			dan Banjir Bandang
		Desa Lomaya	Banjir Bandang
		Desa Boidu	Banjir Bandang
		Desa Kopi	Banjir Bandang
		Desa Suka Damai	Banjir bAndang
9	Kecamatan Bulango Timur	Desa Bulotalangi Timur	Banjir Bandang

## 2. Status Bencana Kabupaten Bone Bolango

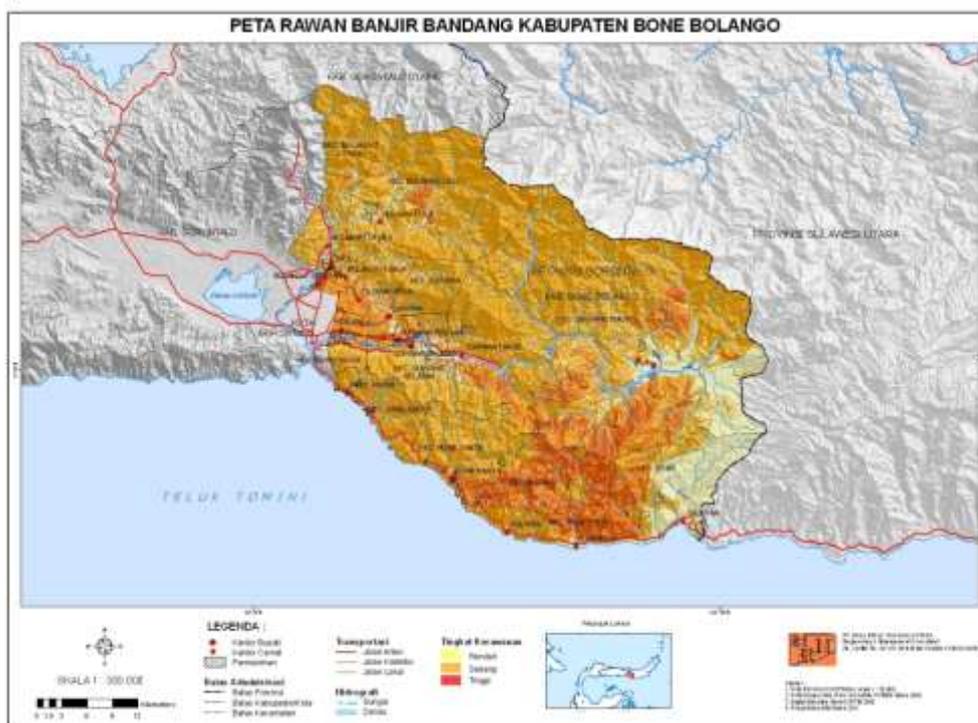
Berdasarkan hasil Pemetaan Profil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Bolango kerja sama dengan Koordinasi Survey Pemetaan Nasional (BAKORSULTANAL ) Kabupaten Bone Bolango merupakan Daerah Rawan Bencana. Daerah Rawan Bencana meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango.

Gambar. 6.1  
Peta Rawan Banjir



Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango

Gambar 6.2  
Peta Rawan Banjir Bandang



Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan Peta bencana di atas dapat di jelaskan bahwa beberapa Wilayah di Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana dimana terdapat beberapa kecamatan merupakan wilayah bencana dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu :

a. Tanah Longsor

- Kecamatan Bulango Ulu (Mongiilo, Owata, Pilolaheya, Mongiilo Utara, Suka Makmur, Ilomata)
- Kecamatan Bulawa ( Bukit Hijau, Nyiur Hijau, Kaidundu Barat, Kaidundu, Mopuya, Bukit Hijau)
- Kecamatan Bone Pantai (Tongo)
- Kecamatan Bulango Utara (Tupa, Longalo, Tuloa, Lomaya, Kopi, Bunuo, Suka Damai)

b. Banjir

- Kecamatan Suwawa Selatan (Libungo, Pancuran, Molintogupo)
- Kecamatan Bone Raya (Inomata, Alo, Moopiya)



- Kecamatan Bone Pantai (Tongo)
- Kecamatan Bone (Seluruh Desa)
- Kecamatan Bulango Utara (Seluruh Desa)
- Kecamatan Bulango Selatan (Ayula)
- Kecamatan Suwawa Timur (Seluruh Desa)
- Kecamatan Botupingge (Tanah Putih, Buata, Panggulo, Sukma)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Daerah-Daerah Titik Rawan Bencana berikut :

*Tabel 6.2*  
*Daerah – Daerah Titik Rawan Bencana*

NO	KECAMATAN	TITIK RAWAN BENCANA	JENIS BENCANA
1	SUAWAWA	Desa Bube , Boludawa , Huluduotamo , Tingkohubu Tinelo , Ulantha , Bubeya , Bube Baru , Tingkohubu Timur , Helumma	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
2	SUAWAWA TENGAH	Desa Lombongo, Alale, Tapadaa Lompotoo, Duano Tolomato	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
3	SUAWAWA SELATAN	Desa Libungo, Bulonthala, Bulontala Timur, Pancuran, Bondawuna, Bonedaaa, Bonda Raya, Molintogupo	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
4	SUAWAWA TIMUR	Desa Dumbay Bulan , Tilangobula , Tulabolo , Tulabolo Timur , Tulabolo Barat , Poduwoma , Panggulo , Tinemba , pangi ,	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
5	KABILA	Kelurahan Oluhuta, Oluhuta Utara, Tumbihe, Pauwo, Padengo, Desa Poowo, Poowo Barat, Talango,dan Toto Selatan, Dutohe Barat	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
6	TILONGKBILA	Desa Moutong,Toto Utara, Bongopini, Bongoime, Permata, Berlian, Bongohulawa, TAmboo, Motilango, Lonuo, Butu, Ilohelumo, Tunggulo, Tunggulo Selatan Moutong	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung



7	BOTUPINGGE	Desa Tanah Putih , Buata , Luwohu , Timuwolo , Timuwolo Timur , Panggulo , Sukma , Timuwlo Tengah ,panggulo Barat	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
8	KABILA BONE	Huangobotu Molotabu , Oluhuta , Buluango Modelomo, Botutonuo, Botubarani ,Olele , Bintalahe	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
9	BONE PANTAI	Tolotio , tamboo , Bilungala , Tongo , Uabanga , Bilongala utara , Tihu , Lembah Hijau , Tunas Jaya , Ombulo Hijau , Batu Hijau , Kamiri , Pelita Hijau	Banjir , Tanah Longsor , Pitung Beliung ,
10	BULAWA	Desa Bunga Hijau, Kaidundu, Bukit Hijau, Nyiur Hijau, Kaidundu Barat, Mopuya,Patoa, Mamungaa, Mamungaa Timur	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
11	BONE RAYA	Desa Inomata, Moopiya, Mootayu, Tombulilato, Alo, Mootinelo, Pelita Jaya Laut Biru, Bunga, dan Mootawa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
12	BONE	Desa Tumbuh Mekar, Monano ,Sogitia, Molamahu, permata, Inogaluma, Taludaa, Masiaga, Ilohuuwa, , waluhu , Muara Bone, Mooduliyo , Bilolantunga , Moodulio ,	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
13	TAPA	Desa Langge, Donggala , Talulobutu , Talumopatu ,, Talulobutu Selatan , Kramat , Meranti	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
14	BULANGO UTARA	Desa Bandungan , Boidu , Tupa, Longalo , Tuloa , Lo maya , Suka Damai, Kopi dan .Bunuo	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
15	BULANGO ULU	Desa Mongiilo, Owata, Pilolaheya, Mongiilo Utara, Suka Makmur, Ilomata	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
16	BULANGO TIMUR	Desa Bulotalangi, Bulotalangi Barat , Bulotalangi Timur , Popodu , Toluwaya .	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung
17	BULANGO SELATAN	Desa Ayula Selatan , Huntu selatan , Huntu Utara , Ayula	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung





		Utara , Ayula Tilango , Lamahu , Mekar jaya , Ayula Timur , Sejahtera , Tinelu Ayula .	
--	--	--	--

Sumber : BPBD Kabupaten Bone Bolango

### 3. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENGHADAPI KEMUNGKINAN BENCANA

- Melakukan sosialisasi penyebaran potensi bencana alam
- Melakukan pelatihan kader relawan siaga bencana
- Pemetaan jalur evakuasi bencana
- Melakukan simulasi bencana

### 4. POTENSI BENCANA YANG DI PERKIRAKAN TERJADI

- Tanah Longsor
- Banjir Bandang
- Puting Beliung

## D. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan yang dimaksud Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan Nasional.

Penetapan kawasan khusus di daerah otonom dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional seperti halnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, kawasan pengembangan industri strategis dan berteknologi tinggi (pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga permasyarakatan spesifik). Oleh karena itu, dalam penetapan kawasan khusus Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi wajib melibatkan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.

Ditinjau dari penjelasan diatas Kabupaten Bone Bolango belum memiliki kawasan khusus seperti yang dijelaskan di atas, tetapi hanya memiliki kawasan lindung yakni Taman Nasional Bogani Nani Wartabone



## **E. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Selain bencana alam di negara kita juga ini sering timbul gangguan keamanan yang menimbulkan konflik horisontal, seperti: SARA, anarkisme, separatis, terorisme, walau di wilayah Kabupaten Bone Bolango hal-hal semacam itu tidak terjadi namun perlu terus di waspadai karena hal-hal seperti ini dapat saja terjadi setiap saat.

### **1. Gangguan yang Terjadi**

Secara bertahap pelaksanaan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018, masih menggunakan perangkat Hukum berupa Perda yang terdiri dari Perda Nomor 40 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dan Perda Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas, implementasi Perda tersebut sudah menunjukkan dampak yang positif dalam rutinitas masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

Selama ini gangguan yang terjadi khususnya pada ketentraman ketertiban umum hanya bersifat lokal, seperti; pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, minum-minuman keras dan demonstrasi namun tidak anarkis, sedangkan gangguan bersifat SARA belum terjadi dan semoga tidak terjadi.

### **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Ada beberapa instansi yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban.

a. Institusi diluar Pemerintah Daerah, adalah :

- Kepolisian
- Kejaksaan
- TNI.

b. Institusi lingkup Pemerintah Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

### **3. Penanggulangan.**

Jika terjadi suatu kejadian diwilayah Kabupaten Bone Bolango, maka penanggulangannya telah diatur dalam PROTAP di masing-masing Institusi dan saling melakukan koordinasi untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman sesama aparat di lapangan. Disamping itu pula, dilakukan dengan mengoptimalkan secara penuh



KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) dengan maksud memberikan keamanan lingkungan yang kondusif, sehingga berdampak pada ketentraman masyarakat.

Setiap kejadian perkara baik itu sifatnya lingkungan maupun lokal dalam penanggulangannya selalu diikutsertakan aparat keamanan khususnya Polri, utamanya untuk menjaga agar kejadian perkara tidak melebar dan membesar dan selalu mencari pemecahan masalahnya dengan melakukan dialog dan melibatkan pihak-pihak yang merasa terlibat dalam suatu kejadian perkara.

Berbagai konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat, akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan yang kondusif. Dengan adanya KOMINDA merupakan wadah kerjasama antara TNI, POLRI, Kejaksaan dan Instansi terkait/vertikal, tujuannya untuk melakukan deteksi dini dan mengumpulkan informasi-informasi baik dari perorangan maupun sekelompok masyarakat dalam bentuk intelejen, serta lapor cepat/tindak cepat guna disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Bupati dalam pengambilan keputusan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dalam rangka penanganan gangguan keamanan sebagai berikut :

- Sosialisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Rapat Komunitas Intelejen Daerah
- Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat



## BAB VII

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi substansi strategis Pertanggungjawaban Bupati Bone Bolango Tahun 2018 yakni sebagai berikut :

1. Dengan segala keterbatasan yang ada baik menyangkut sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan maupun faktor pendanaan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah berupaya seoptimal mungkin menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkenaan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan demi tercapainya visi Kabupaten Bone Bolango.
2. Secara umum indikator kinerja makro Kabupaten Bone Bolango memperlihatkan trend peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun diakui masih terdapat beberapa aspek daya saing ekonomi dan kualitas pembangunan infrastruktur yang perlu terus dioptimalkan kinerjanya.
3. Belum tercapainya target pendapatan dalam kurung waktu dua belas bulan selama tahun 2018 perlu terus beroleh perhatian, yang tidak hanya semata-mata pada aspek perbaikan kinerja aparatur pengelola PAD dalam mengali sumber-sumber pendapatan PAD, tetapi jugaantisipasi berbagai faktor eksternal, antara lain (a) regulasi pendukung yang mengatur retribusi belum sepenuhnya diatur; (b) masih ada regulasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; (c) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan menaati regulasi tentang retribusi dan sejenisnya masih relatif rendah; (d) belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana publik yang menghasilkan sumber pendapatan retribusi daerah.
4. Untuk penyerapan (realisasi) belanja daerah dioptimalkan pemanfaatannya untuk pencapaian target kinerja output yang direncanakan. Adanya sisa anggaran belanja pada beberapa kegiatan tahun 2018 antara lain sebagai akibat dari kinerja pemerintah yang mengutamakan efisiensi serta efektifitas penggunaan anggaran.



5. Setiap permasalahan yang muncul sepanjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2018 telah ditempuh pemecahannya melalui pendekatan kerjasama, konsultasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah baik dengan Pemerintah Provinsi serta seluruh elemen masyarakat.

## **B. Saran**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, disamping merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip *Good Governance and Clean Governance* juga merupakan proses *legalstanding* yang bersifat administratif sebagai wujud profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini merupakan wujud nyata akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui DPRD yang menjalankan fungsi kontrol sehingga terbangun proses *Check and Balance* antara Eksekutive dan Legislatif.

Oleh karena itu melalui proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat dikritisi kinerja Pemerintah Daerah serta adanya rekomendasi strategis yang dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dari semua elemen pembangunan daerah guna tercapainya komitmen bersama yakni terwujudnya pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Disamping itu pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dapat menyatukan persepsi, komitmen seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN  
BONE BOLANGO

**LKPJ TAHUN  
2018**